

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

EDUKASI

K E U A N G A N

Open Class BPPK

Kelas Terbuka untuk Berbagi Topik Terkini



BUKA
OPEN

Edisi 40/2017

ISSN: 2086-4833



9 772086 483008

IKUTI KAMI

untuk info Program dan Kalender Diklat,
Edukasi Keuangan Negara, Beasiswa,
dan Pengumuman Diklat

 [www.facebook.com/
bppk.kemenkeu](http://www.facebook.com/bppk.kemenkeu)

 @BPPKKemenkeu

 @BPPKKemenkeu

www.bppk.kemenkeu.go.id



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

Salam Redaksi	2	Kuis	18
Lintas Peristiwa	4	Serambi Ilmu	19
Liputan Utama	5	Mata Air	61
Liputan Khusus	10	Resensi	63
Profil	12	Selasar	64
		Kang Edu	65

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

Pemimpin Redaksi

Sugeng Satoto

Redaktur

Beta Andri A. Uliansyah
Sintawati
Rita Dwi Lindawati
M. Yusuf Arriza
Bambang Kismanto
Soderi
Agus Sunarya Selaeman
Agus Hekso Pramudijono
Hartono
Agung Darono
Eduard Tambunan
Pilar Wirotama
Sudrajat

Editor

Edi Basuki Rakhmad
Sera Betania

Layout

Muhammad Fath Kathin
Unggul H. Muhammad

Desain Grafis dan Fotografer

Victorianus M. I. Bimo Adi
Eros Lassa Mursalin

Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum
Putro Utomo

Salam Redaksi

Salam Redaksi

Sebelumnya kami ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H bagi anda yang merayakannya. Marilah kita saling membukakan pintu maaf bagi sesama.

Tak hanya mengajak untuk membukakan pintu maaf, di Majalah Edukasi Keuangan edisi 40, bulan Juli 2017, kami juga mengajak anda untuk membaca liputan utama tentang kelas terbuka BPPK, atau yang lebih sering disebut *Open Class* BPPK. Dalam beberapa kali penyelenggaraannya, *open class* ini telah menarik banyak peserta. Apa dan bagaimana *Open Class* BPPK itu? Simak artikelnya di Liputan Utama.

Di rubrik Liputan Khusus, hadir artikel mengenai seminar Kebijakan Fiskal 2018 dengan tema "Menjawab Tantangan Perekonomian Global".

Pada rubrik profil, kami menghadirkan profil Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), Rahmadi Murwanto. Simak perjalanan karirnya hingga ia akhirnya dipercaya memimpin almamater yang membesarkannya.

Tak ketinggalan, rubrik-rubrik khas Edukasi Keuangan lainnya juga kami hadirkan untuk anda para pembaca setia Edukasi Keuangan. Selamat membaca!



Tes Kesehatan dan Kebugaran Penerimaan Mahasiswa Baru PKN STAN 2017



Benchmarking Pusdiklat Pengawasan BPKP ke BPPK terkait Corporate University



The Class is Open!

Text: Shera Betania
Foto: Eros L. Mursalin

Bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), open class bisa jadi sebuah metode 'diklat' baru. Tidak hanya dari segi peserta, namun juga tema-tema yang diangkat. Berbeda dengan seminar, lokakarya atau diklat yang temanya sudah ditentukan jauh hari sebelumnya, open class lebih bersifat update karena umumnya mengangkat tema atau isu yang sedang hangat. Kalau diklat membahas mengenai kompetensi umum yang harus dimiliki pegawai Kemenkeu (atau pengelola keuangan negara), open class lebih spesifik mengangkat tema-tema terkini.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Open Class

Open Class Pusdiklat KNPK. Tema yang diangkat adalah “Pengelolaan Daerah yang Kredibel untuk Menekan Kemiskinan, Mengatasi Kesenjangan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Penguatan Desa Membangun” dan “Analisis dan Evaluasi Laporan Keuangan Daerah, pada 12 April 2017”. Pada kesempatan perdana ini, open class KNPK diikuti sekitar 20 peserta. Antusias yang cukup tinggi untuk pelaksanaan pertama open class di malam hari atau open night class.

Sedikit berbeda dengan diklat, penyelenggaraan open class melalui beberapa tahap utama seperti perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Kalau diklat, tahapan ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, sedangkan untuk open class belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Yang juga menjadi unik dalam penyelenggaraan open class adalah media komunikasi dan sosialisasi atau ‘marketing’ kegiatan open class di masing-masing Pusdiklat. Hampir seluruh Pusdiklat memanfaatkan media sosial dalam mensosialisasikan open class. Dimulai dari membuat material publikasi dalam bentuk poster atau banner, lalu pegawai atau penyelenggara dari Pusdiklat mulai meng-upload poster atau banner tersebut ke masing-masing grup media sosial (seperti whatsapp) yang diikutinya, dan terus bergulir hingga peserta yang hadir bisa jadi tidak hanya

dari Kementerian Keuangan. Sosialisasi seperti sangat efektif dalam menjaring peserta yang sesuai target dari suatu tema open class.

Tantangan yang ditemui dalam pelaksanaan open class antara lain penentuan tema, waktu dan narasumber.

Hal lain yang juga menjadi tantangan adalah perlunya metode pembelajaran yang interaktif dan efektif sesuai dengan karakteristik peserta yang beragam, dengan latarbelakang yang berbeda. Selain itu, belum adanya payung hukum juga menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan open class kedepannya.

Tantangan tersebut mulai dijawab oleh masing-masing Pusdiklat dengan melakukan perencanaan yang lebih mendalam. Dimulai dari tema, dengan menggali keinginan para stakeholders

pada saat pelaksanaan open class sebelumnya, lalu melakukan modifikasi waktu penyelenggaraan, disesuaikan dengan karakteristik peserta dan narasumber. Penyelenggaraan open class masih didasarkan atas kesepakatan pimpinan BPPK, namun kedepannya akan dibuat payung hukum yang menguatkan pelaksanaan open class selanjutnya.

Respon peserta terhadap pelaksanaan open class sangatlah baik. Dari seluruh pelaksanaan open class, peserta sangat antusias menyambutnya. Salah satu alasannya adalah karena tema yang diangkat sangat menarik dan memang dibutuhkan oleh stakeholders. Bahkan banyak dari peserta yang menginginkan acara ini dapat diselenggarakan secara rutin. Terkait waktu, banyak yang menyarankan agar kegiatan open class tidak diselenggarakan pada malam

hari, karena tidak sesuai dengan konsep work-life-balance dan gerakan efisiensi sebagai penguatan budaya Kementerian Keuangan.

Konsep open class sangatlah bermanfaat tidak hanya bagi BPPK, namun juga bagi stakeholders BPPK dan Kementerian Keuangan. Bervariasinya tema yang up to date dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, mampu memberikan tidak hanya pengetahuan bagi peserta open class, namun juga bagi organisasi Kementerian Keuangan. Fokus pada isu strategis yang berdampak luas yang sekaligus dapat menjadi wadah sosialisasi kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Open Class BPPK dapat dilihat pada Gambar 3.

Open class atau kelas terbuka sudah menjadi istilah umum di masyarakat. Kita biasanya mendengar Open Class Menari, atau Open Class Blogger. Istilah open class bahkan dipakai dalam dunia pendidikan formal untuk meningkatkan kompetensi pengajar/guru. Open class menjelaskan kegiatan yang terbuka untuk umum, tidak spesifik untuk golongan (atau anggota) tertentu dan tidak dikenakan biaya atau gratis. Waktu pelaksanaan open class juga tidak teratur atau secara rutin diadakan, namun hanya pada saat-saat tertentu saja. Open Class, The Class is open. Terbuka untuk siapapun yang tertarik dengan suatu hal atau materi yang diangkat dalam open class.

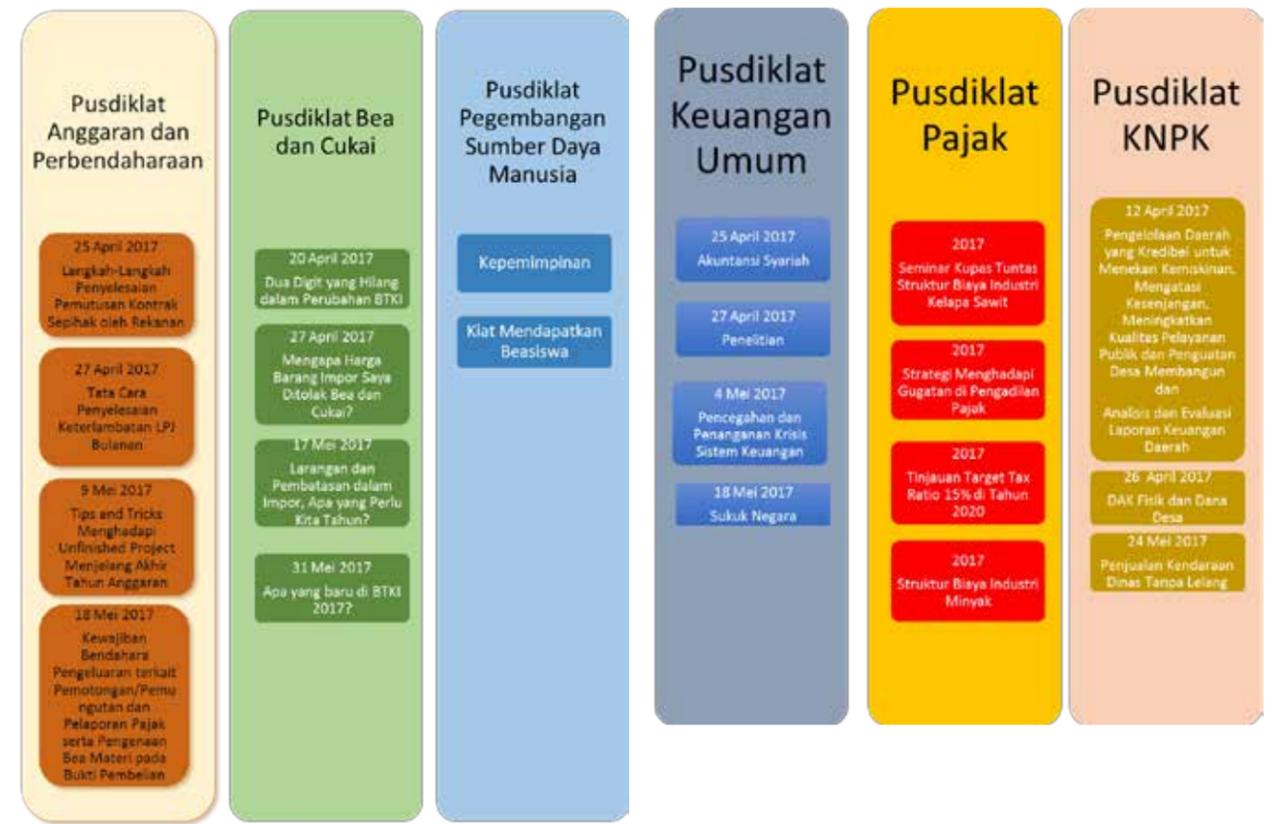
mendapatkan masukan atas materi yang disampaikan, dan peserta tidak hanya memperoleh ilmu namun juga dapat memberikan pendapatnya. Melalui open class, narasumber dan peserta dapat saling belajar tentang materi yang diangkat dan selanjutnya dijadikan masukan atas isu yang diangkat, bahkan masukan bagi para pengambil keputusan.

Open class di BPPK pada awalnya dilaksanakan setelah jam kerja berakhir (malam hari). Namun berdasarkan masukan dari peserta, beberapa pusdiklat menyelenggarakan open class di siang hari. Open Class BPPK dimulai pada bulan April 2017, diawali dengan

Seperti istilahnya yang open atau terbuka, peserta open class BPPK tidak terbatas pada pegawai Kemenkeu, namun juga pegawai lembaga/institusi lain, baik dari pemerintahan maupun swasta, bahkan juga masyarakat umum. Open class merupakan suatu metode pembelajaran yang bersifat dua arah, kolaboratif, antara narasumber/pengajar dengan peserta. Narasumber tidak hanya menyampaikan materi, namun juga



Gambar 2. Tantangan Pelaksanaan Open Class



Gambar 3. Penyelenggaraan Open Class BPPK



Open Class

Wahana Belajar, Menjadi Update dan Meningkatkan Kualitas SDM

Text: Shera Betania
Foto: Dok. Pusdiklat

Informasi keuangan negara terus berkembang. Kementerian Keuangan dengan perannya yang sangat penting dalam pemerintahan menjadi roda berjalannya Indonesia. Masyarakat pun banyak yang haus akan ilmu keuangan negara dan peran Kemenkeu di dalamnya. BPPK melihat hal itu dan berusaha mengakomodasi kebutuhan tersebut dalam suatu wadah yang dinamakan *open night class* dan berkembang menjadi *open class*.

Keuangan negara bisa jadi adalah satu topik yang selalu ada di berita televisi, radio, media cetak, media *online*, bahkan media sosial. Setiap hari ada saja informasi keuangan negara yang muncul, entah dari kebijakan pemerintah hingga kondisi keuangan suatu negara. Melihat hal tersebut, Kepala BPPK Astera Primanto Bhakti melihat perlu diadakannya forum yang mampu mengkomunikasikan kebijakan pemerintah, bahkan bertukar pikiran mengenai *hot issue* yang ada di masyarakat. *Open night class* pun dibuat oleh BPPK sebagai forum yang

diharapkan mampu menjembatannya.

Beda hal dengan diklat yang memiliki kurikulum yang *rigid*, *open class* (seperti namanya yang *open*) memiliki sifat yang terbuka dan bebas. Dari segi kurikulumnya bebas, dari segi peserta juga bebas, dan disampaikan dalam suasana yang tidak terlalu formal. *Open night class* menjadi pilihannya. Alasan yang pertama adalah karena keterbukaan, sedangkan yang kedua karena diadakan pada malam hari atau diluar jam kantor. Malam hari dipilih untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak yang tertarik untuk dapat

ikut serta. Bisa dari pegawai Kemenkeu, mahasiswa, kementerian/lembaga lain, pegawai swasta, bahkan khalayak umum.

Melalui *open night class* ini, Kepala BPPK menantang semua Pusdiklat dan PKN STAN untuk melakukan hal yang diluar kebiasaan atau *out of the box* tersebut. Setiap Pusdiklat dan PKN STAN ditantang untuk membuat kegiatan *Open night class* dua kali dalam sebulan dan dengan kuota peserta adalah 40 orang. "Saya agak sedikit memaksa untuk semua Pusdiklat karena mereka cenderung belum terbiasa untuk melakukan hal yang seperti ini, ekstrakurikuler," jelas

Kepala BPPK. Kepala BPPK ingin agar semua Pusdiklat mampu berpikir *out of the box* dan kreatif dalam menyampaikan informasi atau *current issue* yang ada di masyarakat melalui kegiatan *open night class* ini. Pada perjalanannya, *Open night class* berubah menjadi *open class* seiring dengan perubahan waktu penyelenggaraan yang berubah dari semula malam hari menjadi siang hari. Tempat pelaksanaan *open class* pun berubah dari yang semula hanya di laksanakan di Sekretariat Badan berubah menjadi dapat dilaksanakan di masing-masing Pusdiklat.

BPPK dengan *Kemenkeu Corporate University*-nya membutuhkan pengajar dan tim yang selalu *up to date*. Kemenkeu memiliki *stakeholder* yang sangat luas, termasuk di dalamnya masyarakat luas. Salah satu tugas Kemenkeu adalah memberikan sosialisasi dan informasi seluas-luasnya terkait kebijakan yang ada di Kemenkeu. Forum seperti *open class* adalah forum yang harus dimiliki sebuah *Corpu*. Kebijakan Menteri Keuangan disampaikan melalui *open class* dan melalui *open class* pula Kemenkeu menjawab pertanyaan dan menjangkau masukan yang ada di masyarakat. Untuk pegawai Kemenkeu sendiri, *open*

class menjadi salah satu saluran dalam mensosialisasikan kebijakan Menkeu yang berkaitan dengan tugas fungsi Kemenkeu. "Ini jadi wahana untuk terus belajar, menjadi *update*, kualitas SDM kita jadi meningkat", kata Kepala BPPK.

Kepala Badan menjelaskan bahwa program *open class* akan menjadi program yang berkelanjutan. Tidak hanya Pusdiklat, namun BDK juga akan ditantang untuk melakukan hal yang sama. Tidak hanya berguna bagi pengembangan organisasi (BDK), namun juga pengembangan SDM yang ada di dalamnya. Semua unit (Pusdiklat dan BDK) akan diarahkan untuk peka terhadap isu yang sedang hangat di masyarakat dan kebijakan terbaru Kemenkeu. Berangkat dari sana, tema-tema *open class* akan dihadirkan. Frekuensi pelaksanaan *open class* sendiri nantinya akan bertambah dari yang dua bulan sekali. Bahkan diharapkan nantinya kegiatan ini dapat menghasilkan sertifikat bagi para pesertanya.

Menteri Keuangan sendiri sangat menyambut baik diselenggarakannya *open class* ini. Kepala Badan menambahkan bahwa Menkeu memerintahkan kepada para Pejabat

Eselon I untuk menjadi narasumber dalam kegiatan seperti *open class* BPPK.

Beberapa kali diadakan, *open class* mampu menjangkau lebih dari 40 peserta dalam penyelenggaraannya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat haus akan informasi seputar kebijakan Kemenkeu dan keuangan negara. Kepala Badan berharap agar melalui penyelenggaraan *open class*, Kemenkeu akan menjadi lebih kuat. Baik dari segi pemahaman tugas dan fungsi, dari segi substansi dan segi komunikasi. "Tiga hal ini sangat penting, karena kita tahu apa yang kita kerjakan, kita tahu posisi kita dimana dan kita paham yang kita kerjakan itu kontennya apa," jelas Kepala Badan. Jika tiga hal tersebut sudah dipenuhi, pegawai Kemenkeu dapat menyampaikan kepada pihak lain mengenai kebijakan Menkeu untuk dapat didukung oleh masyarakat luas.





Kebijakan Fiskal 2018:

Menjawab Tantangan Perekonomian Global

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menyelenggarakan seminar yang bertemakan “Arah Kebijakan Fiskal 2018” pada hari Kamis, 4 Mei 2017 bertempat di Kantor Pusat BPPK, Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Seminar ini menghadirkan Direktur Penyusunan APBN, Kunta Wibawa D.N., SE., MA., Ph.D., sebagai pembicara dan Ketua Jurusan Manajemen Keuangan PKN STAN, Dr. Agus Sunarya Sulaeman, Ak., M.Si., sebagai moderator.

Acara dibuka oleh sambutan yang diberikan oleh Direktur PKN STAN, Rahmadi Murwanto, Ak., M.Acc., M.B.A., Ph.D., pada pukul 19.00 WIB. Rahmadi mengatakan bahwa seminar ini diselenggarakan untuk mengetahui lebih jelas keadaan perekonomian dan proyeksi kebijakan APBN sebagai instrumen fiskal di tahun 2018. Selain itu Rahmadi juga menambahkan bahwa seminar ini penting bagi para mahasiswa dan dosen pengajar yang diundang, agar ketika mahasiswa ingin menyuarakan pendapatnya dapat disalurkan pada media yang tepat dengan ilmu yang mumpuni.

Perekonomian Global Masih Penuh Tantangan

Kondisi perekonomian dunia saat ini tengah membaik, meskipun begitu sejumlah isu dan gejala ketidakpastian menjadi tantangan. Menurut data International Monetary Fund (IMF), kondisi perekonomian dunia telah mengalami *touchdown* di tahun 2015 kemudian berangsur pulih di tahun 2016, 2017 dan prediksi tahun 2018 dengan negara berkembang sebagai motor utamanya. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi prospek global. Seperti, *Re-Balancing* ekonomi Tiongkok, Kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah pemerintahan baru, serta kenaikan suku bunga The Fed dan pembalikan arus modal.

Perekonomian Tiongkok yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 10 tahun terakhir telah menimbulkan “efek samping” kesenjangan pendapatan dan pencemaran lingkungan. Pada tahun 1980-an angka Gini rasio Tiongkok berada di angka 0.3 menjadi 0.53 pada tahun 2013, yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Sementara pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari polusi pabrik dan kendaraan bermotor, telah menempatkan Tiongkok menjadi negara dengan pencemaran udara paling berbahaya. Selain itu, ketidakseimbangan permintaan telah membuat Tiongkok memiliki kelebihan investasi dan berusaha menarik investasi eksternalnya menjadi konsumsi. Apabila dibiarkan Tiongkok dapat melewati titik-balik perekonomian, yang akan mendorong perekonomian menuju “Middle-Income Trap” atau memicu krisis ekonomi. Oleh karena itu *Re-Balancing* ekonomi sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbuka, banyak melakukan transaksi perdagangan dengan Tiongkok dan dengan adanya pelemahan ekonomi ini sangat mempengaruhi Indonesia. Tiongkok mengimpor 52% barang-barang tambang dalam bentuk bijih yang sebagian besar berasal dari Indonesia. Selain itu, harga komoditas yang masih rendah turut berperan dalam rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sementara faktor lainnya adalah kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump, dan meningkatnya suku bunga The Fed. Ketegangan antara AS dan Korea Utara pun menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena tidak dapat diprediksi, ujar Kunta.

Dari dalam Indonesia, kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran masih menjadi tantangan pembangunan. Angka kemiskinan secara umum turun

dari 16.6% pada tahun 2007 menjadi 10.7% pada tahun 2016 tapi diikuti dengan meningkatnya Gini Rasio dari 0.36 menjadi 0.41 di tahun 2011 kemudian turun lagi menjadi 0.39 pada tahun 2016. Tingkat pengangguran terbuka pun mengalami penurunan seiring didorong program pendidikan vokasional dan sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja, dari 9.11% pada tahun 2007 menjadi 5.61% pada tahun 2016. Namun demikian, konsentrasi ekonomi masih terpusat di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena sekitar 60% penduduk bermukim di Pulau Jawa. Menurut data BPS, Pulau Jawa berkontribusi 58.5% terhadap PDB dengan tingkat kemiskinan 10.1%, Pulau Sumatera berkontribusi 22% terhadap PDB dengan tingkat kemiskinan 11.1%, Pulau Kalimantan berkontribusi 7.9% terhadap PDB dengan tingkat kemiskinan 6.5%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara berkontribusi 13.1% dengan tingkat kemiskinan 14.7%, Pulau Sulawesi berkontribusi 6% terhadap PDB dengan tingkat kemiskinan 11% dan Pulau Papua berkontribusi 2.5% dengan tingkat kemiskinan 22%.

Arah Kebijakan Fiskal 2018

Dalam menghadapi tantangan tersebut diperlukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melalui sinergi kebijakan di semua sektor. Sejumlah kebijakan dan proyeksi disiapkan untuk menghadapi tahun 2018. Diantaranya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai 5.4–6.1% PDB, dengan sejumlah kebijakan fiskal yang terarah. Diantaranya meningkatkan Tax Ratio melalui reformasi administrasi perpajakan, Belanja negara yang diupayakan lebih produktif dan tepat sasaran, rasio utang terhadap PDB dan defisit yang dijaga pada batas yang aman.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara G-20, Indonesia memiliki Tax Ratio yang paling rendah yaitu hanya sekitar 11%. Oleh karena itu menurut Kunta, perlu adanya reformasi

administrasi perpajakan melalui program *Tax Amnesty* yang telah dilaksanakan dan memperkuat database sebagai tindak lanjutnya. Kemudian untuk PNBP, diarahkan untuk terus dioptimalkan melalui penyesuaian tarif PNBP K/L dan diperkirakan meningkat 15-16% dibandingkan target APBN 2017.

Dari sisi belanja negara, dilakukan dengan meningkatkan belanja modal dan melakukan efisiensi belanja barang untuk mendukung belanja produktif dalam rangka pembangunan infrastruktur. Kebijakan subsidi diarahkan sejalan dengan rencana kebijakan pada tahun 2017, melalui subsidi tepat sasaran, serta perbaikan penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa.

“Dengan adanya dana desa juga membantu tersebarnya uang ke pelosok negeri, kegiatan sederhana seperti mengecat pagar dan memperbaiki jalan akan terasa pengaruhnya apabila dilakukan di pelosok desa”, Ujar Kunta.

Sementara itu, untuk mendukung APBN yang ekspansif, diperlukan kebijakan pembiayaan yang terarah dan terukur dengan defisit 1.9–2.3% PDB. Hal tersebut didukung dengan melakukan efisiensi biaya utang, penggunaan utang untuk belanja produktif dalam mencapai target pembangunan, dan menjaga komposisi utang dalam dan luar negeri tetap dalam batas aman dan terkendali.

Tentunya berbagai kebijakan tersebut perlu mendapat dukungan dari semua pihak. APBN harus dapat menjawab berbagai tantangan perekonomian yang ada. Kredibilitas APBN juga harus terus dijaga agar sebagai instrumen fiskal mampu mendorong perekonomian dan mendapat kepercayaan publik dan pasar.

Oleh: Ramadhan Dwi Pratama,
Mahasiswa PKN STAN



Rahmadi Murwanto

Membawa Perubahan, Mengawal Amanat

Oleh: Ridwan Sidik Kurniawan

Sempat berpindah-pindah dari satu unit ke unit lainnya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Pria kelahiran Metro yang merupakan lulusan Program Diploma 3 (D3) dan Diploma 4 (D4) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini akhirnya kembali lagi ke almamaternya. Bukan sebagai mahasiswa, namun kali ini lulusan terbaik D4 pada masanya tersebut kini menduduki posisi tertinggi di kampus sebagai Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) setelah dilantik langsung oleh Menteri Keuangan pada akhir tahun 2016 lalu. Bagaimana profil sosok Direktur PKN STAN yang baru ini? Inilah profil Rahmadi Murwanto.

Rahmadi, begitu ia biasa dipanggil, merupakan anak ke-enam dari dua belas bersaudara. Rahmadi kecil tergolong kurang beruntung. Pada saat memasuki usia sekolah, usaha ayahnya sedang mengalami kesulitan. Keadaan tersebut membuat Rahmadi sering menunggak uang sekolah. Namun demikian, hal tersebut bukan menjadi halangan dirinya untuk berprestasi.

Sejak masih SD, Rahmadi sudah menunjukkan prestasinya. Prestasinya di bangku SD tersebut membuatnya dapat masuk SMP favorit tanpa melalui tes. Rahmadi juga tidak kesulitan saat masuk SMA berkat nilainya yang tinggi pada Nilai Ebtanas Murni (NEM). Pada masa itu, NEM digunakan untuk masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Masalah finansial yang dihadapi oleh Rahmadi dan keluarganya pada masa itu membuat ia memutuskan untuk bersekolah sambil bekerja. Mulai dari tukang sepuh emas, sampai bekerja di percetakan pun pernah ia jalani. Uang hasil bekerja tersebut ia gunakan untuk membayar uang sekolah dan membeli buku. "Kan dulu masih murah lah ya," kenangannya.

Berawal dari keinginan keluarga

Setelah lulus SMA, Rahmadi mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru (SIPENMARU), untuk bisa masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pada waktu itu, sebenarnya ada jalur PMDK, yakni seleksi jalur undangan yang diperuntukkan bagi calon peserta/ siswa sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Namun karena pada saat SMA Rahmadi dicap

sebagai pemberontak oleh para guru, maka ia kurang begitu direkomendasikan oleh wali kelasnya. "Saya dulu memang hobinya protes kalau guru salah ngajar. Karena saya gak ingin, masak guru di depan ngajar aja salah,"

ungkapnya.

Rahmadi kemudian mengenal STAN dari kakaknya yang tinggal di Jakarta, yang memintanya untuk mengikuti ujian masuk di sekolah kedinasan tersebut. Awalnya Rahmadi kurang antusias, pasalnya ia lebih tertarik dengan ilmu eksakta. Meskipun begitu, Rahmadi tetap mengikuti arahan kakaknya untuk mencoba mengikuti ujian masuk STAN. Kurangnya minat untuk melanjutkan ke STAN justru malah membuat dirinya merasa rileks pada saat mengerjakan soal pada saat ujian. "Gak ada beban sama sekali, *Nothing to lose*," jelasnya.

Keputusan harus diambil Rahmadi pada saat ia mengetahui bahwa dirinya dinyatakan lulus dan berhak menjadi mahasiswa STAN. Ini karena di saat yang hampir

bersamaan, Rahmadi juga dinyatakan diterima di Jurusan Teknik Elektro pada salah satu PTN favorit. Di satu sisi, Rahmadi saat itu lebih tertarik mempelajari ilmu eksakta. Namun di sisi lain, keluarganya mendukung penuh agar ia masuk ke STAN. Bahkan, keluarganya berjanji akan membantunya, termasuk dari sisi finansial jika ia mau melanjutkan studinya ke STAN. "Akhirnya saya memutuskan, ya udah deh saya ngikutin keinginan keluarga saya masuk STAN," kenangannya.

Pada awalnya, Rahmadi masih belum terlalu bersemangat menjalani kuliah di STAN. Sampai akhirnya pada suatu saat dia mendapatkan nilai 70 dalam kuis, di satu mata kuliah. Tidak puas dengan nilainya, Rahmadi akhirnya memutuskan untuk lebih serius dalam belajar. Lama-kelamaan ia pun mulai menikmati kuliah di STAN. "Ternyata begitu disini, saya pindah dari ilmu eksakta ke ilmu sosial ya cocok-cocok juga," terangnya. Keseriusannya dalam belajar menunjukkan hasil yang memuaskan. Di tahun pertamanya, ia masuk sepuluh besar. Bahkan, di tingkat selanjutnya ia ditunjuk menjadi asisten dosen.

Kebiasaan Rahmadi yang kritis masih berlanjut saat dirinya menjadi mahasiswa di STAN. Jika ia melihat ada dosen yang salah, ia masih suka mengangkat tangan dan langsung mengoreksi. Namun yang membuatnya kagum adalah dosen-dosen STAN yang mengajarnya saat itu sangat terbuka untuk hal itu. Malahan saat itu ada dosen yang menantang mahasiswanya untuk mengoreksinya jika ia salah dalam mengajar. Berkat sifat kritisnya, Rahmadi berhasil menjawab tantangan ini.

Perjalanan Karir

Karir Rahmadi dimulai dari STAN saat dirinya masih menjadi pelaksana. Pengalamannya bekerja di percetakan ternyata dapat membantu pekerjaannya saat itu. Salah satunya adalah saat mencetak soal ujian. "Jadi begitu saya melakukannya, saya bisa melakukannya

dengan cara yang lebih efisien daripada teman-teman. Itu kadang-kadang nggak disadari, pengalaman masa lalu itu berguna di masa depan," ungkapnya.

Hobinya membaca dan semangatnya untuk terus mencari ilmu mendorong Rahmadi untuk melanjutkan studinya. Untuk kedua kalinya, ia menjadi mahasiswa STAN setelah dirinya memutuskan untuk melanjutkan studinya ke jenjang D4. Pada kesempatan

"Jadi begitu saya melakukannya, saya bisa melakukannya dengan cara yang lebih efisien daripada teman-teman. Itu kadang-kadang nggak disadari, pengalaman masa lalu itu berguna di masa depan," ungkapnya.

tersebut, sekali lagi Rahmadi menunjukkan prestasinya. Ia menjadi lulusan terbaik D4 di angkatannya. Tidak lama setelah lulus D4, ia langsung mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke S2. Adalah Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio yang menjadi tempat selanjutnya ia menimba ilmu. Di sana, ia berhasil meraih gelar *Master of Accountancy* (dengan konsentrasi pada *Financial Accounting*) dan *Master of Business Administration* (dengan konsentrasi pada *Corporate Finance* dan *Operation Management*),

Sekembalinya ke Indonesia, Rahmadi tidak lagi ditempatkan di STAN melainkan di Subbagian Perumusan Program, Bagian Bina Program, Sekretariat BPPK.

Di tempat kerja barunya, ia mencoba untuk mengubah pola komunikasi yang menurutnya kurang efektif. Terbukti, hal itu membuat rekan-rekan di bagiannya menjadi lebih nyaman dalam bekerja. Atasan Rahmadi di bagian tersebut (yaitu Ibu Lies Sunarmintyastuti) termasuk orang yang berani menyatakan pendapat. Berkat hal itu, ide dan gagasan yang dimiliki Rahmadi dapat tersalurkan sampai ke pimpinan. Sampai suatu saat, Kepala BPPK saat itu, Noor Fuad, menantang ia untuk mengubah dan memperbaiki sistem pembelajaran pada waktu itu. Tantangan itu kemudian menjadi semacam cambuk kepada bagiannya untuk terus melakukan perubahan. "Dulu kita sudah punya konsep, sebelum orang punya ide yang namanya *competency based training*, kita sudah punya itu. Kita mulai tahun 2002, proyeknya sampai sekitar 2004. Sampai kita sudah bisa mengidentifikasi *soft skill* apa yang harus masuk untuk setiap *training*. Beda banget dengan konsep sekarang," jelasnya.

Promosi pertama diperoleh Rahmadi di Bagian Bina Program. Di sini ia dilantik menjadi Kepala Subbagian Perumusan Program. Tahun 2011, Rahmadi berhasil meraih gelar PhD setelah kembali melanjutkan studinya ke jenjang S3 di Victoria University of Wellington, New Zealand. Sekembalinya dari tugas belajar tersebut, Rahmadi dipercaya menjadi Kepala Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja, di Pusdiklat Bea dan Cukai. Di Pusdiklat ini, ia juga dipromosikan menjadi Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja. Barulah pada tahun 2014, Rahmadi kembali ke Sekretariat Badan dan menduduki



jabatan sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (OTL).

Amanat Menteri Keuangan

Tidak lama setelah menjabat sebagai Kabag OTL, Rahmadi langsung mendapatkan PR yang cukup rumit. Pasalnya saat itu BPPK sedang dilanda isu pembubaran dan akan dilebur dengan unit Eselon I lainnya. Hal ini sejalan dengan transformasi kelembagaan yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Keadaan tersebut membuat Rahmadi harus berupaya keras untuk mempertahankan BPPK. Di bawah kepemimpinan Sumiyati, Kepala BPPK pada masa itu, kerja keras Rahmadi dan segenap tim akhirnya membuahkan hasil. BPPK kemudian tidak lagi direkomendasikan untuk dilebur. Sebaliknya, muncul rekomendasi untuk melakukan penguatan terhadap BPPK. Dari situlah konsep Kementerian Keuangan *Corporate University* (Kemenkeu Corpu) muncul sebagai strategi pembelajaran baru BPPK.

Satu lagi perubahan besar di BPPK pada saat Rahmadi menjabat sebagai Kabag OTL adalah transformasi STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Perubahan tersebut menurut Rahmadi merupakan hal yang luar biasa, mengingat sebelumnya usaha untuk melegalkan status STAN ini telah dilakukan selama puluhan tahun. Ia berharap, keberhasilan dalam transformasi STAN ini nantinya menjadi pemicu semangat untuk BPPK dalam menjalankan misinya untuk menerapkan strategi Kemenkeu Corpu.

Penunjukan dirinya menjadi Direktur PKN STAN menjadi cerita tersendiri bagi Rahmadi. Ia tidak menyangka akan diberi amanat untuk mengisi posisi tertinggi di PKN STAN. Ia mengungkapkan, sebelum dirinya, ada beberapa kandidat yang dicalonkan untuk mengisi posisi tersebut. Namun menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kandidat-kandidat tersebut dianggap kurang cocok mengisi posisi Direktur PKN STAN. Hingga pada suatu

hari, Rahmadi mengaku ditelpon oleh staf Kepala BPPK yang memberikan informasi bahwa dirinya diminta untuk melakukan wawancara ke Banteng (kantor pusat Kemenkeu). Dalam hati ia bertanya-tanya wawancara tentang apa karena staf tersebut juga tidak memberikan informasi yang jelas. Pertanyaan tersebut terjawab setelah kemudian Kepala BPPK, Sumiyati menghubunginya dan menjelaskan bahwa wawancara tersebut berkaitan dengan jabatan Direktur PKN STAN. Rahmadi pun memenuhi undangan tersebut. Pada awalnya, Rahmadi diwawancarai oleh Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, dan Kepala BPPK. Beberapa hari setelah wawancara tersebut, Rahmadi kembali diminta datang untuk kembali diwawancarai. Kali ini Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang akan mewancarnya langsung. Dalam wawancara yang juga dihadiri oleh Kepala BPPK tersebut, Rahmadi diminta menyampaikan pandangannya terhadap PKN STAN kepada Menteri Keuangan. Di akhir wawancara tersebut, Sri Mulyani mengajukan pertanyaan, "Kalau Pak Rahmadi saya angkat menjadi direktur PKN STAN, apa yang Pak Rahmadi minta dari saya?" Pertanyaan tersebut sontak membuat Rahmadi kaget. Lebih kaget lagi sesaat setelah ia mengutarakan jawabannya, Sri Mulyani kembali menimpali dengan jawaban, "Saya dukung Pak Rahmadi seribu persen. Besok pagi Pak Rahmadi saya lantik jadi direktur PKN STAN". Kekagetan itu tidak hanya dirasakan oleh Rahmadi. Ia mengatakan bahwa Kepala BPPK, Sumiyati yang saat itu berada di ruangan juga terlihat kaget. "Jadi kalo dikatakan *surprise*, ya *surprise* sekali," jelasnya.

Keesokan harinya, Rahmadi diundang untuk melakukan pelantikan. Ia menyatakan bahwa pelantikan tersebut tergolong sangat cepat. Pasalnya, itu berarti bahwa SK pelantikan tersebut disiapkan hanya dalam waktu satu malam. Dalam pelantikan tersebut, Menteri Keuangan memberikan pesan yang cukup panjang kepada dirinya.

Dalam pesan yang panjang tersebut, ada satu amanat yang menurutnya sangat penting. "Menteri Keuangan mandat khususnya satu, saya harus melakukan perubahan besar-besaran di PKN STAN sehingga kampus ini menjadi kampus yang sebenarnya," jelasnya.

Merombak PKN STAN

Rahmadi menyadari bahwa mandat khusus dari Kementerian Keuangan yang diamanatkan kepada dirinya menuntutnya untuk bekerja lebih keras. Terkait dengan hal tersebut, Rahmadi mengaku sudah memiliki beberapa target yang ingin ia wujudkan. Pertama, menunjukkan bahwa PKN STAN memiliki kapasitas untuk memenuhi harapan dari *stakeholder*. "Dari sisi peranan, PKN STAN sebenarnya harapan dari *stakeholder*. Kita tidak hanya diharapkan untuk memenuhi SDM keuangan Kementerian Keuangan, tetapi juga SDM untuk keuangan negara yang lainnya," jelasnya.

Kedua, mewujudkan proses belajar mengajar yang modern. Ia menginginkan agar proses pembelajaran dalam kelas tidak lagi tradisional, namun mulai menerapkan konsep *blended learning* dimana mahasiswa dapat belajar dulu di luar kelas dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga pada saat masuk kelas akan terjadi lebih banyak diskusi. Ketiga, ia menginginkan mahasiswa PKN STAN nantinya tidak hanya sekedar belajar, namun juga harus bisa menjadi manusia seutuhnya. Oleh karena itu, mereka harus punya kegiatan sosial yang bagus. Lebih lanjut ia menginginkan agar mereka bisa religius tapi juga menghargai keberagaman. Keempat, mengubah orientasi penelitian di PKN STAN agar lebih sejalan dengan kepentingan PKN STAN. Ia mengemukakan bahwa nantinya penelitian yang akan dilakukan oleh PKN STAN dapat berasal langsung dari permintaan Kementerian Keuangan sehingga hasil dari penelitian tersebut akan langsung dapat digunakan dalam

merumuskan kebijakan. Kelima, meningkatkan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh PKN STAN. Dalam hal ini, ia mengakui bahwa sebenarnya pengabdian kepada masyarakat yang saat ini ada sudah bagus, khususnya terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun demikian, ia menyangkan belum semua dosen terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut. Rahmadi memiliki keinginan bahwa pengabdian masyarakat itu dapat menghasilkan program yang memiliki dampak besar, yang nantinya membuat nama PKN STAN semakin besar. Meskipun Rahmadi mengakui bahwa target itu cukup berat, namun ia tetap merasa optimis target-target tersebut dapat diwujudkan. "Saya optimis, karena sebagian besar dari warga kita memang ingin berubah," terangnya.

Saat ini BPPK sedang berbenah untuk mewujudkan strategi Kemenkeu Corpu. Terkait dengan hal ini, Rahmadi menyatakan bahwa PKN STAN akan mendukung secara penuh. Hal ini tidak terlepas dari perannya pada saat menjabat sebagai Kabag OTL. "Saya tau konsepnya (Kemenkeu Corpu) seperti apa, maka saya sangat memahami bagaimana PKN STAN itu bisa mengambil peran disana," terangnya. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa PKN STAN saat ini merupakan *the real-nya* corpu. Ia menjelaskan bahwa untuk dapat mempersiapkan kebutuhan SDM yang berkompeten di bidang keuangan negara, PKN STAN harus benar-benar mempersiapkan agar lulusannya sesuai dengan level yang dibutuhkan. Ke depannya, ia menginginkan mahasiswa PKN STAN tidak hanya sekedar dibekali oleh materi-

materi yang bersifat teoritis saja, namun mahasiswa tersebut juga perlu mulai diperkenalkan dan dibuatkan kunjungan yang lebih intens ke kantor. Hal ini akan dapat membantu memberikan gambaran ke mahasiswa apa yang harus dikerjakan di kantor, sehingga nantinya lulusan PKN STAN akan lebih siap kerja. Selain itu, ia juga menginginkan agar para dosen PKN STAN nantinya dapat mendukung *Knowledge Management* dengan cara mengumpulkan semua *knowledge* yang ada, termasuk hasil riset. *Knowledge* tersebut nantinya bisa dikemas sebagai materi pembelajaran yang bisa diakses secara *online*. Terkait dengan hal ini, ia mengharapkan PKN STAN dapat bekerjasama dengan Pusdiklat untuk bisa saling

berbagi. "Jadi kita bisa bekerjasama. Yang sudah dihasilkan oleh Pusdiklat bisa kita ambil, yang kita produksi bisa diambil oleh pusdiklat. Fungsi kita ke BPPK adalah *support*," jelasnya.



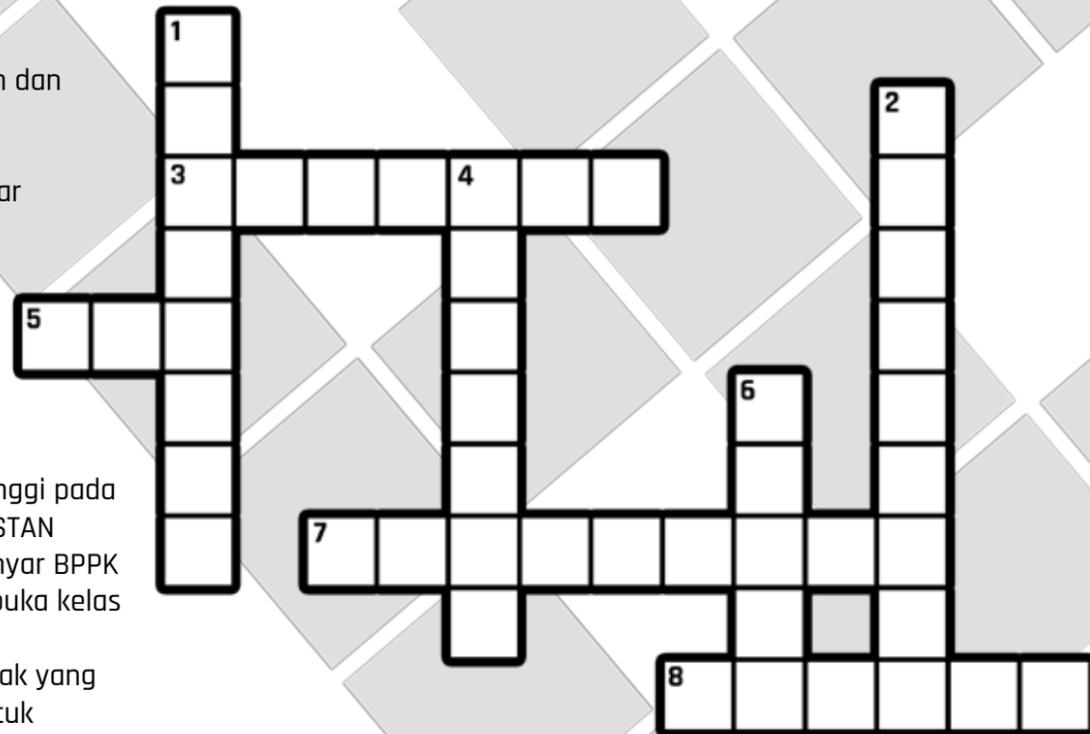
Kuis Edisi 40

Mendatar

3. Profil Edukasi Keuangan 40
5. Tes Kesehatan dan Kebugaran
7. Dasar Negara
8. Pelatihan Dasar

Menurun

1. Jabatan Tertinggi pada struktur PKN STAN
2. Program teranyar BPPK dengan membuka kelas
4. untuk umum
6. Perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan Sistem Akuntansi Instansi



Isilah Teka-Teki Silang Edukasi di atas, lalu kirimkan jawabannya ke redaksi Edukasi Keuangan melalui email: edukasikeuangan@kemenkeu.go.id

Jawaban kami terima paling lambat 15 Agustus 2017

Dapatkan HADIAH menarik dari Majalah Edukasi Keuangan.



Serambi Ilmu

Kompetensi Sosiokultural Pegawai Kemenkeu dari Tuntutan dan Tantangan Menjadi Tuntunan

Menjadi Account Representative yang Kompeten

E-Rekon-LK Aplikasi Terobosan untuk Rekonsiliasi SAI-SiAP dan Konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Kementerian dan Lembaga

Optimisme Mewujudkan Konektivitas Nusantara di Tengah Keterbatasan Ruang Fiskal Negara

Continuous Improvement Layanan Kerumahtanggaan Online Pusdiklat Pengembangan SDM

Pembawaan Uang Tunai (Rupiah atau Valuta Asing) Keluar/Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

Serunya Aktivitas Kelas Menggunakan e-Learning Kahoot!

KOMPETENSI SOSIALKULTURAL PEGAWAI KEMENKEU DARI TUNTUTAN DAN TANTANGAN MENJADI TUNTUNAN

Oleh:
Agus Suharsono
- Widyaiswara BDK Yogyakarta, BPPK -



Foto: pexels.com

Abstrak

Undang-Undang ASN mengamanatkan bahwa ASN harus mempunyai tiga kompetensi yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosialkultural. Selain itu tugas dan fungsi ASN ada tiga yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Indonesia mempunyai sangat beragam sosialkultural sedangkan Pegawai Kemenkeu sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga banyak pegawai yang bekerja pada keadaan sosialkultural yang berbeda. Berbeda dengan kompetensi teknis dan kompetensi manajerial yang sudah ada diklat maupun bahan ajarnya, untuk kompetensi sosialkultural belum ada. Tidak mudah membuat bahan ajar sosialkultural Indonesia yang sangat beragam. Cara yang bisa ditempuh adalah dengan menulis pengalaman beradaptasi dengan sosialkultural tempat bekerja dan menuliskannya menjadi sebuah buku pedoman di tiap kantor wilayah atau terpusat di Sesjen Kemenkeu. Buku tersebut dapat dikembangkan terus-menerus sebagai pedoman semua Pegawai Kemenkeu untuk menguasai kompetensi sosialkultural tempatnya bekerja.

Pendahuluan

Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) adalah bahwa mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Persatuan dan kesatuan Indonesia artinya menyatukan keberagaman sebagaimana semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang dicengkeram kuat oleh cakar burung Garuda, lambang negara Indonesia. Ke-bhinneka-an Indonesia setidaknya mempunyai delapan dimensi yaitu agama, suku, pendidikan, kelas sosial, status ekonomi, pertumbuhan ekonomi, bahasa, dan adat/kepercayaan (Utomo, 2015). Gambaran Dimensi Multisosiokultural Indonesia sebagaimana Gambar 1.

Keragaman Indonesia setidaknya dalam hal agama, suku, dan budaya. Jumlah pemeluk agama di Indonesia tahun 2010 berdasarkan data sensus penduduk (BPS, 2011) adalah sebagaimana Tabel 1.

Jumlah suku bangsa di Indonesia juga sangat banyak. BPS mengelompokkan suku bangsa di Indonesia ada tiga puluh suku bangsa tersebut meliputi: Suku asal Aceh, Batak, Nias, Melayu, Minangkabau, Suku asal Jambi, Suku asal Sumatera Selatan, Suku asal Lampung, Suku asal Sumatera Lainnya, Betawi, Suku asal Banten, Sunda, Jawa, Cirebon, Madura, Bali, Sasak, Suku Nusa Tenggara Barat lainnya, Suku asal Nusa Tenggara Timur, Dayak, Banjar, Suku asal Kalimantan lainnya, Makassar, Bugis, Minahasa, Gorontalo, Suku asal Sulawesi lainnya, Suku asal Maluku, Suku asal Papua, dan Cina. Masing-masing suku bangsa tersebut mempunyai anak-anak suku bangsa yang jumlahnya ratusan. Sumber lain menggambarkan keragaman

Tabel 1 Jumlah Pemeluk Agama Di Indonesia Tahun 2010

Agama	Pemeluk	%
Islam	207.176.162	88%
Kristen	16.528.513	7%
Katolik	6.907.873	3%
Hindu	4.012.116	2%
Budha	1.703.254	1%
Khong Hu Cu	117.091	0%
Jumlah	236.445.009	100%

Sumber: BPS 2011

Indonesia (Utomo, 2015) tersebut adalah sebagaimana Gambar 2.

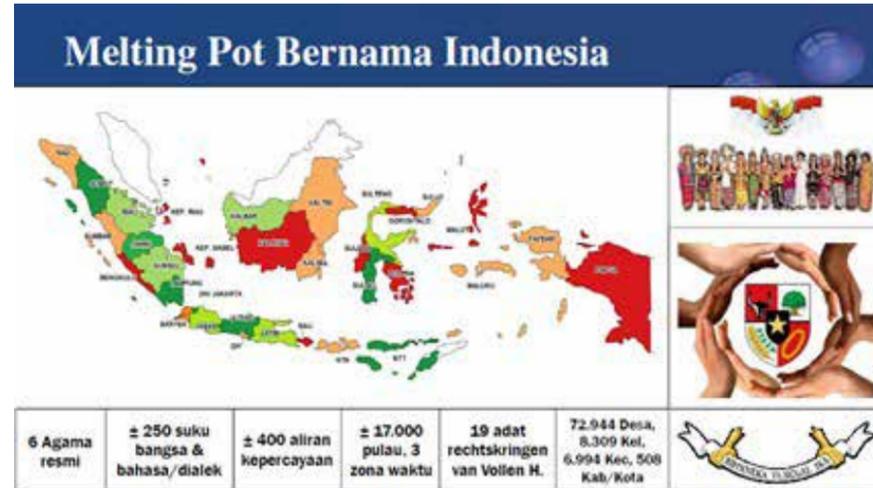
Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang ASN mengatur bahwa Pegawai ASN berfungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai Kementerian Keuangan merupakan bagian dari ASN yang dituntut salah satunya untuk menjadi unsur perekat persatuan dan kesatuan Indonesia, tugas dan fungsi ini sangat memungkinkan karena jumlah pegawainya sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tahun 2014 pegawai Kementerian Keuangan 64.417 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia pada sebelas unit Eselon I (Kemenkeu, 2015). Tidak tersedia data jumlah sebaran pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan wilayahnya. Sebagai gambaran sebaran wilayah kerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2015) adalah sebagaimana Tabel 2.

Pegawai yang ditempatkan di suatu wilayah belum tentu berasal dari wilayah tersebut. Bahkan kemungkinan terbesar adalah pegawai ditempatkan pada wilayah yang berbeda dengan asalnya, sehingga terdapat perbedaan sosialkultural. Perbedaan ini dapat menghambat kinerja, untuk itu harus dicari solusi terbaik mengatasi perbedaan sosialkultural tersebut.



Gambar 1 Dimensi Multisosiokultural Indonesia

Sumber: T.W. Utomo, <http://inovasi.lan.go.id>



Gambar 2 Keragaman Indonesia

Sumber: T.W. Utomo, <http://inovasi.lan.go.id>

Permasalahan

Tulisan ini akan membahas bagaimana Kementerian Keuangan dapat menjawab tuntutan dan tantangan Undang-Undang ASN perihal kompetensi sosialkultural agar menjadi tuntunan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum yang masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Hukum merupakan disiplin preskriptif karena merupakan sistem ajaran tentang kenyataan yang sepantasnya (Soekanto, 2015). Output penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa saran, namun juga mempunyai karakteristik terapan yang menetapkan standard prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Marzuki, 2010). Ilmu

hukum berbeda dengan ilmu sosial lainnya karena ilmu hukum mempunyai karakter yang khas yang direfleksikan dalam sifat normatif (Ibrahim, 2012). Karena sifatnya yang normatif metode penelitiannya juga khusus yaitu metode penelitian yuridis normatif yang mempunyai beberapa pendekatan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah (Diantha, 2016). Menurut Peter Mahmud Marzuki ada lima pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konsep. Menurut Johnny Ibrahim ada tujuh pendekatan dalam penelitian hukum normatif, selain lima yang sudah disebutkan ditambah dua

yaitu pendekatan filsafat dan pendekatan analitis. Masing-masing pendekatan dapat digunakan sendiri-sendiri atau digabung dalam suatu kajian akademis, namun dalam kajian akademis yuridis normatif pasti menggunakan pendekatan perundang-undangan karena kajian akademis yuridis normatif dilakukan terhadap norma hukum yang ada (Ibrahim, 2012). Tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data, penelitian hukum normatif yang diperlukan adalah sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Marzuki, 2010). Bahan hukum primer menurut Cohen & Olson adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara yang dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi. Bahan hukum sekunder dalam arti sempit berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum, dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer adalah bahan hukum sekunder dalam arti luas. Selain itu juga ada bahan hukum lainnya yang bersumber dari internet (Diantha,

Tabel 2 Sebaran Wilayah Kerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pulau	Pegawai	Kanwil	KPP	KP2KP	UPT
Sumatera	5.545	7	67	78	1
Jawa	22.928	16	189	31	3
Bali & Nusa Tenggara	1.484	2	19	15	-
Kalimantan	1.856	3	23	31	-
Sulawesi	2.086	2	26	37	1
Papua & Maluku	611	1	7	15	-
Jumlah	34.510	31	331	207	5

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2014

Tabel 3 Jabaran Kompetensi Sosial Kultural ASN Menurut LAN

No	Kompetensi	Deskripsi
1.	Mengelola keragaman lingkungan budaya	Kemampuan memahami dan menyadari adanya perbedaan budaya dan melihatnya sebagai hal yang positif, dalam bentuk implementasi manajemen kerja dengan mencegah diskriminasi dan menerapkan prinsip inklusivitas sehingga tujuan organisasi akan tercapai secara efektif.
2.	Membangun Network sosial	Kemampuan membangun interaksi sosial atau hubungan timbal balik yang menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi atau individu, antara kelompok atau antar individu dan kelompok.
3.	Manajemen Konflik	Kemampuan dalam mengelola konflik antar organisasi secara konstruktif.
4.	Empati Sosial	Kemampuan untuk memahami perbedaan pikiran, perasaan, atau masalah berbagai kelompok sosial yang berbeda.
5.	Kepekaan Gender	Kemampuan untuk mengenali dan menyadari kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diterima antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, yang secara potensial merugikan baik hak laki-laki maupun perempuan dalam konstruksi sosial-kultural.
6.	Kepekaan Difabilitas	Kemampuan untuk mengenali dan menyadari kebutuhan kelompok dengan keterbatasan fisik dan mental (difabel).

Sumber: T.W. Utomo, <http://inovasi.lan.go.id>

2016). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen dengan cara mencari, meneliti, mempelajari, mencatat, dan menginterpretasikannya.

Pembahasan

Terdapat beberapa penelitian tentang kompetensi sosial atau kompetensi kultural atau kompetensi sosial kultural. Penelitian Putu Deby Verayanti dkk menunjukkan bahwa kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng berada dalam kategori rendah, kompetensi sosial cukup tinggi namun perlu ditingkatkan, kompetensi sosial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (Putu Deby Verayanti, 2014). Kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mendorong para ahli untuk melakukan kajian terhadap perubahan sosial kultural secara konseptual (Hatu, 2011). Tulisan ini berbeda, setidaknya melengkapi, tulisan sebelumnya karena akan membahas kompetensi sosialkultural ASN berdasarkan Undang-Undang ASN, khusus untuk Pegawai Kemenkeu.

1. Tuntutan ASN Menguasai Kompetensi Sosialkultural
 Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:

- (1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
- (2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
- c. kompetensi sosialkultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mendefinisikan kompetensi sosialkultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan

untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Kompetensi sosialkultural terdiri dari dua kompetensi yaitu kompetensi sosial dan kompetensi kultural. Menurut Semrud-Clikeman dalam Imam B. Prasodjo, kompetensi sosial adalah kemampuan dalam mengambil beragam perspektif/cara-cara alternatif dalam menyikapi sebuah situasi, dengan bekal pengalaman yang diperoleh sebelumnya, yang kemudian diterapkan ke dalam situasi baru saat melakukan interaksi sosial untuk membangun pola interaksi yang baik. Jadi pola interaksi sosial ditentukan oleh persepsi, perilaku, dan pengalaman masa lalu. Konsep kompetensi sosial juga melingkupi konsep-konsep *social skills*, *social communication*, dan *interpersonal communication*. Kompetensi kultural adalah kemampuan dalam menjalankan fungsinya secara efektif dalam konteks kehidupan budaya yang berbeda. Selain itu juga kemampuan menciptakan keserasian/kesatuan perilaku, sikap dan kebijakan yang terbangun dalam pada sistem, lembaga, atau kalangan profesional yang bekerja secara efektif dalam situasi budaya berbeda. Jadi kompetensi sosialkultural menurut Imam B. Prasodjo adalah kemampuan dinamis dalam mengambil beragam perspektif/cara-cara alternatif saat berinteraksi dalam situasi budaya berbedabeda sehingga dalam bekerja dapat berjalan efektif. Secara teknis jabaran kompetensi sosialkultural ASN dapat dilihat dari pengelompokan dan deskripsi menurut Lembaga Administrasi Negara (Utomo, 2015) adalah sebagaimana Tabel 3.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 55/SJ/2008 Tentang Pelaksanaan Assessment Center Departemen Keuangan telah ditetapkan Kamus Kompetensi Departemen Keuangan. Secara umum kompetensi pegawai Kemenkeu terdiri dari duapuluh lima kompetensi yang dibagi menjadi tiga kluster kompetensi, yaitu kelompok kompetensi yang berhubungan dengan aspek *thinking, working, and relating*

dengan perincian sebagaimana Tabel 4. Kompetensi sosialkultural merupakan amanat Undang-Undang ASN, namun belum secara jelas dimasukkan sebagai salah satu kompetensi dalam Kamus Kompetensi Pegawai Kemenkeu. Memasukkan kompetensi sosialkultural ke dalam Kamus Kompetensi Pegawai Kemenkeu sebenarnya memang tidak harus secara spesifik disebutkan tetapi dapat saja terserap dalam kompetensi-kompetensi yang berada dalam *cluster relating*. Pertimbangan lain adalah kompetensi teknis dan kompetensi manajerial juga tidak disebutkan secara spesifik, tetapi dilebur dalam kedua puluh lima jenis kompetensi tersebut.

Pengembangan karier ASN, salah satunya berdasarkan penguasaan tiga kompetensi yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosialkultural. Untuk kompetensi teknis dan kompetensi manajerial dapat dipelajari melalui diklat yang sudah berjalan rutin dan tersedia bahan-bahan pembelajaran dan pengukurannya. Berbeda dengan kompetensi sosialkultural, kompetensi ini belum ada diklatnya juga tidak mudah membuat bahan diklat. Terdapat kesulitan menjadikannya bahan diklat karena sangat beragamnya sosialkultural di Indonesia. Belum tersedia diklat dan bahan pembelajaran kompetensi sosialkultural menyebabkan ASN Kementerian Keuangan tidak mempunyai gambaran atau panduan memahami sosialkultural tempat ia bertugas.

2. Tantangan Menguasai Kompetensi Sosialkultural

Pegawai Kementerian Keuangan mempunyai latar belakang sosialkultural yang beragam namun penempatan dan mutasinya tersebar di seluruh Indonesia dengan sosialkultural yang berbeda. Ketidapahaman pegawai terhadap sosialkultural tempat bertugas mempunyai potensi konflik sosialkultural yang dapat menghambat optimalisasi kinerja pegawai Kemenkeu

dalam mengelola keuangan negara.

Undang-Undang ASN menuntut Pegawai Kementerian Keuangan menguasai kompetensi sosialkultural pada tempatnya bekerja. Jika ia beradaptasi secara alami perlu waktu penyesuaian yang tidak sebentar. Tiap tahun selalu ada mutasi atau penempatan pegawai baru yang juga berarti banyak pegawai Kementerian Keuangan yang harus beradaptasi dengan sosialkultural tempat ia ditugaskan. Dilain pihak banyak Pegawai Kementerian Keuangan yang sudah mempunyai pengalaman beradaptasi dengan sosialkultural tempat bertugas. Pengalaman ini seharusnya menjadi bahan pembelajaran bagi pegawai lain yang ditempatkan pada tempat yang sama. Sayangnya pengalaman tersebut melekat pada orangnya dan akan ikut dibawa pergi jika ia dimutasi. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan sebagai berikut: Bambang, asli orang Yogyakarta sejak lahir sampai lulus kuliah belum pernah tinggal di luar Yogyakarta. Karena menjadi Pegawai Kemenkeu Bambang ditempatkan di Medan sehingga ia harus beradaptasi dengan sosialkultural di Medan secara alami. Misalnya, lima tahun kemudian akhirnya Bambang bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan sosialkultural masyarakat Medan. Jenis sosialkultural meliputi agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip. Sebagai contoh, dalam kasus ini Bambang akhirnya paham bagaimana sistem kekerabatan masyarakat Medan seperti bagaimana sebutan untuk orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, orang yang seumuran, atau bagaimana hubungan kekerabatan marga satu dengan marga lainnya. Hanya saja kemudian Bambang dimutasi ke Jakarta, maka pengetahuan Bambang menyesuaikan diri dengan sosialkultural masyarakat Medan akan dibawa Bambang ke Jakarta. Di sisi lain pada waktu yang bersamaan, Sugiyanto yang juga asli Yogyakarta baru saja ditempatkan ke Medan, maka ia harus beradaptasi dengan sosialkultural dengan masyarakat

Medan secara alamiah. Alangkah baiknya seandainya pengetahuan Bambang dapat digunakan Sugiyanto untuk lebih cepat beradaptasi dengan sosialkultural masyarakat Medan. Untuk itu perlu adanya pendokumentasian pengalaman-pengalaman tersebut sebagai bahan pembelajaran penguasaan kompetensi sosialkultural pegawai lain.

3. Tuntutan dan Tantangan Menjadi Tuntunan

Kompetensi sosialkultural belum diatur secara khusus dalam Kamus Kompetensi Pegawai Kemenkeu. Jadi Kamus Kompetensi Pegawai Kemenkeu perlu penyesuaian dengan kompetensi yang diatur dalam Undang-Undang ASN yaitu dengan memasukkan kompetensi sosialkultural. Namun Kamus Kompetensi tentunya hanya bisa mendeskripsikan kompetensi sosialkultural secara *normative*, tidak akan mampu menjabarkan atau memberi contoh implikasinya karena beragamnya variabel sosialkultural di Indonesia. Untuk itu perlu ada pedoman sebagai tuntunan pembelajaran pegawai yang akan ditempatkan di tempat yang beda dengan latar belakang sosialkulturalnya. Pedoman tersebut dibuat berdasarkan pengalaman pengalaman Pegawai Kementerian Keuangan yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah berhasil menyesuaikan diri dengan sosialkultural tempat bertugas, seperti telah diilustrasikan kisah Bambang dalam tulisan ini. Pedoman tersebut sebaiknya dibuat dalam bentuk buku yang tiap tahun dapat dikembangkan, dalam ilustrasi ini apa yang sudah ditulis oleh Bambang akan dijadikan pedoman oleh Sugiyanto, tentu saja selama tugas di Medan Sugiyanto juga akan mendapatkan hal baru tentang sosialkultural masyarakat Medan yang belum diketahui Bambang. Maka menjadi tugas Sugiyanto untuk menambah dan menyempurnakan buku pedoman sosialkultural. Dengan adanya ini diharapkan proses pemahaman terhadap kompetensi sosialkultural akan semakin cepat.

Untuk memudahkan pembuatan buku pedoman sosialkultural tersebut sebaiknya dilakukan oleh masing-masing Kantor Wilayah atau lebih baik lagi jika pembuatan buku pedoman sosialkultural ini terpusat di Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Karena beragamnya sosialkultural Indonesia maka buku pedoman sosialkultural tersebut dicetak berdasarkan kelompok sosial sosialkultural, misalnya buku sosialkultural Aceh, Batak, Minang, Palembang, Jawa, Sunda, Dayak, Bugis, Makassar, Ambon, Papua, Nusa Tenggara, atau Bali. Jika buku ini terwujud akan dapat dijadikan rujukan diklat di Kementerian Keuangan dan punya potensi menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga lain, Lemhanas, Sesko, dan kalangan akademisi. Buku ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk saling memahami dan menyatukan keberagaman sosialkultural Indonesia, karena sudah menjadi kodrat Indonesia beragam tetapi harus tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.

Penutup

Undang-Undang ASN mengatur bahwa salah satu fungsi dan tugas ASN adalah menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu juga diatur bahwa ASN harus mempunyai tiga kompetensi yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosialkultural. Berbeda dengan kompetensi teknis dan kompetensi manajerial yang mudah dipelajari karena sudah ada bahan maupun diklatnya. Jenis kompetensi sosialkultural meliputi agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip. Artinya sangat beragam sosialkultural di Indonesia yang menyulitkan membuat bahan maupun diklatnya. Langkah yang dapat dilakukan adalah membuat buku pedoman sosialkultural masing-masing wilayah berdasarkan pengalaman Pegawai Kemenkeu, untuk memudahkan pembuatannya dibuat oleh masing-masing kantor wilayah atau

sebaiknya terpusat di Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- BPS. (2011). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- DJP. (2015). *Laporan Tahunan 2014*. Jakarta: DJP.
- Hatu, R. (2011). *Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan*. INOVASI.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Kemenkeu. (2015). *Laporan Tahunan 2014*. Jakarta: Kemenkeu.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putu Deby Verayanti, M. N. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sosial Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013*. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI_Press.
- Utomo, T. W. (2015, September 24). LAN. Diambil kembali dari Inovasi: <http://inovasi.lan.go.id>
- UUD NRI Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 55/SJ/2008 Tentang Pelaksanaan Assessment Center Departemen Keuangan

Menjadi Account Representative yang Kompeten

Oleh:
Mohammad Djufri
- Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak -



Abstrak

Target penerimaan pajak yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) cukup besar. Semua sumber daya manusia yang dimiliki DJP diarahkan untuk mengamankan penerimaan, tidak terkecuali para Account Representative (AR) yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalan potensi. Para AR yang kompeten tentunya sangat dibutuhkan agar tanggung jawab yang diamanatkan dapat tercapai. Kompeten disini tidak saja mengasai pengetahuan dan keterampilan teknis perpajakan, tetapi juga sikap atau perilaku, pengalaman, keinginan (motif), watak dan pola pikir yang berorientasi kepada tujuan yang telah ditetapkan. Tulisan ini menggunakan metodologi deskriptif yang menjelaskan bagaimana strategi untuk menjadi AR yang kompeten tersebut. Hasil yang diperoleh adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh para AR yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalan potensi agar menjadi AR yang kompeten sesuai yang diharapkan DJP.

Keywords : Kompetensi, strategi, self assesment.

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak telah memberikan kontribusi cukup tinggi bagi negara. Setiap tahun, target penerimaan pajak terus meningkat, seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Dalam postur APBN 2017, pendapatan negara dipatok sebesar 1.750,3 trilyun, dimana 75% atau Rp. 1.307,6 trilyun bersumber dari penerimaan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak 2017 ini cukup ambisius, angka ini mengalami kenaikan sebesar 18% dari realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 1.105 trilyun.

Penerimaan pajak yang menjadi target Direktorat Jenderal Pajak ini diturunkan menjadi target Kantor Wilayah, selanjutnya diturunkan kembali menjadi target Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Target sebesar itu selanjutnya menjadi diturunkan menjadi target para *Account Representatif (AR)* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalan potensi (yang selanjutnya disebut AR Galpot), Fungsional Pemeriksa Pajak, AR Ekstensifikasi dan Juru Sita Pajak, dengan porsi target penerimaan AR Galpot yang paling besar diantara jabatan lain di atas, sehingga kinerja AR tersebut sangat menentukan tercapai tidaknya penerimaan KPP.

Peran AR Galpot sangatlah strategis. Untuk itu seorang AR Galpot dituntut harus memiliki dedikasi, kreatifitas dan kompetensi teknis perpajakan yang tinggi. Berbagai upaya dan strategi juga harus mampu dilakukan seorang AR Galpot khususnya dalam hal penggalan potensi penerimaan pajak, agar penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawabnya dapat tercapai.

Tinjauan Literatur

Hirsch and Stabler (1995) sebagaimana dikutip dalam *The European Group of Public Administration* (2002) menyebutkan bahwa kompetensi adalah

keterampilan, pengetahuan, pengalaman dan perilaku yang seseorang butuhkan untuk dapat melakukan pekerjaan secara efektif.

Dubois dan Rothman (2004) menyebutkan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki seseorang yang digunakan secara tepat dan konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa karakteristik dimaksud termasuk pengetahuan, keterampilan, sikap bawaan, keinginan (motif), watak, pola pikir, perasaan dan tindakan.

Dari definisi kompetensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki sumber daya manusia terbaik untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif dan membantu organisasi mencapai tujuannya. sumber daya manusia terbaik tersebut disebut sumber daya manusia yang kompeten.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian deskriptif (*Descriptive Research*). Sumanto (1990) berpendapat bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau penegasan dari suatu konsep atau gejala termasuk menjawab pertanyaan sehubungan subjek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Penerimaan pajak adalah hal yang begitu penting bagi negara, maka potensi penerimaan pajak sekecil apapun harus diamankan oleh petugas pajak, khususnya para AR Galpot. Dan mengingat bahwa pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assesment*, di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, maka peningkatan kepatuhan wajib pajak juga menjadi suatu hal yang sangat penting.

Dalam sistem *self assesment* ini, Petugas pajak (fiskus) hanya berperan dalam mengawasi kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya memegang peranan yang signifikan dalam rangka penerimaan pajak.

Dua hal di atas, yaitu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan penggalan potensi penerimaan pajak, harus menjadi concern seorang AR Galpot. Kemampuan teknis perpajakan mutlak diperlukan dalam pekerjaan ini. Apa jadinya jika dalam berargument terkait kewajiban perpajakan para AR Galpot kalah pintar dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak banyak memperkaya pengetahuan perpajakan dari berbagai sumber, karena memang Wajib Pajak membutuhkan pengetahuan perpajakan itu untuk menunjang bisnisnya.

Tetapi Kompetensi yang dibutuhkan para AR Galpot bukan hanya kemampuan, pengetahuan atau keterampilan teknis di bidang perpajakan, namun sebagaimana disebutkan di atas, sikap atau perilaku, pengalaman, keinginan (motif), watak, pola pikir, perasaan dan tindakan juga sangat dibutuhkan.

Tentunya untuk menjadi AR Galpot yang kompeten, dalam arti memiliki semua kompetensi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan, tidaklah mudah dan instant. Para AR Galpot pun harus mau untuk terus memperkaya dan mengasah kompetensi yang dibutuhkan. Di samping itu, para AR Galpot juga harus memiliki strategi dalam melaksanakan pekerjaannya agar tujuan atau tanggung jawab yang diamanatkan dapat tercapai.

Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh AR Galpot:

1. Pengawasan pembayaran masa dan pelaporan

Sesuai sistem *self assesment*, Wajib Pajak menyetor dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya

sendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan penyetoran dan pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 242/PMK.03/2014.

Atas keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak, atau atas keterlambatan pelaporan SPT atau tidak disampaikannya SPT, seorang AR Galpot selanjutnya harus secara rutin menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) sesuai Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

1. Pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data adalah kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber, yang berguna bagi penggalian potensi pajak. Data atau informasi yang dibutuhkan meliputi data terkait transaksi, data terkait harta/kepemilikan, data terkait tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak dan data lainnya yang berhubungan dengan Wajib Pajak.

Dalam pengumpulan data ini, AR Galpot dapat menggunakan sumber data yang berasal dari internal DJP sendiri maupun melalui sumber eksternal. Sebagaimana amanat Pasal 35A Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan terkait kewajiban penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain, sudah banyak data yang berhasil dihimpun oleh DJP, baik melalui Kantor Pusat DJP maupun oleh Kanwil. Data/informasi tersebut dapat dimanfaatkan AR untuk penggalian potensi pajak.

a. Pengumpulan data bersumber internal

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sudah banyak menyediakan data yang dapat dimanfaatkan oleh AR dalam menggali potensi

perpajakan. Data ini berasal dari pelaporan Wajib Pajak dan data dari Pihak Ketiga, dan telah tersaji dalam sistem informasi atau aplikasi yang telah disediakan DJP, seperti Portal DJP, Approweb, dan SIDJP. Kanwil masing-masing pun dropping data secara manual khususnya untuk data yang bersifat regional.

b. Pengumpulan data bersumber internet

Internet adalah dunia tanpa batas, banyak sekali sumber data dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Pencarian data/informasi dapat dilakukan melalui *search engine* yang dikenal dengan istilah *browsing* atau melalui akses ke situs-situs tertentu baik situs yang dimiliki Wajib Pajak sendiri ataupun situs-situs yang terkait dengan Wajib Pajak tersebut, seperti situs asosiasi tempat Wajib Pajak tergabung, situs *supplier* atau *costumer* dari Wajib Pajak tersebut, situs yang memuat perijinan.

2. Pengolahan data

Data yang berhasil dikumpulkan melalui proses pengumpulan data melalui sistem informasi, aplikasi dan data internal, serta data yang bersumber dari internet selanjutnya dilakukan pengolahan data.

Pengolahan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai *software*, dari yang sederhana hingga penggunaan *tools* yang canggih dan berbayar. Namun pengolahan sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel pun cukup *powerfull* dan dapat diandalkan.

Microsoft Excel bukanlah suatu hal yang asing di kalangan masyarakat saat ini. Penggunaannya pun begitu

meluas, sehingga tidak heran jika Excel dikenal sebagai *tools* dalam pengolahan data yang cukup diandalkan, khususnya untuk data yang memiliki kapasitas tidak begitu besar. Banyak fungsi yang dapat digunakan dalam pengolahan data, namun cukup lah menggunakan fungsi Microsoft Excel yang sederhana dan paling sering dipakai dalam pengolahan data, yaitu fungsi *VlookUp* dan *Pivot Table*.

3. Tindak lanjut

Data yang telah diolah akan menjadi potensi sementara. Kemampuan analisis yang kuat terhadap data ini perlu dimiliki para AR Galpot, untuk memperoleh potensi yang benar-benar dapat direalisasikan, bukan hanya potensi lemah yang dapat dengan mudah dibantah wajib pajak. Perlu terus diasah kemampuan analisis ini sehingga para AR Galpot dapat segera mengetahui titik kritis kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dilaksanakan dengan benar.

Langkah selanjutnya terhadap potensi sementara tersebut dicocokkan (*matching*) dengan SPT terkait. Apabila data potensi sementara tersebut ternyata telah dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak, maka potensi sementara tersebut menjadi gugur. Namun apabila ternyata belum dilaporkan atau dilaporkan sebagian dalam SPT Wajib Pajak, maka potensi sementara tersebut akan berubah menjadi potensi tetap.

Atas potensi tetap ini, secara administratif ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK). Ada tiga hal terkait tindak lanjut SP2DK ini, (1) Wajib Pajak tidak merespon, (2) Wajib Pajak merespon dan atas penjelasan Wajib Pajak dapat diterima oleh AR. (3) Wajib Pajak merespon namun penjelasan Wajib Pajak tidak dapat

dapat diterima oleh AR. Tindaklanjut SP2DK dapat berupa advisory visit ke tempat Wajib Pajak untuk memastikan proses bisnis Wajib Pajak atau berupa mengirimkan undangan kepada Wajib Pajak untuk dilakukan konseling.

4. Sentuh hati Wajib Pajak

Dalam melakukan konseling, selain para AR Galpot terus memperkuat kompetensi teknis perpajakannya, juga memperkuat *communication skills*-nya. Melakukan konseling ibarat seni yang mampu mengekspresikan informasi kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak mudah menerima informasi yang disampaikan dan tidak ada unsur keterpaksaan sebaliknya diperoleh kesenangan untuk menerima informasi tersebut.

Disadari bahwa pada dasarnya Wajib Pajak tidak ikhlas untuk membayar pajak. Hal ini sejalan dengan definisi pajak, yaitu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Berbicara terkait pajak dengan AR Galpot, tentunya bukan perkara yang menyenangkan, namun hendaknya para AR Galpot dapat mengupayakan untuk menyentuh sisi hati Wajib Pajak bersangkutan bukan menakut-nakutinya.

Walaupun sudah memiliki sifat memaksa yang kuat didukung dengan sanksi yang berat, ternyata masyarakat masih tetap enggan membayar pajak. Ini terbukti dari tidak tercapainya rencana penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir, banyaknya kasus penggelapan pajak, banyaknya kasus penyelundupan untuk menghindari pajak, seruan untuk boikot pajak dan berbagai kasus perpajakan lainnya.

Saat ini masyarakat sudah sangat

kritis, menakut-nakuti dengan ancaman sanksi sudah bukan jamannya lagi. Masyarakat perlu disentuh hatinya, dengan memberi pemahaman bahwa membayar pajak adalah bentuk amal shaleh yang akan mendapat pahala dari Allah SWT nantinya. Sebagaimana Mas'udi, 2005, dalam bukunya berpesan "untuk wajib pajak, bayarlah pajak anda dengan niat zakat (sedekah karena Allah SWT) dan anda berhak mendapatkan pahalanya". Dengan niat ikhlas sedekah karena Allah SWT diharapkan akan timbul keikhlasan dalam diri Wajib Pajak untuk membayar pajak sebagai bentuk amal shaleh kepada seluruh penduduk di Indonesia.

Dengan terus menerus melakukan strategi di atas dan mengasah terus kemampuan dan keterampilan teknis perpajakannya, diharapkan pengalaman AR Galpot bertambah, keinginan (motif) untuk mencapai tujuan lebih bergairah, watak dan pola pikir yang berorientasi terhadap tujuan lebih terbentuk kuat. Lambat laun kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi AR Galpot yang berkompeten dapat diperoleh.

Penutup

AR Galpot memiliki posisi strategis di suatu KPP, karena peran dan tanggung jawab yang sangat besar bagi penerimaan pajak. Dengan begitu besarnya tanggung jawab yang diemban AR Galpot, maka seorang AR Galpot harus memiliki kompetensi yang mumpuni. Kompetensi yang mumpuni ditunjukkan dari kemampuan dan keterampilan teknis perpajakan yang baik, pengalaman yang banyak, motif untuk mencapai tujuan dalam gairah tinggi, watak dan perilaku yang berorientasi kepada tujuan yang hendak dicapai, yaitu menghimpun penerimaan pajak sesuai yang telah diamanatkan.

Sehingga nantinya para AR Galpot tidak cukup hanya melakukan hal-hal yang rutin saja, namun memiliki terobosan

dalam menggali potensi pajak pada Wajib Pajak dibawah pengawasannya, agar penerimaan pajak yang ditargetkan dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Dubois, David D., and Rothwell, William J., 2004, *Competency-Based Human Resource Management*, 1st Edition, Davies-Black Publishing Mountain View, California.
- Hutagaol, John. 2006. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 5, Nomor 6.
- Mas'udi, Masdar Farid, 2005, "Pajak itu Zakat : Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat", Penerbit Mizan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
- Sumanto, 1990, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Andi Offset.
- The European Group of Public Administration, 2002, *Competency Management in the Public Sector European Variations on a Theme*, EGPA Monograph, IOS Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- www.beritasatu.com/ekonomi/407386-sri-mulyani-dinilai-berhasil-genjot-penerimaan-pajak.html diakses tanggal 19 Mei 2017
- www.kemenkeu.go.id/apbn2017 diakses tanggal 19 Mei 2017.

E-Rekon-LK Aplikasi Terobosan untuk Rekonsiliasi SAI-SiAP dan Konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Kementerian dan Lembaga

Oleh:

Widhayat Rudhi Windarta

Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
dan

Muhammad Syaifuddin Luthfi

Kepala Seksi Perencanaan dan Analisa Sistem Aplikasi Ditjen Perbendaharaan

Abstrak

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sistem tersebut diberi nama Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan Kementerian Negara/Lembaga (KL). Perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan Sistem Akuntansi Instansi adalah aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). SAIBA dioperasikan secara berjenjang oleh UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA. Perekaman data dilakukan di satker, kemudian data di rekonsiliasi dengan KPPN. Setelah itu data dikirimkan berjenjang ke UAPPA-W s.d. UAPA. Pengiriman tersebut dapat menyebabkan data menjadi berbeda disamping memakan waktu dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat wilayah s.d. K/L. Proses pengiriman juga menyebabkan monitoring tidak dapat dilakukan dengan cepat. Aplikasi e-Rekon-LK digunakan untuk mengkonsolidasi data seluruh satker, untuk rekonsiliasi antara satker dengan data KPPN. Data valid hasil rekonsiliasi digunakan untuk penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah s.d. tingkat K/L. Penggunaan data dengan single database pada e-Rekon-LK menyebabkan tidak diperlukan lagi rekonsiliasi tingkat wilayah s.d. tingkat K/L. Laporan Keuangan tingkat wilayah s.d. K/L dapat diproduksi oleh e-Rekon-LK. Perbedaan data satker dengan unit akuntansi di atasnya dapat diatasi, dan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat. Monitoring satker juga dapat dilakukan dengan cepat pada aplikasi e-Rekon-LK.

I. Pendahuluan

Pemerintah pusat mempunyai 24 ribu (pada tahun anggaran 2016 menerbitkan DIPA sebanyak 23.610 satker dan 3900-an satker yang masih mempunyai saldo neraca walaupun tidak menerima DIPA) lebih satuan kerja. Hal ini membutuhkan sistem akuntansi yang memadai untuk menyusun laporan keuangannya. Salah satu perangkat yang mendukung pelaksanaan sistem akuntansi adalah perangkat lunak komputer atau aplikasi komputer. Aplikasi yang digunakan saat ini adalah Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Unit Akuntansi mulai dari satker sampai dengan Kementerian Negara/Lembaga menggunakan SAIBA. Sehingga ada aplikasi SAIBA tingkat satker sampai dengan tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Data SAIBA satker setiap bulan direkonsiliasi dengan KPPN untuk validasi data. Rekonsiliasi ini juga dilakukan pada tingkat wilayah sampai dengan Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SAIBA telah berhasil mengantarkan sebagian besar laporan keuangan K/L mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2015.

Disamping keberhasilannya, SAIBA menyisakan sedikit masalah dalam implementasinya. Aplikasi e-Rekon-LK didesain memberi solusi atas masalah yang masih tersisa dalam SAIBA.

II. Selayang Pandang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

a. Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum perlu disajikan untuk memahami bahwa pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat mempunyai payung hukum yang kuat dan jelas. Undang-undang nomor 1 tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, serta menyajikan informasi keuangan negara (Pasal 7, ayat 2, huruf o dan p). Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011. Kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, dan diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat menyebutkan bahwa PMK mengatur mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (pasal 2).

b. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri atas Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk memproses transaksi keuangan atau barang yang dikelola oleh BUN. Sedangkan SAI dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Berikut ini adalah hirarki SAPP:

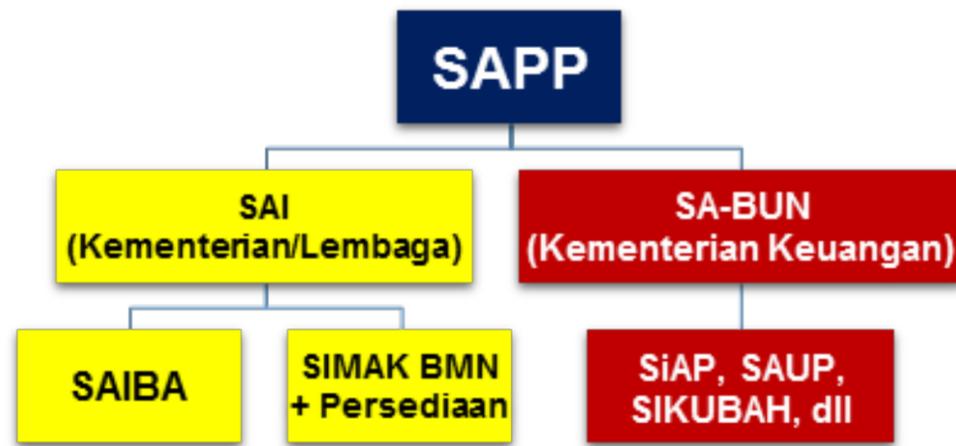
SABUN meliputi:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP)

2. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP)
3. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH)
4. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP)
5. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penerusan Pinjaman (SAPPP)
6. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SATD)
7. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS)
8. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL)
9. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL)
10. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK)

SiAP dilaksanakan oleh BUN sebagai pengelola kas. SiAP dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

1. KPPN selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat KPPN (UAKBUN-Daerah), kecuali KPPN Khusus Investasi.
2. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Kanwil).



Gambar 1 Skema SAPP

Sumber: Bahan Tayang Diklat Akuntansi Akrual dengan modifikasi

1. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat Pusat (UAKBUN-Pusat).
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN Akuntansi dan Pelaporan (UAPBUN AP)

Sedangkan SAI dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja sampai tingkat Kementerian Negara/Lembaga termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/ Dana Tugas Pembantuan/ Dana Urusan Bersama. SAI meliputi (1) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, (2) Akuntansi dan Pelaporan BMN. Digunakan untuk memproses data transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan SAI, Kementerian Negara/Lembaga membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai berikut:

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran (UAKPA).

2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), dikecualikan untuk SKPD yang mengelola Dana Dekonsentrasi/ Dana Tugas Pembantuan/ Dana Urusan Bersama.
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1).
4. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

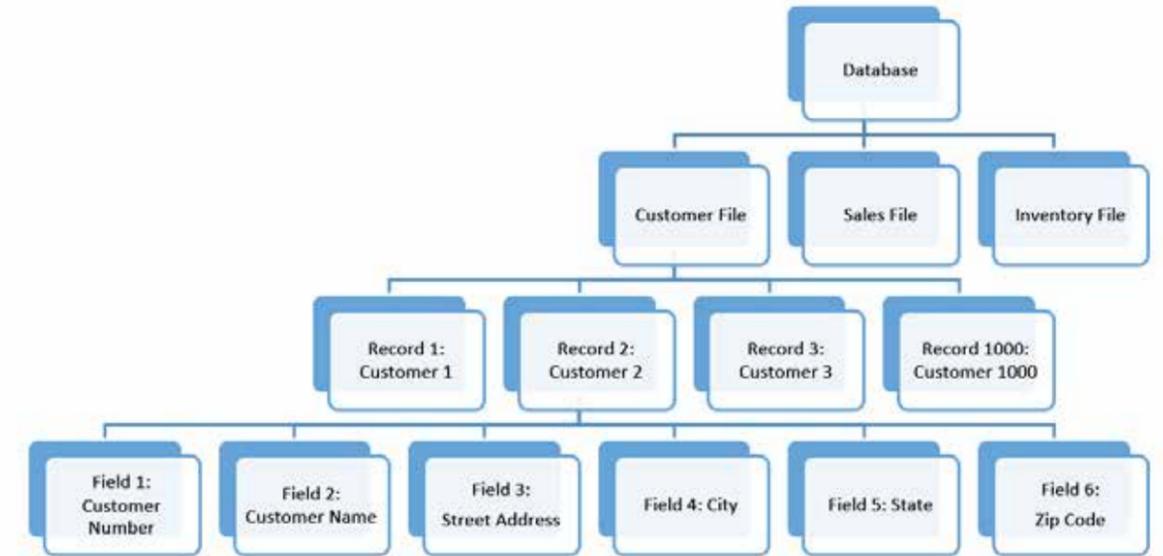
Laporan Keuangan yang dihasilkan UAKPA adalah (a) LRA, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (d) Neraca. Laporan Keuangan tersebut beserta Arsip Data Komputer (ADK) disampaikan kepada KPPN setiap bulan dan kepada UAPPA-W setiap bulan, semester I dan tahunan. Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan disertai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan satker dikonsolidasi berjenjang ke tingkat wilayah, eselon 1 dan tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan dilakukan rekonsiliasi untuk

meyakinkan keandalan data. Rekonsiliasi tersebut meliputi (a) rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang pada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, (b) rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan bendahara pengeluaran/ bendahara penerimaan Satker, (c) rekonsiliasi pelaporan keuangan antara Pengguna Anggaran dengan BUN, dan (d) Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang. Rekonsiliasi antara Pengguna Anggaran dan BUN dilakukan secara berjenjang, dimulai dari satuan kerja K/L dengan KPPN sampai dengan K/L dengan BUN. Secara sistem, rekonsiliasi antara Pengguna Anggaran dengan BUN adalah rekonsiliasi antara data SAI dan SiAP.

I. Beberapa Permasalahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Pada saat ini, aplikasi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan pada SAI adalah Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). SAIBA dibangun untuk masing-masing unit akuntansi, sehingga ada SAIBA satker, SAIBA Wilayah,



Gambar 2 Elemen Dasar dari Hirarki Data

Sumber: Romney, hal.107

SAIBA Eselon I, dan SAIBA K/L. SAIBA menggunakan *stand-alone database*. Database dan aplikasi menjadi satu pada tiap unit akuntansi dan tidak tergabung dengan database unit akuntansi di atasnya. Karena databasenya *stand alone*, maka diperlukan pengiriman data secara periodik dari unit akuntansi satker ke tingkat wilayah dan seterusnya untuk penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah sampai dengan K/L. Periode pengiriman data yaitu bulanan, semester I dan tahunan. Pengiriman data yang disebut Arsip Data Komputer (ADK) bersamaan dengan pengiriman Laporan Keuangan.

Aplikasi SAIBA memberikan hak perekaman transaksi hanya dilakukan di satker. Sementara itu, unit akuntansi tingkat wilayah, eselon 1 dan K/L tugasnya adalah melakukan kompilasi laporan keuangan dari unit akuntansi di bawahnya. Data yang dikirimkan oleh satuan kerja ke unit akuntansi wilayah adalah data yang sudah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Sehingga secara umum data yang terekam sudah valid.

Satuan kerja pemerintah pusat berjumlah 24 ribu lebih. Konsolidasi

laporan keuangan satker menjadi laporan K/L merupakan tugas yang tidak ringan. Proses konsolidasi laporan keuangan tersebut memunculkan permasalahan yaitu perbedaan data antara satker sebagai pengirim, dengan data tingkat wilayah, eselon 1 dan K/L sebagai penerima data. Selain itu, proses konsolidasi memakan waktu dan biaya karena harus datang dan bertatap muka, serta monitoring proses konsolidasi laporan keuangan tidak dapat dilakukan dengan cepat. Aplikasi e-Rekon berupaya menyelesaikan perbedaan data, mempercepat proses konsolidasi dan memberikan sarana monitoring yang cepat.

II. Konsep Database

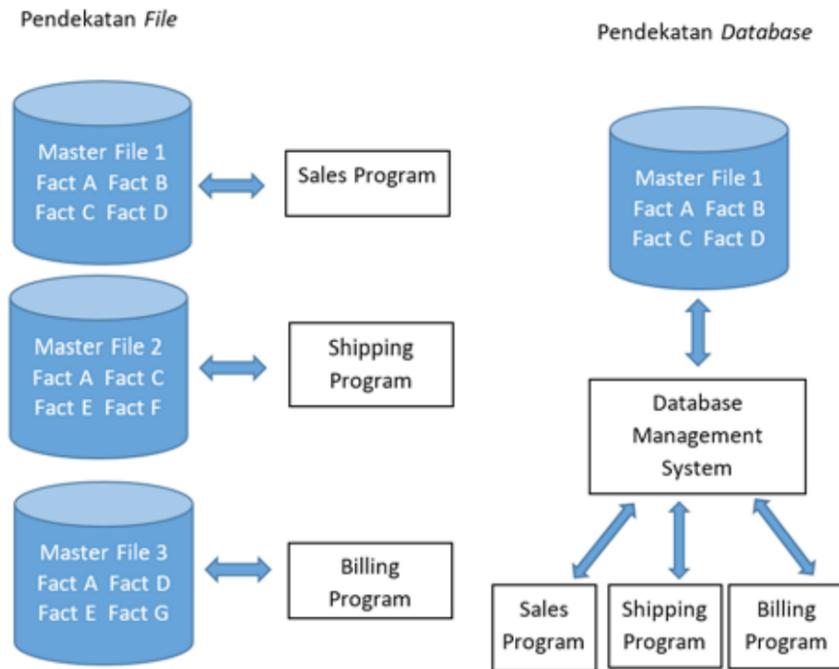
Romney (2012; hal.107) menyatakan bahwa untuk memahami keunggulan database, sangat penting untuk memahami cara data disimpan dalam sistem komputer. Informasi tentang atribut pelanggan antara lain nama dan alamat disimpan dalam *field*. Semua field yang berisi data satu pelanggan disebut *record*. Seluruh *record* pelanggan membentuk satu file. Satu kelompok file yang berhubungan dan terkoordinasi

membentuk satu database. Penjelasan tersebut diilustrasikan dalam gambar 2.

Romney (hal.108) juga menjelaskan sistem penyimpanan data dengan pendekatan sistem *file* dan pendekatan *database*. Pada pendekatan sistem *file*, pemutakhiran data pada salah satu master file tidak otomatis diikuti pemutakhiran pada *master file* yang lain. Sehingga data dapat menjadi tidak sinkron jika ada *master file* yang belum dimutakhirkan. Sedangkan pada pendekatan *database*, pemutakhiran data cukup satu kali pada satu *master file*, sehingga tidak muncul masalah seperti pada pendekatan *file*.

Pendekatan database terdapat *Database Management System (DBMS)* yaitu program antar muka yang menghubungkan database dengan program aplikasi.

Stand-alone database pada SAIBA mirip dengan penyimpanan berdasarkan pendekatan sistem *file*. Perekaman hanya dilakukan pada SAIBA satker, dan untuk memutakhirkan data di SAIBA Wilayah s.d. SAIBA K/L perlu dilakukan pengiriman ADK dari satker secara berjenjang. SAIBA Wilayah menerima ADK dari SAIBA satker, SAIBA Eselon-1



Gambar 3 Pendekatan File versus Pendekatan Database

Sumber: Romney, hal. 108

pergantian tanggal, bahwa pengolahan pukul 24.00 berarti data masih diolah pada hari yang sama. Apabila dilakukan unggah ulang, maka data lama akan ditimpa dengan data baru. Berdasarkan data yang diunggah, aplikasi e-Rekon-LK dapat memproduksi informasi tentang perekaman transaksi yang tidak normal. Informasi tersebut sebagai peringatan agar transaksi terkait ditelaah kebenaran proses perekamannya.

b. Solusi yang diberikan aplikasi e-Rekon-LK

Beberapa permasalahan yang muncul dalam konsolidasi laporan keuangan adalah (1) proses rekonsiliasi antara Satker dengan KPPN harus dilakukan dengan tatap muka (2) integritas data karena ada perbedaan sebagian data antara SAIBA satker s.d. K/L, (3) proses konsolidasi yang memakan waktu dan biaya, dan (4) monitoring dan pelaksanaan rekonsiliasi dan perekaman data akuntansi yang kurang maksimal. E-Rekon-LK yang berbasis web dapat menyelesaikan permasalahan pertama, karena satker dapat mengerjakan rekonsiliasi dari kantor masing-masing, tidak perlu datang ke KPPN. Hal ini juga mengurangi biaya perjalanan ke KPPN untuk melakukan rekonsiliasi. Permasalahan kedua yaitu integritas data karena ada perbedaan sebagian data antara SAIBA satker s.d. K/L dapat diselesaikan/dikurangi dengan aplikasi e-Rekon-LK. Data SAIBA satker diunggah di aplikasi e-Rekon-LK untuk dilakukan rekonsiliasi dengan data KPPN yang berasal dari SPAN. Setelah disetujui KPPN maka data satker disimpan di aplikasi e-Rekon-LK. Data satker diolah menjadi laporan keuangan tingkat satker, wilayah, eselon 1 dan K/L pada malam hari. Keesokan harinya UAPPAAW,

UAPPAAE-1 dan UAPA sudah dapat mencetak laporan keuangannya. Karena tidak ada lagi pengiriman dari satker ke wilayah, dari wilayah ke eselon 1, dan dari eselon 1 ke K/L, maka permasalahan perbedaan data antar unit akuntansi di SAI tidak ada lagi. Proses ini sekaligus menyelesaikan permasalahan ketiga yaitu mempercepat proses konsolidasi laporan keuangan pada tingkat wilayah, eselon 1, dan K/L. Konsolidasi menjadi lebih cepat karena tidak perlu lagi proses kirim data ke unit akuntansi di atasnya, kemudian proses terima di unit akuntansi terkait, tidak perlu lagi memvalidasi data kiriman satker karena sudah direkonsiliasi dengan KPPN, dan tidak ada lagi aktivitas perbaikan data berupa pengulangan proses kirim dan terima data.

Permasalahan keempat yaitu monitoring, dapat dilakukan dengan lebih cepat. Karena aplikasi e-Rekon-LK memberikan informasi awal atas perekaman yang tidak normal. Atas transaksi tidak normal dilakukan penelaahan dan koreksi bila diperlukan. Sisa sebagian langkah telaah yang informasinya tidak disediakan aplikasi e-Rekon-LK dapat dilakukan oleh petugas terkait. Monitoring data satker dapat dilakukan setiap hari.

c. Hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan e-Rekon-LK

Hambatan dalam implementasi e-Rekon-LK lebih tepat jika disebut sebagai tantangan dalam memberikan layanan kepada pada *stakeholders*. Beberapa tantangan e-Rekon-LK adalah:

i. Keterbatasan infrastruktur

E-Rekon-LK dioperasikan pada kondisi dukungan infrastruktur yang relatif minimal. Sehingga pada awal operasional, kurang

lebih 3 bulan pertama, sempat beberapa kali mengalami gagal-akses oleh pengguna (*down*). Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan beberapa kali peningkatan (*scale up*) infrastruktur dan optimalisasi proses pada sisi database dan aplikasi. Hasilnya adalah kondisi terkini e-Rekon-LK sudah cukup stabil. Namun demikian penambahan beberapa fitur e-Rekon-LK untuk sementara ditunda, sampai ada dukungan infrastruktur yang memadai. Tahun 2017, aplikasi e-Rekon-LK dimigrasi ke infrastruktur yang baru dengan kapasitas yang lebih besar. Sekaligus untuk mengantisipasi pertumbuhan data yang semakin besar.

ii. Keterlambatan pengiriman (*push*) data dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Pemrosesan data Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) di SPAN membutuhkan beberapa tahapan yang pada umumnya sudah dijadwalkan secara otomatis pada jam-jam tertentu. Secara umum data SiAP, terutama data penerimaan yang berasal dari Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2), diterima e-Rekon-LK pada H+2. Pada kondisi jumlah transaksi penerimaan mencapai puncak, data diterima dapat melebihi H+2. Kondisi ini menyebabkan proses rekonsiliasi tidak dapat dimulai langsung pada H+1 setelah akhir bulan, karena adanya potensi data SiAP yang belum dikirim ke e-Rekon-LK.

iii. Transaksi koreksi belanja melalui General Ledger (GL) SPAN

Proses pengiriman data koreksi belanja yang diekskusi melalui modul GL SPAN harus dilakukan pemilahan. Karena ada transaksi pengembalian belanja yang memulihkan pagu yang tidak direkonsiliasi. Kondisi ini menimbulkan kesulitan tersendiri,

karena belum dapat diproses secara otomatis oleh sistem, dan harus dilakukan secara manual. Hal ini terjadi, disebabkan oleh perbedaan perlakuan antara SAIBA dan SPAN. Pada SPAN, transaksi pengembalian belanja yang memulihkan pagu termasuk transaksi keuangan yang di jurnal, namun tidak demikian pada saiba. Solusi atas hal ini adalah pada SAIBA 2017, transaksi tersebut akan diproses di SAIBA sehingga terdapat kesamaan perlakuan, dan proses pengiriman data dapat dilakukan secara otomatis tanpa harus melakukan pemilahan data yang dikirimkan SPAN ke e-Rekon-LK.

iv. Rekonsiliasi transaksi kas di Bendahara Pengeluaran

Proses rekonsiliasi kas di Bendahara Pengeluaran, terutama untuk kas di Bendahara Pengeluaran dalam bentuk valuta asing (*valas*) dan adanya sebagian kas di Bendahara Pengeluaran yang statusnya dipinjam untuk satuan kerja perwakilan Negara Republik Indonesia di Luar Negeri, membutuhkan perlakuan yang tepat. Untuk kas di Bendahara Pengeluaran dalam bentuk *valas*, secara akuntansi dapat terselesaikan secara periodik dengan menerapkan revaluasi atas aset menoter sesuai PSAP. Sedangkan proses rekonsiliasi atas kas di Bendahara Pengeluaran yang dipinjam masih dalam kajian. Usulannya adalah akun yang menampung saldo pinjaman dari kas di Bendahara Pengeluaran harus spesifik sehingga dapat diperhitungkan dalam proses rekonsiliasi. Secara total kas di Bendahara Pengeluaran akan sama walaupun rincian per akunnya dapat berbeda.

v. Rekonsiliasi transaksi kas Badan Layanan Umum (BLU)

Rekonsiliasi kas BLU dalam

menerima ADK dari SAIBA Wilayah dan SAIBA K/L menerima ADK dari SAIBA Eselon-1.

I. e-Rekon-LK

a. Cara kerja E-Rekon-LK

Pada saat rekonsiliasi bulanan, semua data SAIBA dikirimkan ke aplikasi e-Rekon-LK. Data yang dikirimkan adalah jurnal seluruh transaksi bulan Januari s.d. bulan berjalan. Saldo awal dikirimkan terpisah dari level KL sesuai LK *Audited* tahun awal implementasi e-Rekon-LK. Data satker tersebut digunakan untuk rekonsiliasi dengan KPPN. Karena seluruh data satker sudah dikirimkan ke aplikasi e-Rekon-LK, maka seluruh laporan keuangan yang dihasilkan SAIBA tingkat wilayah s.d. K/L dapat diproduksi melalui aplikasi e-Rekon-LK. Penggunaan aplikasi e-Rekon-LK menyebabkan tidak diperlukan lagi

rekonsiliasi aplikasi SAIBA tingkat wilayah s.d. K/L karena sudah dilakukan rekonsiliasi pada tingkat satker. Aplikasi e-Rekon-LK dapat diakses oleh satker melalui internet menggunakan *username* dan *password* yang diberikan oleh KPPN.

Untuk meringankan beban *server* e-Rekon-LK dalam mengolah data, maka diatur waktu antara menerima data SAIBA satker dan pengolahannya menjadi laporan keuangan tingkat wilayah s.d. K/L. Laporan keuangan dapat cetak keesokan harinya setelah data satker diunggah ke aplikasi e-Rekon-LK. Proses pencetakan laporan keuangan dengan jeda satu hari dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja infrastruktur yang masih terbatas. Namun demikian, proses pencetakan laporan keuangan dapat ditingkatkan frekuensinya secara terjadwal sehingga lebih mutakhir. Pengolahan data dilakukan malam hari pukul 24.00, ketika server tidak sibuk melayani unggah data. Hal ini sekaligus mempertimbangkan batas *cut off*

banyak kasus menunjukkan hasil rekonsiliasi yang berbeda, karena ada kas BLU yang diinvestasikan. Satuan kerja melakukan reklasifikasi sedangkan SiAP tidak melakukan reklasifikasi. Solusi atas hal ini masih dalam proses kajian dengan beberapa alternatif:

- 1) SiAP membukukan transaksi reklasifikasi sebagaimana dilakukan oleh satuan kerja.
- 2) Ruang lingkup akun rekonsiliasi kas BLU diperluas termasuk akun-akun investasi yang berasal dari kas BLU
- i. Frekuensi *Online Analytical Process* (OLAP) hanya 1 kali dalam sehari

Secara sederhana OLAP dapat dimaknai sebagai pengolahan data yang dikirimkan ke e-Rekon-LK. Frekuensi OLAP yang hanya dilakukan setiap pukul 24.00 berdampak pada para pengguna, yaitu perlu bersabar menunggu hasil dan dampak perubahannya pada LK atas data yang diupload pada H+1. Dalam kondisi kritis, misalnya kondisi tenggat waktu, seringkali satuan kerja atau K/L meminta OLAP dijalankan diluar jadwal. Jika hal ini dipenuhi secara bersamaan akan mengganggu pengguna yang lain. Untuk e-Rekon-LK 2017, seiring dengan penambahan kapasitas infrastruktur, OLAP e-Rekon-LK akan dibuat dalam 2 OLAP yang akan melakukan proses secara bergantian. Sehingga memungkinkan data laporan keuangan akan te-refresh setiap 2 jam.

- ii. Keterbatasan fitur-fitur yang mendukung analisa dan telaah LK

Fitur-fitur yang mendukung analisa dan telaah LK masih terbatas karena sebagian fitur-fitur belum diaktifkan untuk menyesuaikan infrastruktur yang juga masih terbatas. Dengan adanya penambahan kapasitas

infrastruktur, fitur-fitur yang mendukung analisa dan telaah LK memungkinkan untuk diperkaya sehingga dapat membantu *stakeholders* dalam melakukan analisa dan telaah kuantitatif LK.

- iii. Pemanfaatan fitur-fitur e-Rekon-LK yang belum optimal

Fitur-fitur e-Rekon-LK yang sudah aktif, belum dimanfaatkan secara optimal terutama oleh level *user konsolidator*. Hal ini tampak dari pemantauan data yang terindikasi bermasalah, masih ada yang terlambat diselesaikan dan masih terpampang di e-Rekon-LK. Untuk dapat memanfaatkan fitur-fitur e-Rekon-LK secara optimal, perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam bentuk pelatihan-pelatihan dengan pendekatan yang aplikatif.

- a. Rencana pengembangan e-Rekon-LK

Peranan e-Rekon-LK pada versi-versi selanjutnya adalah mengidentifikasi transaksi transfer keluar dan transfer masuk baik antar satker dalam satu K/L, maupun antar satker antar K/L. Fitur ini hanya memungkinkan dilakukan dengan kondisi database terpusat. Dengan menambahkan satuan kerja intraco pada setiap transaksi transfer keluar dan transfer masuk pada aplikasi Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA maka e-Rekon-LK memungkinkan untuk melakukan rekonsiliasi atau penelusuran adanya indikasi transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TKTM) yang tidak berpasangan.

Selain TKTM, rencana pengembangan e-Rekon-LK adalah mengintegrasikan data SIMAK BMN ke dalam e-Rekon-LK. Hal ini akan memudahkan pelaksanaan, monitoring dan tindaklanjut rekonsiliasi internal antara data BMN di neraca dengan data

BMN di data aset. Sehingga validitas dan realibilitas data BMN di level transaksi dengan data GL menjadi lebih baik.

- b. Kelemahan dalam LK yang ditemukan sebelumnya dan diperbaiki di 2016 sehingga bisa WTP

Tiga hal yang menjadi sorotan BPK dalam LK 2016 adalah (1) tindaklanjut atas penyelesaian Saldo Anggaran Lebih (SAL), (2) penyelesaian data suspen dan (3) implementasi PSAP 13 terkait akuntansi BLU. Penyelesaian data suspen akan terkait langsung dengan penyelesaian SAL. Penyelesaian data suspen inilah yang diperankan oleh e-Rekon-LK. E-Rekon-LK hanya melakukan proses rekonsiliasi dan identifikasi data suspen per satker per jenis rekonsiliasi sampai detil. Data suspen 2016 memang masih ada, namun tidak signifikan. Walaupun demikian tetap akan menjadi perhatian untuk diperbaiki sehingga benar-benar suspen mencapai nol. Dibandingkan dengan data suspen LK tahun anggaran sebelumnya, yaitu suspen-suspen tahun anggaran sebelumnya hanya diketahui nilai total dan netto serta tanpa dapat dirinci satker-satker mana yang menyumbang suspen. Pada e-Rekon-LK nilai suspen dapat dirinci sampai dengan unit terkecil penyumbang suspen. Dan memungkinkan pula untuk ditelusuri sampai dengan level akun dengan melihat data Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) masing-masing satker.

Jadi ada dua hal yang diperbaiki, yaitu upaya meminimalkan nilai suspen dan ketersediaan dukungan dalam melakukan penelusuran atas terjadinya suspen. Ketersediaan dukungan dalam melakukan penelusuran atas terjadinya suspen dalam bentuk monitoring suspen akan sangat membantu dalam upaya menekan nilai suspen. Selain hal diatas, dalam konteks suspen, pada LK tahun anggaran sebelumnya hanya mengacu pada suspen belanja netto. Sedangkan dalam e-Rekon-LK semua suspen dan

jenis rekonsiliasi baik netto maupun bruto. Termasuk selisih kas dapat termonitor dan teridentifikasi untuk dapat ditindaklanjuti secara lebih khusus. Adapun implementasi PSAP 13 untuk sementara ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya dukungan sistem yang memadai.

Perbaikan lain dalam e-Rekon-LK adalah proses rekonsiliasi data pajak dan bea cukai. Walaupun masih menggunakan pendekatan rekonsiliasi bawah (total penerimaan), dengan implementasi MPN G2, rekonsiliasi tersebut dapat dilakukan secara jauh lebih baik. Sehingga data pajak dan bea cukai yang dibukukan pada SAIBA menjadi lebih akurat. Adapun monitoring suspen data pajak dan bea cukai selanjutnya tetap dapat dilakukan di e-Rekon-LK.

- c. Sumbangan e-Rekon-LK dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Penyatuan data pada e-Rekon-LK menyebabkan kualitas dan integritas data menjadi lebih baik. Tidak terjadi lagi data *hardcopy* beda dengan *softcopy* karena semua laporan dicetak dari satu data yang sama. Misalnya laporan entitas tingkat wilayah dan eselon 1 yang sebelumnya masih memungkinkan berbeda dengan data yang dikonsolidasi oleh KL karena *database* yang terpisah-pisah. Selain itu, konsistensi dan kesinambungan data akan lebih terjamin dengan adanya penyatuan *database*.

Manfaat lain yang ingin dihadirkan oleh e-Rekon-LK adalah kemudahan dalam melakukan monitoring, baik monitoring LK maupun monitoring atas pelaksanaan dan hasil rekonsiliasi. e-Rekon-LK memudahkan untuk mendapatkan informasi mengenai data yang tidak normal untuk ditindaklanjuti secara khusus. e-Rekon-LK juga memudahkan pengawasan dalam proses rekonsiliasi dan hasilnya sehingga sangat membantu dalam upaya menekan

suspen.

Aplikasi e-Rekon-LK yang berbasis web dan data terpusat memberikan kemudahan akses data bagi para *stakeholders*. Sehingga proses monitoring dapat dilakukan oleh semua pihak yang terkait dan dari berbagai level pengguna sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Proses audit dan *monitoring* atas koreksian yang dilakukan, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi auditor pun dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini difasilitasi fitur monitoring data posisi *unaudited* dan *audited*.

I. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-Rekon-LK memberikan terobosan dalam rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan tingkat K/L. Rekonsiliasi yang sebelumnya dilakukan untuk setiap unit akuntansi dari satker s.d. K/L, sekarang cukup dilakukan di tingkat satker. Rekonsiliasi dapat dilakukan dari kantor satker, sehingga dapat mengurangi biaya perjalanan dan menghemat waktu kerja. Integritas data juga menjadi lebih baik karena perbedaan data antara unit akuntansi satker dan unit akuntansi diatasnya tidak ada lagi atau perbedaan data antara satker dan KPPN dapat diselesaikan lebih cepat. Proses konsolidasi laporan keuangan K/L juga menjadi lebih cepat.

Monitoring dan pelaksanaan rekonsiliasi menjadi lebih baik karena aplikasi e-Rekon-LK memberikan informasi transaksi tidak normal untuk ditelaah. Monitoring juga cepat, dapat dilakukan tiap hari, karena data satker terkumpul dalam satu *database* yang dapat diakses oleh seluruh tingkatan unit akuntansi pada K/L.

E-Rekon-LK memberikan sumbangan secara signifikan dalam mengurangi data suspen pada laporan

keuangan. Beberapa kelemahan e-Rekon-LK masih ada. Hal ini menjadi tantangan untuk pengembangan selanjutnya.

Referensi

- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Romney, Marshall B.; Paul J. Steinbart; Accounting Information System; Pearson; Essex-England; 2012.
- Bahan-bahan FGD Materi Diklat Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga; 2017.
- Bahan-bahan Lokakarya Pengajar Diklat Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga; 2017.

Optimisme Mewujudkan Konektivitas Nusantara di Tengah Keterbatasan Ruang Fiskal Negara

Oleh: Apri Prayoga Arrfah
Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstrak

Infrastruktur transportasi memegang peran vital dalam mobilitas barang dan jasa yang berpengaruh pada kondisi perekonomian suatu negara. Sayangnya, perekonomian Indonesia yang terus menunjukkan tren positif belum mampu ditunjang oleh keberadaan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Kondisi ini berimplikasi pada tingginya biaya logistik barang yang selanjutnya mengurangi efisiensi bagi kegiatan usaha hingga akhirnya secara agregat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Kurangnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur disinyalir menjadi penyebab rendahnya daya saing infrastruktur Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari anggaran infrastruktur yang dialokasikan pemerintah setiap tahunnya yang berada dalam angka dan presentase yang kurang proporsional.

Tulisan ini mencoba mengidentifikasi permasalahan dalam pembangunan infrastruktur untuk selanjutnya menganalisis strategi yang dapat diterapkan pemerintah guna memenuhi pembiayaan infrastruktur di tengah keterbatasan ruang fiskal APBN.

Pendahuluan

Keberadaan infrastruktur yang memadai akan mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi mobilitas barang dan jasa, serta pada akhirnya bermuara pada stabilitas perekonomian nasional. Gie (2004) dalam Permana (2010) mengungkapkan bahwa secara makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur akan memengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan

biaya produksi. Karena itu, pemerintah di berbagai negara menjadikan strategi pembangunan infrastruktur sebagai lokomotif penggerak perekonomian. Lebih lanjut, kondisi infrastruktur suatu negara bahkan menjadi salah satu indikator tingkat daya saing secara global. Hal ini dinyatakan dalam pilar kedua *Global Competitive Index* yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum* setiap tahunnya.

Berdasarkan data *Global Competitive Index* 2016-2017, Indonesia menempati posisi 60 dari 138 negara yang dinilai

dalam aspek kualitas dan ketersediaan infrastruktur. Hal ini jauh tertinggal jika dibandingkan negara-negara sejawat. Singapura misalnya, yang menempati peringkat 2. Sementara itu, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand masing-masing berada di posisi 14, 19, dan 72.

Kurangnya ketersediaan infrastruktur di Indonesia ini menjadi salah satu faktor yang paling meragukan bagi pelaku usaha dalam melakukan bisnis (*most problematic factors for doing business*). Bahkan menjadi faktor ketiga yang paling berpengaruh setelah problem

Tabel Peringkat Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur

Negara	Global Rank of Infra.	Roads	Rail-roads	Port	Air Transport	Ariline Seat Avail.	Electricity Supply	Mobile Cell Telp.	Fixed Telp. Lines
Singapura	2	2	5	2	1	20	2	24	29
Jepang	5	5	1	22	24	4	15	57	11
Korsel	10	14	9	27	21	18	29	64	4
Malaysia	24	20	15	17	20	23	39	27	72
China	42	39	14	43	49	2	56	105	64
Thailand	49	60	77	65	42	15	61	55	91
Indonesia	60	75	39	75	62	14	89	38	86
India	68	51	23	48	63	8	88	123	114
Vietnam	79	89	52	77	86	29	85	40	99

Sumber: *Global Competitiveness Report* 2016-2017

korupsi dan inefisiensi birokrasi. Tak mengherankan jika data yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menunjukkan bahwa suatu perusahaan di Indonesia umumnya menghabiskan sekitar 17% dari pengeluaran totalnya untuk keperluan logistik, dibandingkan dengan di negara lainnya yang sekawasan yang hanya mencapai sekitar 10%. Lebih lanjut, berdasarkan hasil survey *Logistics Performance Index* (LPI) tahun 2016, Indonesia berada pada posisi ke 63. Masih tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya seperti Singapura (5), Malaysia (32), India (35), dan Thailand (45). Biaya logistik Indonesia pun masih tinggi yaitu sebesar 25% terhadap PDB pada tahun 2013, lebih tinggi daripada Malaysia (8% terhadap PDB), Filipina (7% terhadap PDB), dan Singapura (6% terhadap PDB) (RPJMN 2015-2019).

Berangkat dari masalah tersebut, pemerintah saat ini mulai fokus melakukan percepatan pembangunan

infrastruktur di segala lini, terutama di sektor infrastruktur transportasi baik darat, laut, maupun udara. Strategi ini ditempuh demi mewujudkan konektivitas nusantara dari Sabang sampai Merauke dalam rangka menciptakan pertumbuhan perekonomian nasional yang merata dan berkelanjutan.

Permasalahan

Faktor utama yang menyebabkan permasalahan di bidang infrastruktur adalah kurangnya alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan. Hal ini terlihat dari rata-rata besaran anggaran infrastruktur yang hanya menyentuh 2,5% dari PDB dalam satu dekade terakhir. Sementara China dan India menyediakan anggaran negaranya untuk infrastruktur sekitar 7% - 8% dari PDB. Indonesia saat ini juga bisa dikatakan belum lebih baik dibandingkan pembangunan masa Orde Baru, dimana pada saat itu alokasi anggaran untuk infrastruktur menyentuh

4% - 5% dari PDB.

Minimnya anggaran infrastruktur ini menurut Bank Dunia menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pertumbuhan ekonomi hampir 1% setiap tahun dalam satu dekade terakhir. Artinya pemerintah harus memikirkan cara meningkatkan alokasi anggaran tersebut, demi memperkuat arah pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang sudah dicanangkan dalam *Master Plan* Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Haryanto, 2015).

Problematika anggaran infrastruktur ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menutupinya melalui berbagai cara dengan tetap mempertimbangkan segala resistensi yang ada, sebab pembangunan infrastruktur tak bisa dipandang sebelah mata dan dianggap tak berkontribusi langsung terhadap penyelesaian masalah bangsa, seperti angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Gambar: Ilustrasi konektivitas nusantara



Sumber: Buku II RPJMN 2015-2019

Oleh karena itu, strategi khusus harus ditempuh pemerintah dalam rangka menutupi kekurangan pembiayaan infrastruktur ini. Sumber-sumber potensial harus terus digali dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Lalu, strategi apa yang dapat ditempuh pemerintah di tengah keterbatasan ruang fiskal APBN?

Hasil dan Pembahasan

Arah Baru Kebijakan Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur kini tidak lagi difokuskan di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Pemerintah mulai gencar menggeser pembangunan dari Jakarta sentris menjadi Indonesia sentris. Hal ini bisa diindikasikan sebagai salah satu upaya perwujudan Nawacita dari pemerintahan Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Implementasi tersebut diwujudkan dalam beberapa program seperti Tol Laut dan pengalokasian Dana Desa dari APBN.

Secara lebih teknis, arah kebijakan tersebut pun telah dituangkan dalam RPJMN 2015-2019. Dalam rencana

pembangunan lima tahunan tersebut, pembangunan infrastruktur transportasi sangat diperhatikan untuk mewujudkan konektivitas nusantara. Hal ini terlihat dari kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi yang diarahkan pada: 1) membangun sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi; 2) membangun sarana dan prasarana yang memenuhi standar dan kompatibilitas global pada koridor regional/global; 3) memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah marginal melalui penyediaan angkutan umum murah,

penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara; 4) meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi untuk mengurangi *backlog* maupun *bottlenecking* kapasitas infrastruktur transportasi; 5) mendorong pengembangan angkutan laut, kereta api, dan angkutan penyeberangan untuk mendukung tol laut dalam perwujudan sebagai poros maritim dunia (termasuk pengembangan angkutan *Long Distance Ferry (LDF)*); serta 6) pengembangan transportasi di kota metropolitan untuk meningkatkan mobilitas bagi masyarakat melalui revitalisasi angkutan umum dan pembangunan transportasi massal berbasis jalan dan rel.

Strategi Pembiayaan

Tantangan besar kini harus dihadapi pemerintah sebab dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan pembangunan infrastruktur mencapai angka Rp4.796,2 triliun. Meskipun terlihat berat untuk dicapai, namun dengan melakukan inovasi dan perbaikan strategi, maka bukan tidak mungkin target tersebut bisa terealisasi.



Sumber: World Bank, Kemenkeu

Dalam sudut pandang penulis, setidaknya ada tiga strategi utama yang dapat dilakukan pemerintah dengan mengacu pada postur APBN saat ini.

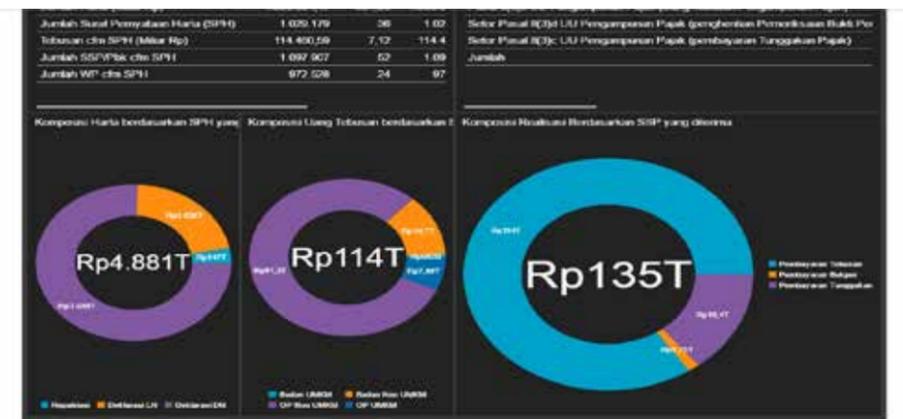
Optimalisasi Potensi Penerimaan Perpajakan

Dalam membiayai pembangunan, tentu dibutuhkan penerimaan negara yang berasal dari berbagai sumber. Saat ini, sumber utama penerimaan negara adalah dari sektor pajak. Atas dasar itu, menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah untuk terus melakukan penyempurnaan dalam rangka pemenuhan target penerimaan pajak. Penyempurnaan tersebut perlu terus diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh melalui perbaikan di tubuh organisasi pemungut pajak, perluasan basis wajib pajak, serta penyempurnaan regulasi di bidang perpajakan. Kini, salah satu strategi perpajakan yang telah dilakukan adalah program Amnesti Pajak yang berlangsung sejak Juli 2016 hingga Maret 2017. Program tersebut dinilai cukup sukses dalam memperluas basis wajib pajak dan menarik potensi pajak yang selama ini tidak terpungut. Amnesti Pajak berhasil menarik penerimaan negara sebesar Rp135 triliun dan mencatatkan deklarasi harta sebesar Rp4.881 triliun.

Pengarusutamaan Belanja Produktif

Arahan untuk meningkatkan alokasi belanja infrastruktur sebenarnya sudah menjadi prioritas pemerintah setiap tahun. Persoalannya, pemerintah senantiasa dihadapkan pada kendala terbatasnya ruang fiskal APBN akibat tingginya beban belanja wajib yang harus dialokasikan, seperti belanja subsidi BBM. Di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah, beban ini tentu mengurangi potensi melakukan terobosan-terobosan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur. Dampaknya, pembangunan infrastruktur pun seperti jalan di tempat.

Untungnya, pemerintahan yang baru sepertinya serius dalam menyikapi kondisi ini. Dengan mempertimbangkan



Sumber: ditjenpajak.go.id

segala resistensi yang ditimbulkan, secara pasti pemerintah mulai menghilangkan subsidi BBM sekaligus mengombinasikan dengan kebijakan subsidi tetap untuk BBM jenis solar. Hasilnya, alokasi subsidi BBM pada APBN 2015 mampu dipangkas dari Rp276 triliun menjadi hanya Rp64,7 triliun pada APBN-P 2015. Ini artinya pemerintah menciptakan *saving* anggaran sebanyak Rp211,3 triliun.

Salah satu implikasi yang ditimbulkan dari pergeseran belanja tersebut adalah meningkatnya anggaran infrastruktur dari semula Rp189,7 triliun pada APBN 2015 menjadi Rp290,3 triliun pada APBN-P 2015. Artinya, belum sampai satu tahun, anggaran infrastruktur melonjak tajam dengan kenaikan 34,65%. Angka tersebut mengindikasikan presentase anggaran infrastruktur yang menyentuh 14,63% dari keseluruhan nilai APBN-P 2015 atau 2,52% dari PDB.

Upaya pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur semakin menunjukkan keseriusannya saat memasuki tahun anggaran 2016, dengan tema RKP 2016 "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas", pemerintah mengalokasikan 14,96% dari seluruh belanja pemerintah untuk mengeksekusi proyek-proyek infrastruktur dengan nilai Rp313,5 triliun.

Tak berhenti sampai disitu, alokasi fiskal untuk infrastruktur semakin ekspansif pada tahun anggaran 2017 sebab Rp387,3 triliun akan disiapkan pemerintah dalam APBN 2017 yang akan dimanfaatkan untuk enam sasaran utama infrastruktur, yakni pembangunan jalan sepanjang 815 km, pembangunan jembatan sepanjang 9.399 m, pembangunan 13 bandara baru maupun lanjutan, pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, pembangunan jalur kereta api tahap I dan lanjutan sepanjang 550 km *spoor*, dan pembangunan terminal penumpang lanjutan di tiga lokasi (kemenkeu.go.id).

Pengelolaan Pembiayaan yang Prudent

Perlahan tapi pasti, pemerintah mulai menerapkan satu per satu strategi dalam mencari sumber pembiayaan, diantaranya dengan melakukan utang untuk belanja produktif dan digandengnya pihak swasta melalui implementasi skema *Public Private Partnership* (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). Selain langkah tersebut, pemerintah kini telah membuat suatu terobosan dalam mencari sumber pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara yang khusus untuk pembiayaan infrastruktur. Pembiayaan melalui SBSN merupakan salah satu skema *creative financing* sebagai implementasi atas sasaran pembangunan

infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019.

SBSN merupakan salah satu instrumen pembiayaan anggaran pemerintah berupa portofolio (*government securities*) selain Surat Utang Negara (SUN). Unsur utama yang membedakan dengan SUN adalah prinsip syariah yang melekat pada penerbitan SBSN sebagaimana diamanatkan dalam UU No.19 Tahun 2008. SBSN sendiri memiliki enam seri produk, yakni *Islamic Fixed Rate* (IFR), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), *Project Based Sukuk* (PBS), Sukuk Ritel, dan Sukuk Valas.

SBSN yang diterbitkan khusus untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur adalah *Project Based Sukuk jenis Financing* (*Project Financing Sukuk/PFS*). PFS mulai diterbitkan pemerintah sejak tahun anggaran 2013. Produk ini merupakan tindak lanjut atas amanat pasal 4 UU No.19 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN meliputi proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat. Kriteria proyek dimaksud harus sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan

oleh Dewan Syariah Nasional Majeis Ulama Indonesia (DSN MUI). Sejak SBSN seri PBS diterbitkan, hingga sekarang sudah ada tiga Kementerian yang merasakan manfaatnya, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Agama.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Solusi atas permasalahan pendanaan infrastruktur dapat dianalisis dari postur utama APBN yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Strategi pemenuhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur dapat dimodifikasi pemerintah setiap tahunnya, baik dengan mengarusutamakan salah satu atau lebih postur tersebut. Namun, dengan diterapkannya ketiga langkah tersebut, akan tercipta diversifikasi strategi sekaligus sebagai upaya mitigasi risiko sehingga upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur untuk



membangun konektivitas nusantara dapat terwujud secara aman dan proporsional.

Melalui implementasi berbagai langkah dan strategi, optimisme Indonesia dalam melakukan percepatan pembangunan guna mewujudkan konektivitas nusantara kini semakin kuat. Dengan dukungan infrastruktur yang merata di seluruh negeri, maka konektivitas antar wilayah akan kian lancar sehingga arus perpindahan orang dan barang menjadi lebih cepat dan murah. Kondisi ini diyakini akan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru, lapangan pekerjaan, meningkatkan transaksi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif guna mewujudkan Indonesia yang berdaya saing tinggi.

Saran

Setelah ketiga strategi diatas terlaksana, tentu akan lebih berdampak bagi pembangunan perekonomian jika dibarengi dengan kebijakan lanjutan yang sejalan. Pertama, di sektor



Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

penerimaan perpajakan, setelah amnesti pajak menunjukkan kesuksesannya, selanjutnya perlu dilengkapi dengan penerapan kebijakan yang terkait dengan penggunaan dana repatriasi serta pemanfaatan data deklarasi harta yang mengarah kepada pembangunan nasional. Terlebih kini pemerintah dipermudah oleh kesepakatan internasional berupa sistem keterbukaan dan pertukaran data perpajakan antarnegara melalui *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk terus konsisten dalam melakukan reformasi perpajakan secara komprehensif.

Kedua, di sektor belanja negara. Pengarusutamaan belanja produktif harus konsisten diupayakan pemerintah tanpa terganggu unsur-unsur politis yang membelenggu anggaran negara secara tidak rasional. Di sisi lain, aspek ekonomi makro juga tak boleh dipandang sebelah mata. Penghapusan subsidi BBM telah terbukti berdampak signifikan bagi peningkatan anggaran infrastruktur, namun pemerintah harus memikirkan dampak yang mungkin terjadi jika sewaktu-waktu harga minyak dunia melonjak dan memengaruhi harga BBM nasional. Perlu skema khusus yang mampu mengantisipasi hal itu.

Ketiga, di sektor pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan yang *prudent* ditunjukkan melalui inovasi pembiayaan yang paling optimal; *benefit* semaksimal mungkin dengan *cost* seminimal mungkin. Selanjutnya pemerintah juga harus terus meningkatkan inovasi dan perbaikan dalam melakukan pembiayaan melalui SBSN dalam aspek proses bisnisnya.

Project Financing Sukuk sebagai salah satu strategi tersebut harus terus dikembangkan dan dimaksimalkan potensinya dengan tetap menjaga kesesuaian syariah. Secara umum, pembiayaan yang dilakukan harus ditujukan bagi pemenuhan belanja yang jauh dari unsur pemborosan, rasio defisit APBN dan utang negara harus tetap dipertahankan dalam batas yang aman, serta potensi risiko dalam pengelolaan pembiayaan harus mampu dipertimbangkan dan diperhitungkan secara akurat demi terpenuhinya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Amir, Hidayat. 2015. *Mengejar Keteringgalan Pembangunan Infrastruktur*. Dalam *Warta Fiskal* Edisi 5 Tahun 2015. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.

Bappenas. 2012. *Alternatif Pembiayaan Infrastruktur*. Jakarta.

Bappenas. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Buku II: Agenda Pembangunan*. Jakarta

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. *Seputar APBN*. Diakses dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-seputar-list.asp?apbn=infra> pada 8 Desember 2016.

Hamdani, Trio. 2016. *Pembangunan Infrastruktur Tak Lagi Fokus di Jawa*. Diakses dari <http://economy.okezone.com/read/2016/12/07/320/1560711/pembangunan-infrastruktur-tak-lagi-fokus-di-jawa> pada 9 Desember 2016

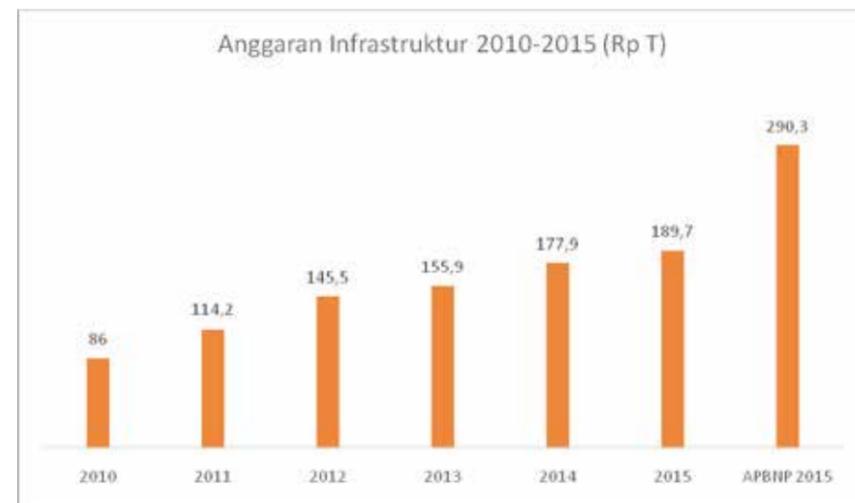
Haryanto, Joko Tri. 2015. *Penguatan Anggaran Infrastruktur*. Diakses dari <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Penguatan%20Anggaran%20Infrastruktur.pdf> pada 5 Desember 2016

Kementerian Keuangan. 2016. *Ini Enam Sasaran Pembangunan dalam APBN 2017*. Diakses dari <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/ini-enam-sasaran-pembangunan-dalam-apbn-2017> pada 9 Desember 2016.

Permana, Chandra Darma dan Alla Asmara. *Analisis Peranan dan Dampak Investasi Infrastruktur terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Input Output*. Dalam *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, Vol. 7 No.1 Maret 2010. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Bogor.

World Bank. 2006. *Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007 BAB 5*.

World Economic Forum. 2016. *The Global Competitiveness Report 2016-2017*.



Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran

Continuous Improvement Layanan Kerumahtanggaan Online Pusdiklat Pengembangan SDM

Oleh: Andi Nur Syamsudin
Pelaksana Pusdiklat PSDM



Rumah tangga identik dengan peran ibu di tataran keluarga. Tergambar pekerjaan rutin dengan meja kerja menghampar sepanjang depan hingga belakang rumah. Bukan sekadar meja kerja, jam kerjanya pun teralokasi seiring bergantinya siang dan malam. Bila didefinisikan oleh ibu-ibu, rumah tangga ibarat bila ditanya 'apakah ada pekerjaan', maka segera kompak mereka menjawab, 'selalu ada pekerjaan'. Bermula dari level keluarga inilah, makna rumah tangga bisa dipersempit, bisa juga diperluas.

Rumah Tangga: Dari Keluarga Hingga Kantor

Dari level individu yang harus mengurus rumah tangga pribadinya, beralih menjadi level keluarga dengan dibutuhkannya koordinasi dan konsolidasi antar dua sejoli demi efektivitas kinerja rumah tangga, kemudian meningkat ke level organisasi yang lebih besar; kepala kantor dengan kepala rumah tangga yang senantiasa membantu mengurus segalanya. Bila istri adalah kepala rumah tangga dan suami adalah kepala keluarga, maka begitu pula hubungan kepala bagian/subbagian rumah tangga dengan kepala kantornya. Seolah-olah, pemahaman 'selalu ada pekerjaan' rumah tangga tak bisa dilepaskan begitu saja di level organisasi manapun.

Karakter Rumah Tangga Kantor

Dalam satuan kerja Pusdiklat berlevel eselon 2 di Kementerian Keuangan, rumah tangga dilabeli subbagian/jabatan eselon 4. Satuan unit ini memiliki jumlah staf yang relatif lebih banyak daripada level eselon 4 lainnya. Untuk mempertajam pekerjaan, subbagian rumah tangga diamanahi pula tugas pengelolaan aset dalam level akuntansi dan manajemen, hingga ia pun berakronim RTPA (Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset). Pemahaman 'selalu ada pekerjaan' tak bisa lepas dari unit kecil ini karena melekatnya beberapa karakteristik sebagai berikut:

Unit pengonversi kas

Bila sebuah Pusdiklat diibaratkan sebagai mesin pencetak ilmu dan uang adalah anggaran operasionalnya, maka tugas teknis pencetakan ilmu ada pada bidang teknis perdiklatan. Sedangkan, perihal konversi anggaran operasional agar bisa menjadi bensin, oli, minyak rem, mengganti suku cadang yang rusak, itu semua merupakan tanggung jawab RTPA.

Uang bisa dikonversi menjadi alat tulis

kantor dan perabot kebersihannya sebagai persediaan lancar yang selalu habis pakai. Bisa pula, ia dikonversi menjadi Barang Milik Negara, dari komputer, mesin fotokopi, mobil, hingga gedung yang selalu ditempati, belum lagi prosedur pemeliharannya. Tak ketinggalan, ia juga tergambar dalam wujud orang-orang asing non-kantor yang dipekerjakan demi keamanan, kebersihan, hingga layanan lain di seantero kantor. Jelas sudah, totalitas konversi kas menyebar ke penjuru kantor dibawah naungan kinerja RTPA.

Unit kerja lain-lain

Logika kedua menjelaskan tentang pekerjaan yang sudah jelas pembagian dan kodifikasinya, atau pekerjaan dengan kode teknis terakhir alias *others* (lain-lain). RTPA menempati jenis yang kedua karena meliputi semua pekerjaan yang tidak dikodifikasikan unit kerja utama. Sebagai contoh, penggandaan alias fotokopi bukan pekerjaan yang tercatat dalam *job-desc* RTPA, tetapi bila unit diklat ingin memfotokopi bahan diklatnya beratus-ratus lembar, mereka selalu melirik RTPA untuk dimintai bantuan. Contoh lainnya adalah pemberantasan tikus dan rayap kantor. Kalau bukan RTPA yang diajak curhat, lalu siapa lagi?

Unit dengan *customer* terbanyak dan pola penanganan variatif

Sembari memaknai poin satu dan dua tentang pekerjaan RTPA yang 'selalu ada', poin ketiga ini menyadarkan akan *customer* yang bervariasi. *Customer* utama jelas adalah rekan-rekan kantor sendiri dengan berbagai macam curahan isi hatinya. Yang butuh alat tulis kantor, aset untuk dipinjam, perbaikan fasilitas, konsumsi dan ruang rapat, hingga butuh diusirnya tikus dan rayap, semua interaksi itu disampaikan melalui beraneka media dan wujud perasaan.

Selain *customer internal*, staf RTPA juga dituntut menghadapi *customer* dari pihak ketiga dengan segenap

kepentingannya. Ada yang minta dibayar cepat, minta diberi pekerjaan, minta diprioritaskan. Belum lagi bila menyangkut proyek dengan nominal besar, staf RTPA harus rajin cerewet dan berpihak pada kantor. Maka, tak ayal bila ada yang berujar, "Bekerja di RTPA itu melatih kedewasaan."

Potensi Kreasi Inovasi

Realitas dari poin 1 sampai dengan 3 membawa potensi dan keunggulan tersendiri. Semakin luas area kerja, semakin besar tuntutan *customer*, maka semakin besar pula lahan RTPA untuk membuka ruang kreasi dan inovasi. Tantangan untuk meringkas layanan dan mencari solusi tuntutan *customer* membuat kreasi dan inovasi dilakukan ibarat metamorfosis sang ulat demi menjadi kupu-kupu, berproses demi meraih kesempurnaan. Inilah makna *countinous improvement*.

Dari Kertas Kucel, Nota Dinas, Hingga Formulir Online

Semua berawal dari selembarnya kertas kucel di meja staf RTPA. Ketika Kepala Bagian Tata Usaha sedang asyik menyapa ruangan anak buahnya, kertas itu tanpa sengaja terbaca. Berisi tulisan tangan kecil-kecil yang menyerupai onggokan benang hitam, namun judulnya tegas dengan huruf kapital, "MINTA ATK YA, DIANTAR KE GEDUNG F". Seketika itu, Kepala Bagian Tata Usaha menitahkan untuk tidak usah memenuhi permintaan layanan yang dianggapnya mirip surat kaleng itu. Sejak saat itulah, penggunaan Nota Dinas dalam tiap permintaan layanan kerumahtanggaan menjadi keharusan. Bahkan, terkadang sambil menggerutu ia dilayangkan, "Maaf, tanda tangan Nota Dinas menyusul ya! Kabid sedang tidak ada." Staf RTPA pun terpaksa menerimanya.

Demi menengahi terlalu mudahnya

meninggalkan kertas kecul di meja RTPA dan sulitnya menembus birokrasi nota dinas, akhirnya diinisiasilah formulir *online*. Kreasi yang satu ini mendasarkan pada isu jual beli *online* yang sedang nge-trend. Inovasi bertujuan untuk menembus keribetan birokrasi, namun tetap terdokumentasi dan bisa diterima legalitas kantor. Akhirnya, pada bulan April 2015 formulir *online* di-launching dalam 5 (lima) jenis layanan sekaligus.

E-Form Permintaan ATK (alat tulis kantor), diluncurkan dengan harapan tidak hanya menjadi formulir legal permintaan dan tanda terima ATK, tetapi juga membantu pendokumentasian nilai persediaan kantor dalam aplikasi yang disinergikan Ditjen Perbendaharaan.

E-form Peminjaman BMN, hadir untuk memfasilitasi agenda diklat yang tak jarang meminjam barang *portable* selevel BMN, seperti laptop, LCD, dan kamera.

E-form Peminjaman Ruang, menjadi solusi atas administrasi kegiatan rapat, diklat, atau seminar yang barangkali membutuhkan ruang aula, kelas, bahkan kamar asrama.

E-form Peminjaman Mobil Dinas, diharapkan menjadi *virtual entry* awal atas bertebarannya tiga mobil kantor ke seantero tujuan dinas, sembari memfasilitasi kebutuhan operasional bidang-bidang kantor lainnya.

E-form Pengiriman Surat, menjadi penenang hati seorang *caraka* kantor atas kendala pendataan surat-surat dinas yang hendak dikirimkan ke dalam maupun luar kota tujuan dinas.

Semua layanan *online* tersebut merupakan hasil konsolidasi komprehensif antara para staf subbagian RTPA dengan lingkup kerjanya masing-masing, sehingga tetap mencakup adanya pembagian tugas alias penanggung jawab. Selain itu, tahun 2015 juga merupakan tahun dimulainya pendokumentasian catatan peminjaman mobil dan ruangan setelah sebelumnya menggunakan papan tulis. Kelemahan

papan tulis adalah ibarat tulisan indah di atas pasir pantai. Rekap peminjaman hanya akan menjadi kenangan indah ibarat terhapus oleh 'angin pantai' peminjaman lainnya. Kebetulan ada fitur internet yang bisa menautkan dokumentasi peminjaman harian dalam tajuk *e-calendar*. Dari sinilah, semua peminjaman mobil dan ruang tercatat.

Sambutan Layanan Online dan Manajemen Perubahan

Bekerja di RTPA penuh beragam tantangan. Dilabeli *online* pun, para *customer* belum cukup puas. Mereka yang juga rekan-rekan sejawat staf RTPA menuntut layanan kerumahtanggaan ibarat lampu ajaibnya Aladdin. Tinggal mengelus gagang telepon, layanan segera dipenuhi. Padahal, konteks birokrasi memiliki batasan. Ia harus mampu memadu antara kemudahan dengan pertanggungjawaban. Bila dengan menelepon saja, layanan dipenuhi, dokumentasi belum bisa dikatakan valid. Tanda terima belum sah diterbitkan. Idiom pun muncul di kalangan petinggi RTPA, "Bila permintaan layanan disampaikan via lisan saja, berarti pemenuhan juga disampaikan via lisan, alias tanpa tindakan."

Pada akhirnya, RTPA tetap *keukeuh* mempertahankan bermacam layanan *online*. Mau tidak mau, suka tidak suka. Namun, dalam perkembangannya, tak semua layanan *online* mendapat sambutan sebagaimana harapan. Sebut saja *e-form* ke-3 bertajuk peminjaman ruang, rekapnya harus kosong melompong dikarenakan manfaatnya yang belum terasa. Banyak pegawai lebih nyaman menggunakan nota dinas berisi permintaan layanan majemuk yang sudah tercatat peminjaman ruangan di dalamnya, apalagi poin permintaan konsumsi belum dapat difasilitasi oleh *e-form online*.

Dari berbagai macam sambutan atas perubahan inilah, RTPA sadar akan

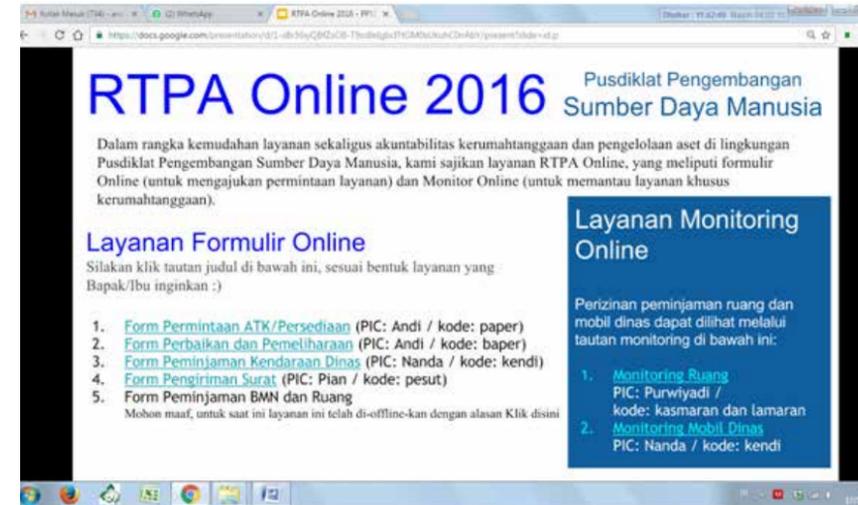
pentingnya manajemen perubahan. Perubahan dari kertas kecul beralih hingga *e-form online*, semuanya harus dikelola dengan baik. Perubahan jangan sampai hanya diakhiri dengan rasa puas pribadi. Padahal puas diri belum tentu membawa manfaat bagi kantor. Ia harus dievaluasi tiap ditakar. Ia harus perlahan-lahan tapi pasti. Perubahan bisa jadi memunculkan perubahan lainnya, bila itu dinilai baik, bagi RTPA maupun bagi Pusdiklat Pengembangan SDM secara keseluruhan.

Continuous Improvement: Kreasi Online Tanpa Henti

Mengambil tema 'setahun layanan kerumahtanggaan *online*' bertahan di Pusdiklat Pengembangan SDM, perubahan terus dikelola. Tahun 2016 memunculkan beberapa ide segar. Selain karena dengung kerumahtanggaan *online* didengar oleh tim penancang kreativitas unit Setjen Kementerian Keuangan, ia juga turut mendapat masukan dari dalam dan luar Pusdiklat.

Hasil *sharing* dengan Setjen memunculkan ide untuk meniru mereka. *One stop service*, begitulah nama layanan kerumahtanggaan di sana. RTPA Pusdiklat Pengembangan SDM tertantang untuk memutar otak, mencari solusi atas pertanyaan, "Bentuk apa dari tautan *online* yang bisa menjadi *one stop service*? Bentuk apa yang bisa menyatukan semua *e-form* RTPA?"

Setelah *trial and error* dengan sistem blog yang ternyata belum cukup ringkas, akhirnya RTPA menemukan bahwa *power point online* ternyata bisa menjadi solusi. Terwujud dalam satu halaman *slide* yang bisa diakses melalui satu *domain* mudah, RTPA pun mengubah tampilan *e-form*-nya dengan *one stop service RTPA online*. Berikut tampilannya:



One stop service mengumpulkan semua layanan kerumahtanggaan menjadi satu tampilan di internet. Bahkan setelah disempurnakan, bukan hanya kumpulan *e-form* permintaan saja yang ditautkan, melainkan *monitor online* juga berhasil dimunculkan. Monitor yang bertepatan sama dengan sebelumnya -yaitu untuk mobil dinas dan ruangan- kali ini *setting* sedikit berbeda.

Mobil dinas tetap ditautkan dalam *e-calendar* dengan *setting* akses publik. Sedangkan peminjaman ruang diubah menjadi model *excel* yang didesain berdasarkan kebutuhan ruang yang ada. Kali ini, aula, ruang kelas detail satu-per-satu, bahkan kamar asrama satu-per-satu-pun mampu dilihat siapa penghuninya berdasarkan tanggal yang diakses. Pada akhirnya informasi ini dapat bernilai penting bagi organisasi.

Namun, dengan berat hati *e-form* peminjaman BMN harus di-*offline*-kan. Hasil evaluasi perubahan menunjukkan kendala ketatnya formulir yang disyaratkan dalam melaporkan peminjaman BMN. Selain itu, demi keamanan barang yang dipinjam, BMN harus diambil sendiri dan ditulis formulir peminjamannya langsung di TKP alias *offline*.

Secara ringkas, berikut layanan *update RTPA Online 2016* dengan akronimnya

agar mudah diingat:

Paper: E-form Permintaan ATK/Persediaan lainnya

Baper: E-form perbaikan dan pemeliharaan

Kendi: E-form peminjaman kendaraan dinas / monitor kendaraan dinas

Pesut: E-form Pengiriman Surat

Kasmaran: Kamar Asrama Terpantau Online

Lamaran: Lain-lain Monitor Ruangan Online

Kami Belum Selesai

Masih banyak yang harus dilakukan sebagaimana makna *continuous improvement* dalam mengelola perubahan. Di satu sisi, RTPA harus bersabar dalam mengeksekusi ide baru yang tiba-tiba muncul, di antaranya:

Memunculkan **Ketupatsosis**, yakni *e-form* kerumahtanggaan rapat, sosialisasi, dan seminar dengan mencakup pemenuhan layanan atas peminjaman ruang sekaligus pertanggungjawaban konsumsi. Selama ini, permintaan konsumsi selalu dilayangkan melalui nota dinas, sehingga masih cukup lamban

bila disampaikan mendesak.

Memunculkan gambar bermacam-macam alat tulis kantor sebagai pelengkap layanan **paper** (*e-form* permintaan ATK/persediaan lainnya), selangkah mendekati kualitas jual beli *online* sehingga meminimalisasi pemilihan ATK bak kucing dalam karung.

Namun, di sisi lain RTPA harus menyadari akan kelemahan yang dimiliki. Sejujurnya, layanan *online* yang telah dijelaskan panjang lebar ini belum layak disebut sebagai 'aplikasi' sampai ada pihak profesional yang bersedia mencabut ke-*online*-nannya dari situs gratis *google*, untuk kemudian diakarkan ke dalam situs yang lebih kredibel, aman, dan jauh lebih profesional. Kali ini, tujuannya bukan lagi menyempit pada level Pusdiklat, melainkan agar 'virus' aplikasi ini kelak mampu dimanfaatkan oleh seluruh unit satker di Kementerian Keuangan. Bahkan bila perlu, membawa keberkahan bagi seluruh unit satker Pemerintah pada umumnya.

RTPA Pusdiklat PSDM berharap layanan *online* kerumahtanggaan bukan hanya dibangga-banggakan oleh unit kerja ini semata. Lebih dari itu, kami berharap mimpi kecil ini dapat terus menggeliat, membesar, dan menularkan kebaikan ke seluruh unit satuan kerja pemerintah di Indonesia.

Prioritas akan tekad ini perlu ditorehkan karena rumah tangga akan selalu ada di level organisasi manapun. Dan ketika ditanya adakah pekerjaan di sana, maka, kami RTPA Pusdiklat Pengembangan SDM dengan sigap menjawab, "Selalu ada pekerjaan." Oleh karena itu, *continuous improvement* akan kreasi inovasi menjadi kebutuhan dan keniscayaan demi tercapainya efektivitas, efisiensi, dan kesempurnaan kinerja.

Pembawaan Uang Tunai (Rupiah atau Valuta Asing) Keluar/Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

Oleh: Hanik Rustiningsih
Widyaiswara Madya Pusdiklat Bea dan Cukai

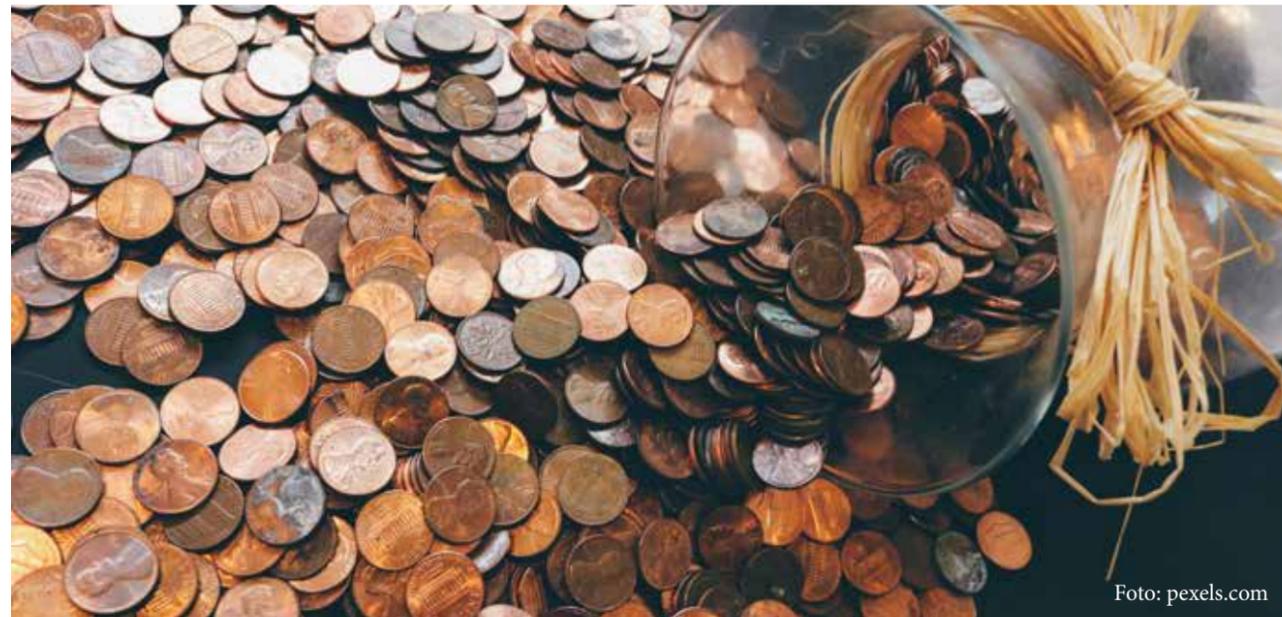


Foto: pexels.com

Peredaran uang dapat menjadi indikasi suatu kejahatan, apalagi dalam jumlah yang sangat besar. Di Indonesia pengawasan transaksi keuangan dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam rangka pengawasan peredaran uang, PPATK memiliki kewenangan untuk akses data perbankan, namun peredaran maupun transaksi keuangan lintas negara secara tunai tidak bisa dilakukan oleh PPATK sendiri. Undang-undang TPPU mengatur bahwa pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya senilai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ditempat keberangkatan/kedatangan. Selain kewajiban pemberitahuan kepada DJBC, pembawaan uang rupiah juga dikenakan kewajiban izin dari Bank Indonesia (BI) atau memeriksakan keaslian uang tersebut.

Kata kunci: uang tunai, impor uang, ekspor uang, pembawaan uang, izin BI

Seorang ibu sangat terkejut ketika harus membayar denda yang dikenakan oleh Petugas Bea dan Cukai di bandara tempat keberangkatannya menuju China. Dia harus membayar senilai Rp.35 juta dari beberapa ribu dollar (USD) uang tunai yang dibawanya, karena dia tidak memberitahukan uang tunai yang dibawanya kepada petugas Bea dan Cukai di tempat keberangkatan. Uang yang telah bertahun-tahun dia simpan dan hendak dibawahnya ke China untuk mengunjungi keluarganya disana. Denda yang harus dia bayarkan, karena ketidaktahuan akan peraturan pembawaan uang tunai ke luar daerah pabean Indonesia, sungguh membuat terkejut.

Tentu Anda tidak menginginkan kejadian tersebut di atas menimpa Anda kan? Ketika seseorang bepergian ke luar negeri pasti membawa uang dalam bentuk tunai, apakah itu dalam mata uang rupiah atau mata uang asing (valas) disamping beberapa kartu kredit atau kartu debit. Bagi anda yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri, ada baiknya anda mengetahui ketentuan pembawaan uang tunai dalam bentuk rupiah atau valas keluar masuk wilayah pabean Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki salah satu tugas sebagai pengawas perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain, terutama dari sisi keluar masuknya barang ke/dari luar wilayah Indonesia. Dalam melakukan tugas pengawasan, DJBC melaksanakan salah satu peran sebagai community protector (pelindung masyarakat), yaitu melindungi masyarakat dari barang-barang yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, mengancam perekonomian dan industri dalam negeri, mengganggu keamanan nasional dan lain-lain. Peran community protector tercermin dalam salah satu tugas pengawasan atas barang-barang yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga teknis sebagai barang dilarang

atau dibatasi impor/eksportnya.

Kelompok barang-barang ini dikenal dengan istilah barang yang dilarang atau dibatasi impor/eksportnya. Barang yang dilarang/dibatasi impor atau ekspor ini ditetapkan oleh Kementerian/ lembaga teknis terkait. DJBC tidak berwenang menerbitkan ketentuan larangan atau pembatasan impor/ ekspor suatu barang, namun mengingat kewenangan dan fungsinya, maka DJBC lah yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan dalam lalu lintas perbatasannya.

Dalam tulisan ini, kita akan membahas bagaimana ketentuan pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean RI. Uang tunai merupakan obyek pengawasan DJBC berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mewajibkan pemberitahuan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya masuk/keluar wilayah pabean Indonesia, kepada DJBC. Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mencakup juga penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, berwenang untuk menelusuri transaksi keuangan, termasuk penelusuran uang tunai. Penelusuran ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh PPATK ketika uang tersebut dibawa keluar/masuk wilayah pabean RI dalam bentuk tunai melalui perbatasan negara. Oleh karena itu Undang-undang TPPU mengamanahkan pengawasan lalu lintas uang tunai keluar/masuk wilayah RI

dilakukan oleh DJBC dengan mekanisme pemberitahuan pembawaan uang tunai.

Dalam Pasal 34 Undang-undang TPPU dinyatakan bahwa setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukan kepada DJBC. Pemberitahuan kepada DJBC dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tempat kedatangan/keberangkatan, dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean yang telah ditentukan.

Kemudian DJBC mempunyai kewajiban untuk melaporkan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya tersebut kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. Jika diperlukan, PPATK dapat meminta informasi tambahan dari DJBC mengenai pembawaan uang tunai dan/ atau instrumen pembayaran lain yang diberitahukan oleh seseorang.

Pada sisi lain, ketentuan pembawaan uang tunai juga diatur oleh Bank Indonesia (BI), khususnya uang rupiah. BI mengatur pembawaan uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dengan pertimbangan untuk mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Uang Rupiah serta dalam rangka pengawasan terhadap lalu lintas peredaran uang termasuk pengawasan terhadap uang palsu. Pengaturan pembawaan uang tunai dalam mata uang Rupiah oleh BI dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: PBI 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean RI. Jika diperhatikan, Undang-undang TPPU (2010) memiliki umur yang lebih muda dibanding dengan PBI (tahun 2002),

namun demikian ketentuan pembawaan kedua peraturan tersebut tidak ada yang bertentangan. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mencabut Undang-undang Nomor Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang sebelumnya juga mengatur tentang pembawaan uang keluar/masuk wilayah pabean RI.

Jika berdasarkan Undang-undang TPPU, diatur ketentuan pelaporan pada DJBC, maka PBI mengatur ketentuan perizinan pembawaan uang rupiah ke luar wilayah RI dan kewajiban memeriksakan keaslian uang rupiah pada saat kedatangan dari luar daerah pabean. Kewajiban pelaporan atas pembawaan uang rupiah keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih berdasarkan Undang-undang TPPU, tidak menghapuskan kewajiban untuk memperoleh izin Bank Indonesia, dan kewajiban untuk memeriksakan keaslian uang.

Dalam ketentuan Bank Indonesia, jika anda keluar wilayah pabean RI dan membawa uang tunai dalam bentuk mata uang Rupiah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih wajib mendapat izin BI. Surat izin dimaksud harus diserahkan kepada petugas BC di tempat keberangkatan dengan ketentuan:

- Jumlah uang yang dibawa paling banyak sama dengan jumlah yang tercantum di dalam surat izin;
- Surat izin BI dimaksud hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali penggunaan; dan
- Masa berlaku izin paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal izin.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, jika Anda membawa uang tunai dan/atau valas dan/atau instrumen pembayaran lainnya senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih keluar wilayah pabean Republik Indonesia maka Anda harus memberitahunya

kepada Petugas Bea dan Cukai di tempat keberangkatan. Dan jika uang yang dibawa tersebut terdapat mata uang rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih harus dilengkapi dengan izin BI.

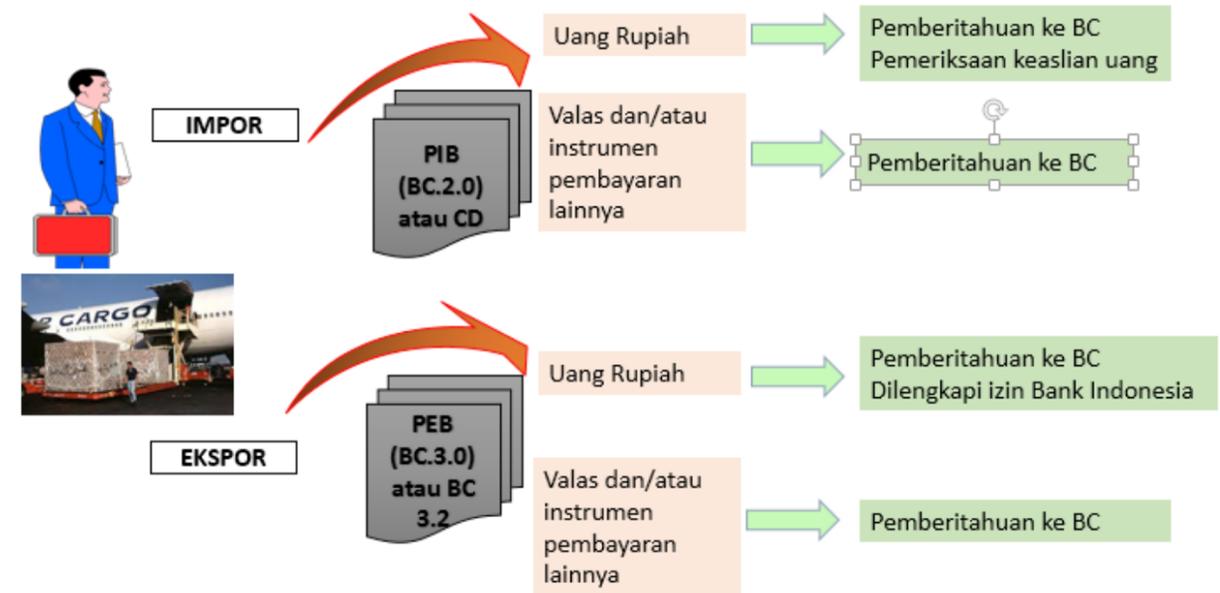
Apabila Anda membawa uang rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih masuk wilayah pabean Republik Indonesia, wajib memberitahukan kepada petugas Bea dan Cukai dan memeriksakan keaslian uang tersebut kepada petugas Bea dan Cukai di tempat kedatangan. Jika uang tunai yang Anda bawa dalam bentuk valas atau instrumen pembayaran lainnya senilai Rp.100.000.000,00 atau lebih tetap harus memberitahukan kepada Petugas Bea dan Cukai. Pemeriksaan keaslian uang hanya diwajibkan atas mata uang rupiah saja.

Pada praktiknya pembawaan uang rupiah atau valas bisa menggunakan kargo atau dibawa langsung oleh penumpang. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengawasan pembawaan uang tunai ini, DJBC melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 01/BC/2005 tentang Tatalaksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai, telah mengatur teknis pemberitahuan pembawaan uang tunai oleh importir/eksportir/penumpang di Kantor Pabean tempat kedatangan/keberangkatan.

- Keluar wilayah Pabean RI, harus mengisi dan menyerahkan:
 - Pemberitahuan Pembawaan Mata Uang Tunai Keluar Daerah Pabean (BC 3.2) jika dibawa langsung oleh penumpang; atau
 - Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) jika diekspor sebagai barang kargo atau melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT).

Apabila yang dibawa adalah uang tunai berupa rupiah maka pemberitahuan sebagaimana tersebut pada angka 1) dan 2) diatas wajib dilampiri dengan izin

Pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya keluar/masuk wilayah RI (senilai Rp.100.000.000,00 atau lebih)



Bank Indonesia.

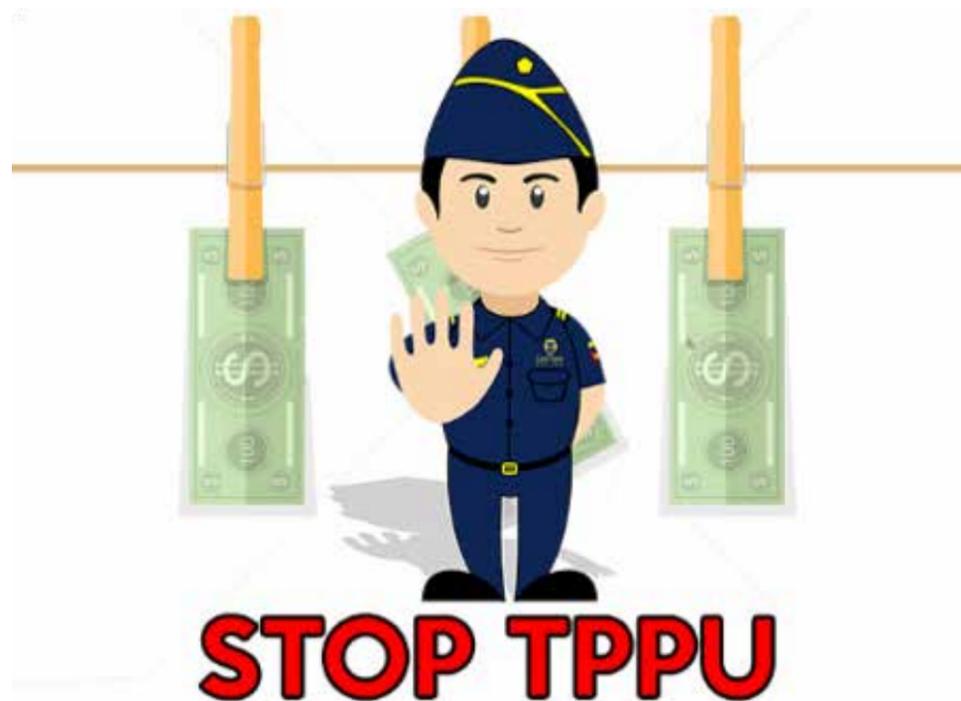
- Masuk wilayah Pabean RI, harus mengisi dan menyerahkan:

- 1) *Customs Declaration* (BC 2.2) jika dibawa langsung oleh penumpang; atau
- 2) Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) jika diimpor sebagai barang kargo; atau
- 3) Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (BC 2.1) jika melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT).

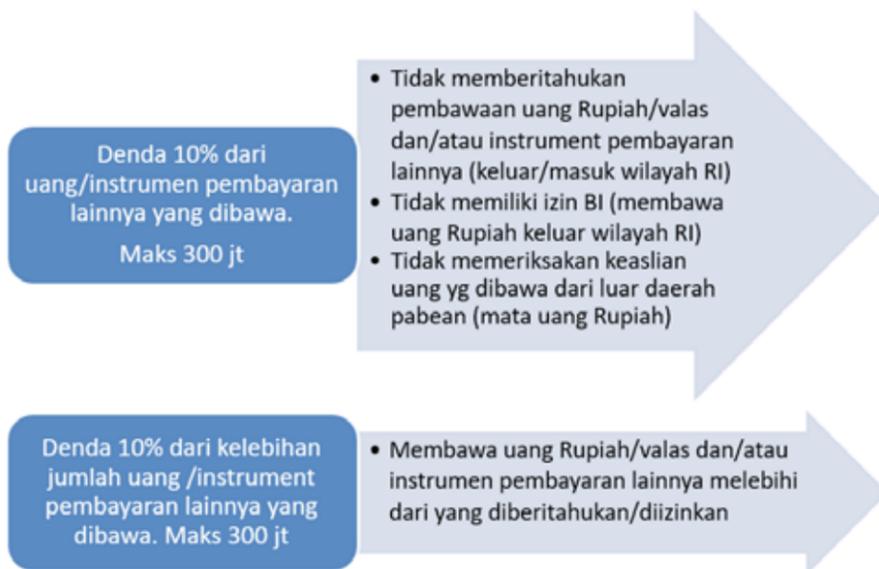
Apabila yang dibawa adalah uang tunai berupa rupiah maka setiap orang yang membawa uang tersebut wajib memeriksakan keaslian uang rupiah kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Bagaimana jika Anda tidak memberitahukan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya kepada petugas Bea dan Cukai di tempat kedatangan/keberangkatan? Atau bagaimana jika Anda membawa uang

Rupiah ke luar wilayah pabean Indonesia senilai Rp.100.000.000,00 atau lebih tanpa izin BI? Dalam Pasal 35 Undang-undang TPPU diatur bahwa jika seseorang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Demikian juga jika seseorang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan, maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sanksi administratif tersebut diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara oleh



Sanksi



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada PBI, sanksi juga dikenakan terhadap orang yang tidak memiliki izin BI atas uang tunai (mata uang rupiah) yang dibawa keluar wilayah pabean RI atau tidak memeriksakan keaslian uang di tempat kedatangan, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah uang rupiah yang dibawa, dengan batas maksimal pengenaan sanksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Misalnya, seseorang membawa keluar wilayah RI, uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp.150.000.000,00 dan tidak memberitahukan kepada petugas bea dan cukai di tempat keberangkatan, maka dia akan dikenakan denda sebesar Rp.15.000.000,00 (10% dari Rp.150.000.000,00). Atau jika uang tersebut diberitahukan kepada petugas bea dan cukai disertai izin BI, dan ternyata izin yang dimiliki hanya untuk Rp.120.000.000,00 saja, maka dia akan dikenakan denda karena membawa uang rupiah melebihi dari yang diizinkan. Denda yang dikenakan sejumlah Rp.3.000.000,00 (10% dari kelebihan jumlah yang diizinkan, yaitu Rp.30.000.000,00). Hal ini berlaku

juga untuk pengenaan kesalahan tidak memberitahukan terhadap pembawaan valas dan instrumen pembayaran lainnya.

DJBC akan selalu mendukung dan melaksanakan amanah Undang-undang TPPU dan PBI terkait dengan pembawaan uang tunai, walaupun tantangan geografis dalam melakukan pengawasan keluar masuknya uang tunai dari/ke Indonesia yang sesuai ketentuan cukup sulit dilakukan. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antar instansi berwenang untuk dapat melakukan pertukaran informasi dan mengedukasi masyarakat sehingga pengawasan dapat lebih maksimal dan tepat sasaran. Sehingga peristiwa sebagaimana terjadi pada contoh di awal tulisan ini tidak terjadi. Semoga bermanfaat.

OOOOOO

Daftar Pustaka

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran

Negara RI Tahun 2010 Nomor 122. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia. Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar Atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 01/BC/2005 tentang Tatalaksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai. Jakarta.

Serunya Aktivitas Kelas Menggunakan e-Learning Kahoot!

Oleh: Andi Nur Syamsudin
Pelaksana Pusdiklat PSDM

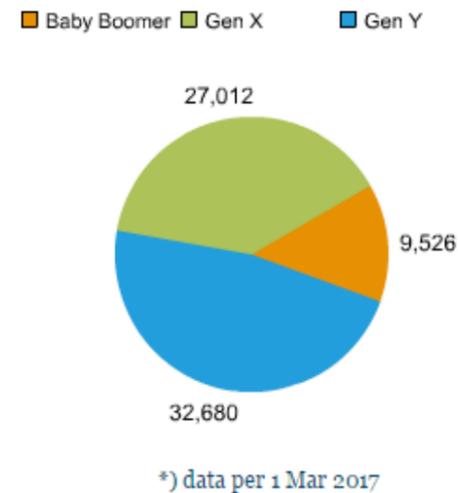


Menghadapi globalisasi merupakan tantangan yang tak boleh luput dari visi seorang pendidik. Karena dari globalisasi-lah, lahir pembaruan generasi. Bila di zaman dahulu, seorang pendidik dididik menggunakan cara-cara pendidikan klasik, maka di zaman ini, seorang pendidik sudah sangat berbeda karakter dengan yang mau dididik. Strauss-Howe menjelaskan secara ringkas pembaruan generasi ini melalui teori 4 generasi: baby boomers, X, Y, dan Z.

A. Renungan Awal

Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas pendidik yang dimiliki Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan saat ini (sebut saja, bapak ibu widyaiswara dan dosen) merupakan generasi X (kelahiran 1965-1980) . Sedangkan, peserta didik dari Kementerian Keuangan yang menjadi objek sasaran diklat BPPK mayoritas berasal dari generasi Y (kelahiran 1981-1994). Generasi ini merupakan *trendsetter*-nya generasi zaman sekarang. Komposisi pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan generasi dapat dilihat pada gambar 1.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Generasi



Gambar 1. Komposisi Pegawai Kementerian Keuangan Berdasarkan Generasi

Perbedaan tipe generasi antara pendidik dan peserta didik ini boleh jadi akan sangat berpengaruh pada proses transfer materi dari pendidik ke peserta didik, berpengaruh pada level penerimaan materi, juga pada tingkat pemahaman.

Melihat realita ini, maka memutakhirkan informasi dalam dunia sarana pendidikan menjadi Pekerjaan Rumah bagi BPPK sebagai organisasi pendidikan sekaligus bagi masing-masing individu pendidik. Teringat pepatah Arab;

“Cara mengajar lebih penting daripada bahan yang diajarkan. Guru lebih penting daripada cara dia mengajar. Hati seorang guru lebih utama dari penampilan cara mengajar dan bahan yang diajarkan”

B. Apa itu E-Learning Ber-platform Kahoot!

E-learning merupakan konsep pembelajaran yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke peserta dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lain. Konsep ini berhasil dikembangkan melalui basis aplikasi bertajuk “Kahoot!” oleh tim peneliti dari Norwegian University of Science and Technology. Hasilnya adalah sebuah media belajar yang seru, atraktif, dan penuh tantangan.

Media yang dibutuhkan oleh pendidik sebagai admin hanyalah laptop, layar LCD, dan jaringan internet. Sedangkan untuk peserta didik, dibutuhkan *smartphone*, tablet, atau komputer dengan jaringan internet. Melalui jaringan internet, presentasi dari pendidik akan dijawab oleh peserta didik, sehingga aktivitas pembelajaran berjalan secara interaktif dan tidak membosankan. Yang perlu dipastikan adalah: jaringan internet tidak lambat.

C. Tipe-tipe Kahoot!

Saat ini, ada 4 tipe dalam media pembelajaran *e-learning* Kahoot!

1. Kuis. Tipe kuis memiliki fitur utama satu atau lebih pertanyaan dengan masing-masing memiliki 1 atau lebih jawaban benar dari 2-4 pilihan. Dengan menampilkan jawaban yang benar dan klasemen papan skor untuk masing-masing pertanyaan, tipe ini akan semakin seru bila pendidik menyediakan beberapa hadiah untuk peringkat juaranya.



2. Survey

Berbeda dengan kuis, survey tidak memuat jawaban benar atau salah, juga tidak memuat papan skor. Survey mengumpulkan pendapat atau jawaban paling benar menurut peserta didik. Hasil *survey* hanya berupa diagram batang masing-masing jawaban untuk dapat dijadikan pedoman pembelajaran berikutnya.

3. Diskusi

Mirip dengan survey, tipe ini hanya terbatas untuk satu pertanyaan. Diskusi bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan secara cepat agar dapat segera dianalisis melalui aktivitas kelas.

4. Jumble/Acak

Tipe baru ini bisa jadi lebih seru daripada kuis, karena membutuhkan kecepatan berpikir dan kelihaihan jemari. Diekspansi dari tipe kuis, tipe ini tidak bergenre multiple choice, melainkan mengarahkan 4 pilihan untuk diurutkan menjadi suatu *sequence*. Tipe ini dilengkapi dengan papan skor dan pemenang jumble sehingga cocok juga bila disediakan hadiah.

Sejak awal di-*launching*, Kahoot! hanya memiliki tipe bernomor 1, 2, dan 3. Tipe ke-4 baru *launching* pada Desember 2016.

D. Membuat Akun Kahoot!

Langkah pertama agar seorang pendidik dapat memanfaatkan Kahoot! adalah membuat akun Kahoot!. Langkah ini sama seperti membuat akun email. Berikut poin-poin langkahnya.

1. Masukkan URL: getkahoot.com atau create.kahoot.it, lalu klik tombol *Sign Up* atau *Get My Free Account*, sebagaimana pada gambar 2.



Gambar 2. Tampilan awal laman web Kahoot!

2. Silakan pilih kepentingan kita dalam menggunakan Kahoot! Dalam memilih satu dari lima pilihan seperti gambar di bawah ini, kita perlu mempertimbangkan secara matang bahwa soal-soal kita nanti akan dimiliki oleh Kahoot!. Kahoot! akan secara otomatis memiliki bank soal yang sangat banyak termasuk kita sebagai salah satu anggotanya. Oleh karena itu, kita perlu memanfaatkan Kahoot! hanya untuk interaksi kelas saja, bukan untuk hal yang bersifat privat dan rahasia.

Bila kita adalah guru atau siswa berusia > 16, maka selain mengisi nama pengguna (*username*), alamat *email* dan *password* Kahoot!, kita juga perlu mengisi nama sekolah atau universitas. Bila kita siswa berusia <= 16 atau untuk kegiatan sosial, maka perlu dicantumkan tanggal lahir. Bila kita seorang pebisnis, perlu dicantumkan nama perusahaan.

3. Bila semua kolom telah diisi, tombol paling bawah bertuliskan *create account* cukup untuk membawa kita berkreasi dan mengelaborasi inspirasi melalui Kahoot!. Kita sudah bisa membuat kuis, *survey*, diskusi, atau *jumble e-learning*.



E. Membuat e-Learning Kuis

Kuis adalah salah satu dari tiga tipe *e-learning* Kahoot!. Bila kita sudah mampu membuat kuis Kahoot!, membuat tipe Kahoot! yang lain akan lebih mudah. Untuk membuat kuis, kita harus masuk ke akun Kahoot! yang telah dibuat dengan cara seperti masuk ke alamat email, yaitu dengan meng-*entry username* dan *password* pada kolom *sign in*. Setelah itu, kita bisa mulai mengkreasi kuis dengan cara mengklik tanda panah sebagaimana tampilan Gambar 3.

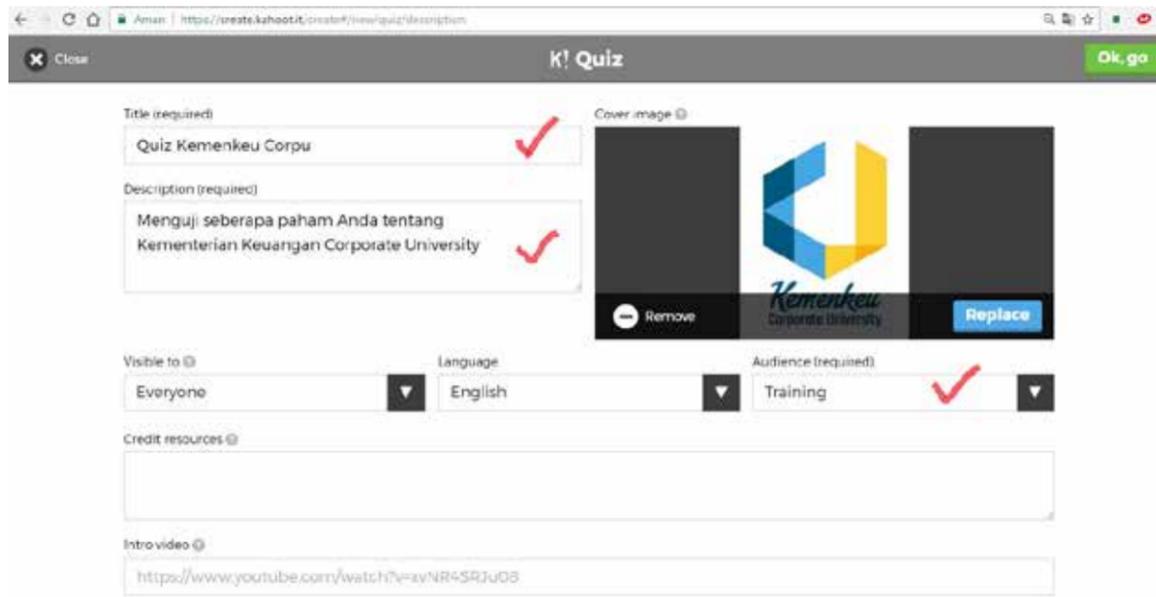
Langkah untuk membuat pertanyaan kuis adalah sebagai berikut:

1. Mengisi Panel Penjelasan Kuis (Gambar 4)

Dalam panel judul, cukup tiga kolom yang wajib diisi (kolom bertanda V



Gambar 3. Tahap awal membuat kuis



Gambar 4. Pengisian Panel Penjelasan Kuis

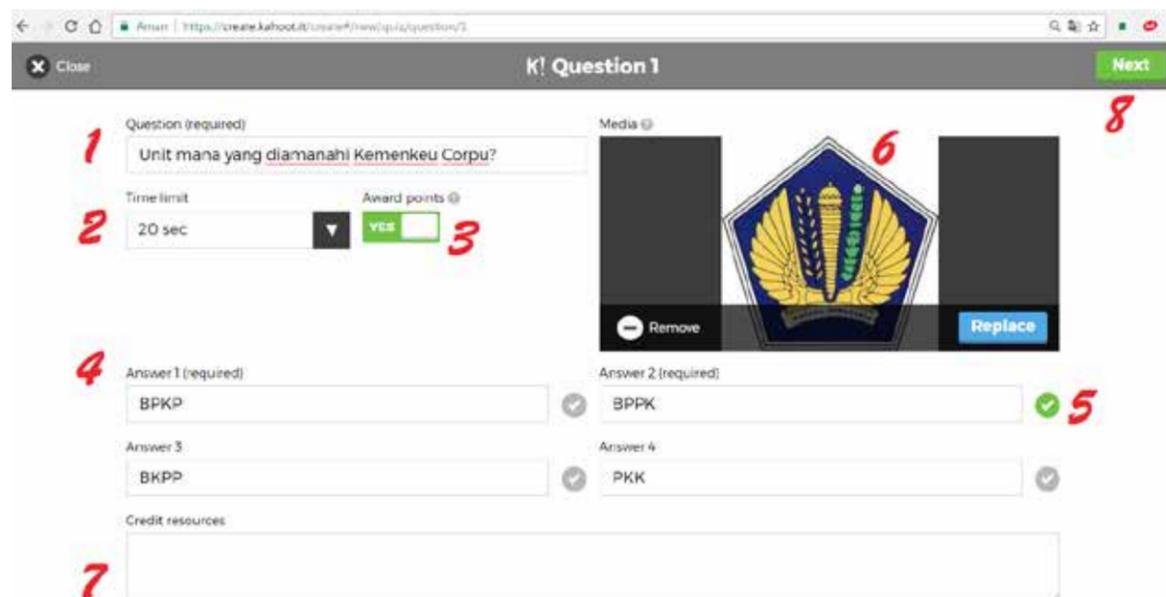
merah), yaitu: judul kuis, gambaran kuis, dan *audiens* kuis. Pilihan lain termasuk opsional, meliputi: (a) *visible to* (dapat *dishare* atau untuk pribadi saja), (b) bahasa (mohon maaf, bahasa Indonesia belum ada), (c) *credit resources* (info referensi soal/semacam daftar pustaka), (d) *intro video* (apabila link URL video dicantumkan disini, maka saat registrasi peserta, video akan ditampilkan secara otomatis). (e) *cover image* (apabila gambar diunggah di sini, maka akan menjadi *background* utama kuis, akan muncul pada tampilan awal setiap soal baru muncul)

Bila panel deskripsi kuis telah diisi, silakan klik tombol OK, GO pada kotak hijau pojok kanan atas.

2. Membuat Satu demi Satu Soal Kuis

Begitu tombol Ok, Go diklik, panel pengaturan kuis akan terbuka. Panel pengaturan ini akan dibahas di poin 3, kita langsung klik saja tombol *Add Question* yang terpampang di panel pengaturan. Setelah itu akan muncul panel *Question 1* sebagaimana gambar 5.

Nomor-nomor di atas menjelaskan sebagai berikut:

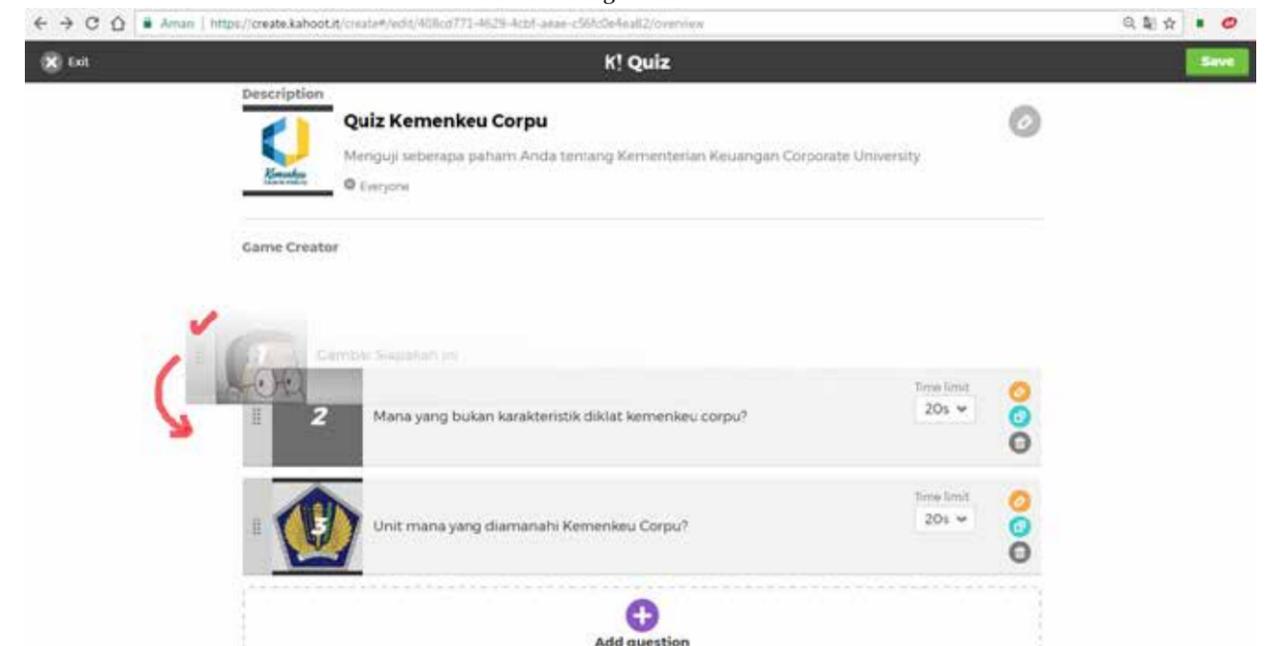


Gambar 5. Pembuatan Soal Kuis

1. Pertanyaan soal 1. Dengan kapasitas 95 karakter, kita dapat menuliskan pertanyaan di kolom ini.
 2. Durasi menjawab. Untuk menentukan berapa detik waktu menjawab, kita perlu pertimbangkan durasi berpikir peserta kuis, tingkat kesulitan soal, dan kecepatan internet admin maupun peserta. Bila waktunya terlalu sedikit, peserta dengan kecepatan internet rendah akan terkendala.
 3. Poin nilai. Posisi YES akan menyebabkan jawaban benar diberikan nilai. Bila NO, jawaban benar atau salah sama saja, tidak menghasilkan poin bagi peserta saat kuis berlangsung.
 4. Opsi Jawaban. Opsi 1 dan 2 wajib diisi. Dua opsi ini cocok untuk membuat soal Benar-Salah. Pengisian opsi 3 dan 4 bersifat opsional dengan genre jawaban *multiple choice* atau 4 pilihan.
 5. Opsi Hijau = Benar. Opsi ini dapat dilakukan dengan mengklik tanda V sehingga menjadi berwarna hijau. Yang unik, opsi benar ini dapat diberikan ke 1 atau bahkan ke semua pilihan, sehingga saat kuis berlangsung, peserta hanya bisa menjawab satu dari beberapa pilihan yang benar.
 6. Unggahan Gambar. Saat menjawab soal, gambar akan muncul pada layar sekitar >50% tampilan. Gambar dapat pula dijadikan soal, misalnya: gambar siapakah ini?
 7. *Credit resources*. Kolom ini merupakan sumber soal yang dapat dicantumkan bila diperlukan.
 8. Tombol *Next*. Tombol ini akan menyimpan soal 1 dan membawa kita kembali ke panel pengaturan kuis. Bila ingin menambah soal, silakan klik *Add Question* lagi di panel tersebut kemudian mengulang kembali urutan poin 1-8, dan seterusnya hingga jumlah soal dirasa cukup.
3. Mengatur Soal-soal Kuis yang sudah Dibuat

Setelah jumlah soal dirasa cukup, kita dapat mengatur soal melalui panel pengaturan sebagaimana terlihat pada gambar 6.

Gambar 6. Pengaturan Soal-soal Kuis



Melalui cara drag-and-drop cursor mouse di tanda V pada gambar, tiap soal dapat diatur urutannya ke atas atau ke bawah. Dari panel pengaturan pula, kita dapat merevisi soal, mengubah durasi waktu, menghapus soal, juga copy-paste soal (bila soal ingin diulangi lagi di nomor soal berikutnya). Bila ingin menambah soal, tinggal klik Add Question. Bila dirasa cukup, maka tombol SAVE di pojok kanan atas panel akan membawa kita ke uji-coba kuis.

4. Uji Coba Kuis

Bila memilih Preview it, kita seolah-olah memiliki 2 perangkat di komputer kita; yaitu perangkat yang mewakili admin kuis (tampilan utama) dan perangkat peserta (smartphone), seperti gambar 7. Selanjutnya, kita uji coba bermain game classic (personal).



Gambar 7. Preview Kuis

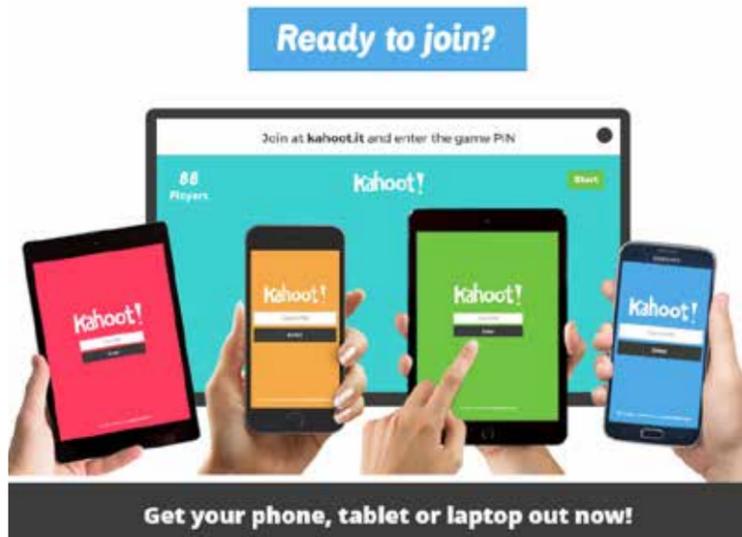
Yang membedakan antara preview it dan play it hanya dari segi tampilan saja. Preview it seperti gambar di atas, sedangkan play it adalah tampilan layar sesungguhnya yang nanti akan dipresentasikan ke peserta kuis.

F. Mempresentasikan Kuis e-Learning

Di dalam kelas, pendidik bersiap mempresentasikan kuis melalui e-learning Kahoot!. Maka, tampilan

awalnya adalah persiapan seperti pada gambar 8. Maksudnya, agar para peserta menyiapkan perangkat masing-masing, baik smartphone, komputer, atau laptop. Jangan lupa mengingatkan bahwa pemenang kuis ditentukan bukan hanya kecerdasan dan kecepatan menjawab, melainkan juga kecepatan internet.

Gambar 8. Tampilan Awal Kuis Kahoot!



1. Registrasi Peserta

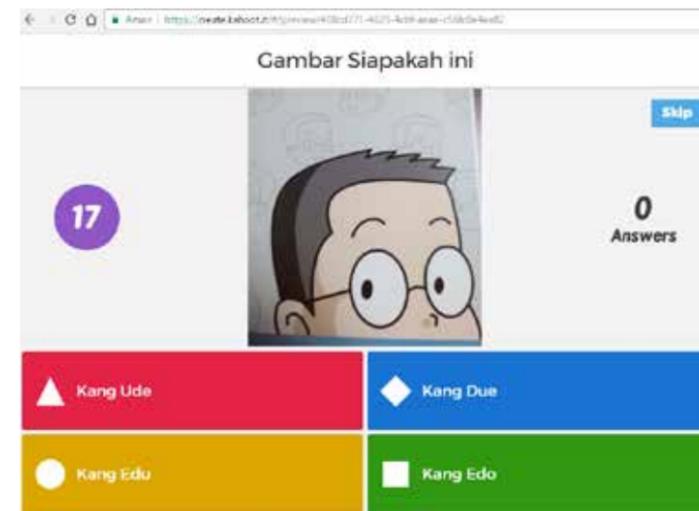
Selanjutnya, admin dengan layar LCD-nya akan mengajak peserta bergabung ke dalam kuis yaitu dengan cara membuka browser perangkatnya (dapat juga melalui aplikasi Kahoot! pada playstore), kemudian pada kolom URL dituliskan kahoot.it. Tampilan akan meminta nomor PIN dan username peserta kuis. Maka, nama-nama peserta akan secara otomatis ditampilkan di layar, seperti pada gambar 9 (contoh 3 peserta kuis):

Gambar 9. Peserta yang sudah masuk kuis



Admin dapat menunggu sampai peserta lengkap tanpa dibatasi waktu.

2. Menjawab Kuis



Gambar 10. Tampilan Kuis

Ketika soal dipresentasikan, maka waktu menjawab akan berjalan (default 20 detik). Selama waktu tersebut, perangkat peserta hanya berwujud bentuk dan warna, sedangkan nama-nama pilihan tetap terpampang di layar LCD (gambar 10). Peserta dipersilakan memilih jawaban sesuai dengan pilihan di layar. Ketepatan dan kecepatan menjawab peserta sangat mempengaruhi nilai yang akan diberikan. Setelah waktu habis, jawaban yang benar dan papan skor akan muncul di layar LCD seperti gambar di bawah ini. Perangkat peserta juga akan menunjukkan benar atau tidaknya jawaban yang dipilih, nilai peserta, juga peringkatnya di nomor berapa.

Dalam proses menjawab inilah, antusiasme dan keseruan peserta muncul menyeruak. Di antara mereka ada yang mungkin teriak atau tertawa. Kemungkinannya ada dua. Kalau bukan karena tanpa sengaja pilihan jawaban terpencet (karena saking sensitif smartphonenya), biasanya juga karena internetnya sedang melambat, sehingga pilihan jawaban tidak muncul-muncul, dan peserta belum bisa menjawab.

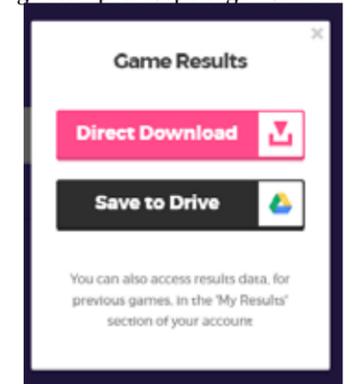


Selama layar admin menampilkan jawaban yang benar, peringkat peserta, dan papan skor secara bergantian, waktu pengerjaan soal berhenti. Di sinilah admin sebagai pendidik dapat melakukan evaluasi atau menyelipkan materi pada sesi ini.

Bila soal lebih dari satu, setiap soal selesai dijawab, papan skor yang muncul akan menampilkan hasil nilai yang bersifat akumulasi. Kita dapat melihat klasemen peserta yang saling kejar-mengejar sepanjang kuis berlangsung. Setelah kuis berakhir, maka podium akan diisi oleh peserta dengan nilai tertinggi seperti pada gambar 11.

3. Mengunduh Hasil Kuis

Setelah kuis usai, kita dapat mengunduh hasil kuis yang telah dilakukan, yaitu dengan mengklik tombol SAVE RESULT pada layar LCD pengajar. Kemudian, 2 pilihan akan muncul, yaitu mendownload langsung ke folder komputer pengajar atau menyimpan ke dalam google drive, dengan tampilan seperti gambar 12:



Gambar 12. Pilihan Mengunduh Hasil Quiz

Hasil kuis diunduh berupa file Excel, dimana di dalam file tersebut, terdapat banyak sheet yang berkaitan dengan kuis, di antaranya: ringkasan kuis, skor final, ringkasan nilai peserta, bahkan ringkasan proses penjawaban masing-masing soal. Pada intinya hasil kuis ini sangat detail dan dapat diinformasikan ke para peserta pasca-kuis.

G. Sekilas Menu Bar Kahoot!

Kembali ke tampilan Kahoot!. Setelah membuat kuis, menyimpan, dan menguji-cobanya, Kahoot! akan secara otomatis menampilkan menu bar.

Menu bar di panel atas Kahoot! mirip dengan menu bar pada email, dengan fungsi utama pengaturan. Dari kiri-ke-kanan, ada tombol New K! Untuk membuat Kahoot! baru (baik berupa kuis atau yang lainnya), My Kahoot! berisi stok-stok Kahoot! kita, hingga di paling ujung kanan terdapat nama akun kita yang apabila diklik akan muncul fitur edit profile, change password, hingga sign out untuk keluar dari akun Kahoot! kita.

H. Fitur *Sharing* Kahoot!

Nah, setelah sukses membuat sebuah kuis, biasanya kita akan tertantang membuat bentuk-bentuk model Kahoot! yang lain, seperti *Jumble*, *Discussion*, atau *Survey*. Tentunya dengan membayangkan apa yang seru dan mengasyikan untuk dibahas di hadapan peserta diklat melalui Kahoot!.

Ketika kita sudah memiliki banyak stok kuis, *survey*, atau tipe Kahoot! lain, alangkah lebih bermanfaat lagi bila hasil karya tersebut dapat dibagi atau disebarluaskan ke sahabat-sahabat terpercaya kita. Semoga tak ada hak intelektual yang cedera karena penyebarluasan tersebut.

Bila kita mengklik salah satu stok kuis pada fitur *My Kahoot*, kita akan menemukan tampilan seperti gambar 13.



Gambar 14. Hasil Klik Tautan Kuis

I. Jadi, Apa Manfaat Kahoot! bagi Kantor Kita?

Dari berbagai *sharing* renungan, pembuatan, hingga pengoperasian aplikasi *e-learning* di atas, sedikitnya Kahoot! dapat di manfaatkannya untuk beberapa aktivitas berikut ini:

1. **Transfer materi.** Tidak penting isi muatan kuis, *jumble*, ataupun *survey* bila kita memanfaatkannya sebagai prosedur transfer materi. Sarana soal-jawab Kahoot! menyediakan jeda yang cukup panjang antara soal pertama dengan kedua, juga dengan soal-soal yang lain. Jeda tersebut sangat efektif untuk memberikan selipan materi berkenaan dengan kuis instan yang ditampilkan. Proses ini tidak mementingkan hadiah. Yang terpenting, pendidik harus lebih memiliki kharisma daripada Kahoot! yang disajikan agar peserta dapat menerima materi secara sukses, bukan terlalu fokus kepada Kahoot! yang ditampilkan.

2. **Evaluasi materi.** Setelah materi tuntas diberikan seorang pendidik, Kahoot! mulai dioperasikan. Kuis pun berjalan dengan username distandarkan dengan nama peserta atau nomor induk mahasiswa. Hasil kuis diunduh dan dijadikan rekap nilai untuk membuat rapor. Ini contoh penggunaan Kahoot! untuk evaluasi materi yang serius.
3. **Ice breaking.** MC yang kebingungan lantaran pembicara belum datang, MC yang siap mengalokasikan waktu untuk bagi-bagi hadiah, pengajar yang memberikan relaksasi kepada peserta setelah serius belajar. Inilah contoh penggunaan Kahoot! yang seru dan mengasyikan, karena Kahoot! menyediakan fitur podium bagi para pemenang. Lebih seru lagi bila hadiahnya lebih dari satu jenis.
4. **Survey instan.** Di dalam kelas atau dalam beberapa pertemuan dengan responden yang berbeda, pengajar mungkin perlu meneliti suatu kasus melalui *survey* yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Dengan hasil yang instan ditampilkan, pengajar dapat secara langsung memiliki data untuk diolah pada tahap selanjutnya.
5. **Bahan Diskusi Cepat.** Suatu studi kasus didiskusikan oleh pengajar dengan beberapa pilihan jawaban kepada banyak peserta. Setelah hasilnya ditampilkan, dimulailah diskusi dengan alot. Hasilnya tidak ditampilkan dalam Kahoot! namun dapat menjadi media pembelajaran bersama.

Masih banyak fitur Kahoot! yang belum dibahas di artikel ini. Semoga sedikit ulasan ini menumbuhkan rasa penasaran yang membangkitkan niat dan semangat pembaca untuk belajar lebih jauh tentang *e-learning* Kahoot! atau *e-learning* lainnya. Tentu sambil kita merenungi betapa generasi masa depan lebih memerlukan sarana pengajaran yang lebih efektif daripada yang kita pernah dapatkan sebelumnya.

Referensi:
getkahoot.com
<http://www.sdm.kemenkeu.go.id/>

GUNAWAN WIBISONO

Agus Suharsono
Widyaiswara BDK Yogyakarta, BPPK

Bungsu dari empat bersaudara anak hasil perkawinan fenomenal antara Dewi Sukesri sang perawan dan Wisrowo sang resi adalah Gunawan Wibisono. Berbeda dengan tiga saudaranya yang menampilkan wujud raksasa sebagaimana garis keturunan sang ibu, Gunawan Wibisono berwujud satria sebagaimana ayahandanya. Wujudnya mirip dengan kakak tirinya, anak Resi Wisrowo dengan Dewi Lokapala, yaitu Prabu Danaraja atau Danapati. Kakak tirinya itu mati dibunuh kakak kandungnya, Rahwana, yang ingin merebut wilayah dan kekuasaannya. Prabu Danaraja adalah satria yang ingin mempersunting Dewi Sukesri, namun menjadi ibu tirinya. Akhlak Prabu Danaraja terkenal sangat baik, ketika ia mati di tangan Rahwana, oleh para Dewa sukmanya dinaikkan derajatnya menjadi Dewa Daniswara.

Wujud Gunawan Wibisono memang seorang satria, manusia biasa, yang nampak kecil jika bersanding dengan tiga saudaranya. Namun, sebagai anak seorang Resi yang saktimandraguna, Gunawan Wibisono juga seorang satria yang tangguh dan sangat sakti. Suatu ketika, kayangan tempat para dewa diserang oleh balatentara raksasa, Rahwana yang masih muda dan gemar mencari ilmu kesaktian, datang membela para dewa. Rahwana bersaudara berhasil meredam huru-hara di kayangan. Para dewa memberi Rahwana bersaudara, selain Sarpokenoko, bidadari untuk dijadikan istri. Rahwana memperistri Deri Tari. Gunawan Wibisono memperistri Dewi Triwati, putri Dewa Indra. Perkawinan tersebut membuahkan dua anak yaitu Dewi Trijoto dan Dentawilukromo. Dewi Trijoto adalah putri yang setia menemani dan menghibur Dewi Sinta selama di taman Asoka, selama diculik Rahwana. Sedangkan Dentawilukromo, kelah menjadi raja menggantikan Gunawan Wibisono yang mengikuti jalan yang

ditempuh ayahandanya, menjadi resi di ujung usianya.

Saat Rahwana membawa pulang Dewi Sinta dan memenjarakannya di taman Asoka, berbeda dengan saudaranya, Gunawan Wibisono tidak setuju dengan tindakan kakaknya yang menuruti nafsu kehendaknya. Dewi Sinta harus dikembalikan kepada suaminya, Rama Wijaya karena mengambil milik orang lain adalah kejahatan. Sarpokenoko sangat mendukung Rahwana karena ia punya dendam kepada Rama Wijaya dan Lesmana yang menolak pinangannya, terlebih pada Lesmana yang membuat hidungnya cacat. Kumbokarno, tidak setuju dengan Rahwana, namun ia memilih untuk diam dan tidur bertahun-tahun. Itulah mengapa ia mengutus Dewi Trijoto, putrinya, untuk menemani Dewi Sinta di Taman Asoka, tidak boleh meninggalkan sedetikpun, pesannya. Ia tahu bagaimana watak kakaknya itu.

Namun, ada satu rahasia besar yang tidak semua tahu, hanya Gunawan Wibisono yang tahu. Dulu saat Rahwana masih sangat muda, masih sangat bersemangat melanglang buana menuntut ilmu kesaktian sampai ke kayangan. Suatu ketika, tanpa sengaja Rahwana melihat bidadari yang menambatkan hatinya yaitu Widowati. Sejak itu hatinya tidak dapat berpaling ke lain hati, hanya ada Widowati. Rasa itu ia pendam, ia raksasa, dia bidadari. Dewi Widowati hanya mau diperistri oleh Dewa Wisnu, dewa kebijaksanaan dan pemelihara keseimbangan dunia, bukan dirinya.

Waktu berlalu, Rahwana sudah menjadi rajadiraja, kehendak menguasai ilmu dan kekuasaan membuatnya sering meninggalkan kerajaan Alengka, juga saat istrinya Dewi Tari mengandung. Saat itulah Gunawan Wibisono ditunjuk sebagai pengganti karena ia menguasai ilmu tata negara sebagaimana ayahandanya. Kandungan Dewi Tari sudah tiba waktunya untuk lahir,



seorang bayi perempuan jelita. Gunawan Wibisono bukan satria sembarangan, dengan keluasan ilmu dan kesaktiannya ia paham, bayi perempuan yang dilahirkan Dewi Tari adalah titisan Dewi Widowati. Sebentar lagi Rahwana pulang, Gunawan Wibisono segera mengambil tindakan cepat. Bayi perempuan itu dimasukkan dalam kupat sinta dan dibuangnya. Sebagai ganti dengan kesaktiannya ia ciptakan bayi laki-laki dari awan, kelak bayi itu diberinama Megananda atau Indrajit anak Rahwana yang sangat sakti, tidak mudah mati.

Rahasia itu tersimpan bertahun-tahun, sampai suatu ketika Rahwana pulang membawa Dewi Sinta yang ia culik dari suaminya Rama Wijaya yang sedang menjalani hukuman pembuangan di hutan. Sebenarnya bukan pertama kalinya Gunawan Wibisono melihat watak kakaknya melampiaskan kehendaknya. Dulu, Rahwana ingin mempersunting Dewi Sukasalya istri Prabu Banaputra penguasa Ayodya. Karena ditolak, Rahwana membunuh Prabu Banaputra dan mengejar Dewi Sukasalya sampai ke hutan. Di titik kritis, dewa turun tangan menyelamatkan Dewi Sukasalya dengan menciptakan Dewi Sukasalya tiruan dari bunga sanggul Dewi Sukasalya asli. Dewi Sukasalya tiruan hanya boneka semata, tidak bisa ngomong sebagaimana layaknya manusia. Rahwana sangat marah

karenanya, saat itulah kebenciannya pada para dewa memuncak.

Rahwana membawa pulang Dewi Sukasalya tiruan, istri dan selir sudah ada, namun Gunawan Wibisono diam saja, ia paham watak kakaknya. Berbeda saat Rahwana membawa pulang Dewi Sinta, ia putuskan harus bertindak agar tidak rusak tatanan dunia. Ia tahu Dewi Sinta adalah anak Rahwana dengan Dewi Tari yang ia buang saat masih bayi. Tidak boleh terjadi ayah mengawini anaknya. Rahwana tidak mau mendengar, bahkan ia sangat marah kepada Gunawan Wibisono. Pada titik ini, Gunawan Wibisono harus mengambil keputusan, tetap di istana dengan segala kemewahan namun berada di pihak yang salah atau pergi ke kubu Rama Wijaya di tenggah hutan namun berada di pihak yang benar. Diiringi empat prajurit raksasa, Gunawan Wibisono meninggalkan istana bergabung dengan Rama Wijaya.

Tidak mudah bagi Gunawan Wibisono untuk diterima di kubu Rama Wijaya, Sugriwo sebagai panglima pajurit wanoro menolaknya, yang lain juga ada keraguan. Tidak mudah ternyata untuk bergabung pada pihak yang benar. Namun, Rama Wijaya sebagai titsan Wisnu melihat ada ketulusan pada diri Gunawan Wibisono maka ia terima dengan senang hati.

Betul prediksi Rama Wijaya, saat akhirnya perang antara Rahwana dengan Rama Wijaya tidak terelakkan, Gunawan Wibisono adalah penasehat perang yang dapat diandalkan karena mengerti rahasia-rahasia para panglimanya Rahwana. Saat Kumbokarno akhirnya menjadi panglima perang Rahwana, Gunawan Wibisono minta izin Rama Wijaya untuk menemui kakaknya untuk diajak bergabung ke kubu Rama Wijaya. Pertemuan itu sangat mengharukan, Kumbokarno memang berwujud raksasa, namun hatinya seorang satria, ia tahu kakaknya salah, namun tindakan Rama Wijaya menyerang Alengka juga tidak bisa dibenarkan. Kumbokarno menyindir Gunawan Wibisono yang lari ke pihak musuh saat negaranya diserang musuh. Gunawan Wibisono mempunyai

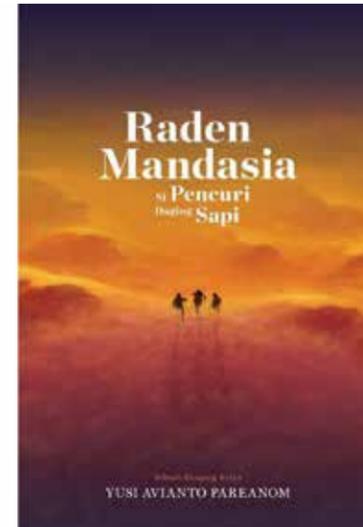
alasan berpihak pada pihak yang benar, Kumbokarno berpegang pada alasan bela tanah air dan negaranya dimana selama ini ia hidup.

Tidak ada benar yang memang sebenarnya benar, juga tidak ada salah yang benar-benar salah. Kumbokarno dan Gunawan Wibisono saling pandang dalam diam, kemudian saling berpelukan, inilah pelukan perpisahan dua saudara. Saat itulah Kumbokarno membisikkan sesuatu yang selama ini menjadi rahasia keluarga. Kumbokarno ingin melepaskan kutukan Jambumangli kepada Resi Wisrawa ayahandanya. Jambumangli, sepupu Dewi Sukesesi sangat menginginkan untuk memperistri Dewi Sukesesi, namun tak kuasa mengeluarkan isi hatinya. Untuk menghalangi ada yang menyunting Dewi Sukesesi ia membuat sayembara, suami Dewi Sukesesi harus bisa mengalahkannya, Resi Wisrowo yang mampu mengalahkannya dan memperistri Dewi Sukesesi. Jambumangli tak mau kehilangan Dewi Sukesesi, ia cegat perjalanan Resi Wisrowo dan Dewi Sukesesi yang ingin pulang ke pertapaan hingga pertempuran sengit, Resi Wisrowo membunuh Jambumangli dengan sangat sadis, tangan dan kaki Jambumangli diputus-pisahkan dari badan sebelum dipengal kepalanya. Saat itulah ia melepaskan kutukan, salah satu anak Resi Wisrowo akan mati sebagaimana dirinya mati. Kutukan itu mengikat Resi Wisrowo sehingga tidak bisa moksa menuju kesempurnaan. Hati Gunawan Wibisono semakin haru, kakaknya Kumbokarno ternyata berhati mulai, rela berkorban demi negara dan ayahandanya. Sebenarnya ia sangat malu, dunia mengenalnya seolah ia lebih mulia, sebenarnya tidak. Kumbokarno sudah menyelesaikan kewajibannya sebagai satria pembela negara dan anak yang berbakti pada orang tua, Gunawan Wibisono punya tugas dan tanggungjawab sendiri.

Perang kubu Rama Wijaya dengan kubu Rahwana makin berkobar, Indrajit sebagai panglima perang Rahwana kesaktiannya tidak tertandingi, banyak

membunuh prajurit wanoro dan satria. Rama Wijaya minta nasehat Gunawan Wibisono, siapa yang dapat meredam kesaktian Indrajit? Saatnya sudah tiba, ia harus turun ke medan perang, tidak ada yang bisa menandingi Indrajit selain dirinya. Indrajit yang sedang mengamuk di puncak kemenangan, matahari sudah condong ke peraduan saat Gunawan Wibisono menghampirinya. Dalam situasi damai Indrajit sangat menghormati Gunawan Wibisono bagaimana hormatnya anak pada ayahandanya, tapi ini medan perang, tugasnya adalah membunuh musuh, meski itu paman yang ikut membesarkannya. Indrajit mengarahkan senjata saktinya ke Gunawan Wibisono, sedih hati Gunawan Wibisono anak yang ia ciptakan sudah membuat kerusakan, banyak membunuh dan merugikan kehidupan, bahkan kini berani mengacungkan senjata saktinya ke wajahnya. Gunawan Wibisono memejamkan mata, puluhan tahun lalu ia ciptakan bayi dari awan dengan kesaktiannya, kini dengan kesaktiannya juga ia kembalikan bayi yang kini sudah jadi panglima besar kembali ke asalnya. Nama lain Indrajit adalah Megananda, dari mega kembali ke mega. Saat Gunawan Wibisono membuka mata, medan laga diliputi kabut kelam, matahari diambang peraduan tanda perang harus lerai. Pasukan kembali ke barisan, menguburkan rekan yang gugur, mengobati yang terluka. Sampai matahari tenggelam, tidak ada yang menemukan jasad Indrajit.

Gunawan Wibisono, memandang awan kelam yang berarak dilangit, itulah Indrajit. Kembalilah ke asalmu anakku, bisik Gunawan Wibisono sambil bergegas balik menuju tendanya. Perang ini sudah mengkoay kehidupan, darah sudah mengalir, luka masih basah, persaudaraan terpisah, semua ini demi apa? Demi memuaskan dahaga cinta Rahwana atau demi memuaskan kecewa Rama Wijaya? Namun, siapa yang jadi korban? Berapa yang jadi korban? Malam itu Gunawan Wibisono tenggelam dalam doa pasrah kisah apalagi yang harus ia jalani, besuk pagi.



Pengarang: Yusi Avianto Pareanom

Penerbit: Banana

Tahun terbit: Maret 2016

Tebal buku: 468 halaman

Oleh: Ardes M. Y. Sitanggang

SUNGU LEMBU menjalani hidup membawa dendam. Raden Mandasia menjalani hari-hari memikirkan penyelamatan Kerajaan Gilingwesi. Keduanya bertemu di rumah dadu Nyai Manggis di Kelapa. Sungu Lembu mengerti bahwa Raden Mandasia yang memiliki kegemaran ganjil mencuri daging sapi adalah pembuka jalan bagi rencananya. Maka, ia pun menyanggupi ketika Raden Mandasia mengajaknya menempuh perjalanan menuju Kerajaan Gerbang Agung.

Berdua, mereka tergulung dalam pengalaman-pengalaman mendebarkan. Bertarung melawan lanun di lautan, ikut menyelamatkan pembawa wahyu, bertemu dengan juru masak menyebarkan dan hartawan dengan selera makan yang menakutkan, singgah di desa penghasil kain celup yang melarang penyebutan warna, berlomba melawan maut di gurun, mengenakan kulit sida-sida, mencari cara menjumpai Putri Tabassum Sang Permata Gerbang Agung yang konon tak pernah berkaca karena cermin-cermin di istananya bakal langsung pecah berkeping-keping tak sanggup menahan kecantikannya, dan

akhirnya terlibat dalam perang besar yang menghadirkan hujan mayat belasan ribu dari langit.

Buku ini sangat cocok kepada penyuka cerita kolosal, sebab terdapat puluhan tokoh, dimana masing-masing karakter tersebut membangun alur cerita yang menarik. Banyaknya tokoh dalam buku ini mungkin akan sedikit membingungkan, apalagi dikarenakan nama-namanya bagi sebagian orang belum terasa *familiar*. Akan tetapi, bagi penggemar cerita wayang ataupun mereka yang mengetahui budaya Jawa, akan dapat lebih mudah memahami dan mengingat penokohan dalam buku ini. Perlu diingat bahwa buku ini dikhususkan untuk dewasa. Sepanjang cerita, banyak terdapat makian dengan menggunakan kata-kata binatang dan sumpah serapah lainnya. Selain itu, dibebberapa bagian buku juga terdapat konten yang hanya cocok untuk orang dewasa.

Saat pertama kali membaca buku ini, kemungkin kita akan terkecoh. Saat membaca judul secara sekilas, kemungkinan kita akan otomatis menganggap bahwa buku ini adalah cerita tentang Raden Mandasia. Akan tetapi justru Sungu Lembu yang menjadi tokoh sentral. Sungu Lembu bercerita dengan gaya khas, terkadang serius, terkadang lucu, sedih, ditambah selipan makian yang khas membuat saat kita membaca buku tersebut, seolah-olah kita mendengarkan orang yang bercerita langsung kepada kita sendiri. Sewaktu membaca buku ini, bersiaplah untuk tenggelam ke dalam dunia yang dibangun oleh penulis, seolah mendengarkan Sungu Lembu bercerita tentang perjalanannya dalam upaya membalas dendam terhadap kerajaan yang menguasai kampung halamannya.

Alur cerita yang dilakoni merupakan campuran, alur maju-mundur. Akan tetapi, jalan cerita mengalir dengan sendirinya, bahkan disaat membaca. Setiap cerita, baik alurnya maju ataupun mundur, akan terjalin kembali menjadi

suatu jalan cerita yang utuh. Alur cerita yang mengambil latar belakang kerajaan dan mempunyai kekhasan tertentu akan membuat kita membandingkan cerita tersebut dengan sejarah yang pernah kita baca ataupun pengetahuan yang kita ketahui. Sebagai contoh, kerajaan penghasil rempah-rempah, berkuda/berlari-menyeberangi gurun selama sehari-hari, kota-kota pelabuhan yang ramai sebagai tempat pertemuan dari arah barat dan timur, kota dengan tembok berlapis, jalur sutra, dimakan paus, dan masih banyak lagi. Jangan terkecoh, karena seperti di sampul bukunya, cerita yang kita baca hanyalah sebuah dongeng. Jika kita membandingkan lagi, kita malah akan bingung. Kita cukup mengikuti cerita Sungu Lembu saja.

Kisah yang diceritakan Sungu Lembu akan menghanyutkan kita dalam kesedihan kisah keluarga dan kenalan yang harus dia tinggalkan karena kerajaan Giliwengsi, sehingga dia bersumpah untuk membalas dendam, pertemuannya dengan Nyai Manggis membawa kepada pertemuannya dengan Raden Mandasia, yang ironisnya adalah anak dari Raja yang dia bersumpah untuk balas dendam. Hobi ganjil dari Raden Mandasia, keseruan dan kelucuan petualangan yang mereka jalani berdua di laut, di gurun dan di Kerajaan Gerbang Agung, perubahan yang dialami Sungu Lembu disaat peperangan antara Kerajaan Giliwengsi dan Gerbang Agung, dan akhirnya kesempatan membalaskan dendam yang diperoleh Sungu Lembu namun tidak dilakukannya.

Terakhir, keseruan cerita terletak di bab akhir dari cerita Sungu Lembu. Ada kejutan yang tidak kita sangka-sangka di akhir ceritanya. Selamat menikmati dongeng yang membuat kita tenggelam dengan alur kisahnya, menghayati perjalanan dan perubahan dalam diri Sungu Lembu, dan tertawa atas kelucuan yang terjadi dalam Raden Mandasia Si Pencuri Daging Sapi.

Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode 1 Tahun 2017

Jakarta, 1 Mei s.d. 4 Juni 2017



Muhammad Virly I. A.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Materi kuliah yang diajarkan sangat interaktif dan menyenangkan hal ini didukung pula oleh tenaga pengajar yang berpengalaman. Kegiatan diluar dari kegiatan kelas juga sangat menyenangkan dan dapat membuat tubuh sehat rohani dan fisik

Nasiha Alkasina
Sekretariat Jenderal



Latsar (Diklat Dasar) yang telah saya ikuti secara keseluruhan menyenangkan. Materi yang diberikan lengkap dan disajikan secara kreatif oleh pengajar. Fasilitas di wisma juga lengkap dan kamarnya nyaman.
Diklat 5 minggu jadi tidak terasa berat :)
Terima kasih untuk seluruh penyelenggara! :)

Luky Arjun D.
Inspektorat Jenderal



Saya rasa BPPK sudah cukup komit menuju kearah *Corporate University*. Yang saya tangkap disini adalah semangatnya. Walaupun secara teknis pelaksanaan berubah total, produk lama rasa baru. Rasa yang dihasilkan justru lebih manis. Hemat kami yang sebelumnya menyangka akan membosankan, terbantahkan sudah.
Nilai dan budaya Kemenkeu terinternalisasi, disiplin terpatri, saling menghormati terhabituasi, kesehatan jasmani diperbaiki, dan paling utama adalah penghargaan terhadap waktu. Sebulan yang dipikir akan lama, justru merubah kami. Setiap ada pintu terngiang "Izin masuk". Dua kata modal kecil tapi sangat berharga
#TerimakasihLatsar

Kang Edu



Oleh : Bimo



korupsi
berakibat

**KERUGIAN
DIRI**



bppk
against
corruption



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

